STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN BERBASIS KLUSTER

(Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kawasan Agropolitan GEDANGSARI Kabupaten Madiun)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

SISKA AYU FITRIA

NIM. 105030103111022



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2014

MOTTO

"Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the real determinant of your success."

Kecerdasan bukan penentu kesuksesan, tetapi kerja keras merupakan penentu kesuksesanmu yang sebenarnya.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Strategi Pemerintah Kabupaten Madiun Dalam Pengembangan

Kawasan Agropolitan Berbasis Kluster (Studi Pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kawasan Agropolitan

GEDANGSARI Kabupaten Madiun)

Disusun oleh : Siska Ayu Fitria

NIM : 105030103111022

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : Non Konsentrasi

Malang, Oktober 2014

Komisi Pembimbing

Ketua

Prof. Dr. Soesilo Zauhar, M.S.

NIP. 19540306 197903 1 005

Anggota

Dr. Abdullah Said, M.Si

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

: 20 November 2014 Tanggal

: 08.00 WIB Jam

Skripsi atas nama : Siska Ayu Fitria

Judul : Strategi Pemerintah Kabupaten Madiun

> Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kluster (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kawasan Agropolitan **GEDANGSARI** Kabupaten

Madiun)

Dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua Majelis penguji

Anggota Penguji I

Prof. Dr. Soesilo Zauhar, M.S.

NIP. 19540306 197903 1 005

Dr. Abdullah Said, M.Si NIP. 195/0911 198503 1 003

Anggota Penguji II

Dr. Hermawan, S.IP, M.Si

NIP. 19720405 2003121 1 001

Anggota Penguji III

Drs. Abdul Wachid, MAP NIP. 19561209 198703 1 008

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat2 dan pasal 70)

> Oktober 2014 Malang,



Nama: Siska Ayu Fitria NIM: 105030103111022



RINGKASAN

Siska Ayu Fitria, 2014. **Strategi Pemerintah Kabupaten Madiun Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kluster (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kawasan Agropolitan Kabupaten Madiun).** Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS dan Dr. Abdullah Said, MSi.

Sebagai upaya penguatan struktur ekonomi di Kabupaten Madiun yang berbasis agro, maka perlu pengembangan sistem pembangunan yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan. Pengembangan sistem agribisnis di Kabupaten Madiun direncanakan melalui proses pemberdayaan masyarakat, permberdayaan institusi Pemerintah dan peningkatan investasi. Di Pedesaan strategi pengembangan sistem agribisnis tersebut dilaksanakan dengan pola Agropolitan. Keragaman diversifikas komoditas dapat memberikan nilai tambah tersendiri pada komoditas, sehingga komoditas unggulan di Kabupaten Madiun dapat mengahasilkan produk sekunder dan tersier yang juga berpotensi menjadi produk unggulan. Dengan adanya kekuatan internal wilayah Kawasan Agropolitan GEDANGSARI, maka diharapkan dapat menjadi daya tarik para investor untuk mengembangkan kegiatan agroindustri dalam skala yang lebih besar lagi.

Fokus penelitian dibatasi pada Aspek kondisi infrastruktur, sumberdaya manusia dan akses permodalan dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster di Kabupaten Madiun, Proses dan pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster di Kabupaten Madiun dan Strategi pemerintah dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster di Kabupaten Madiun. Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster di Kabupaten Madiun serta strategi pemerintah Kabupaten Madiun dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster.

Mengacu pada hasil penelitian bahwa Pengembangan kluster agribisnis Kawasan Agropolitan yang terbentuk secara umum sudah terealisasi. Hanya saja, diperlukan perluasan kawasan produksi di masing-masing kluster serta peningkatan skala kegiatan. Sehingga komoditas unggulan, tidak hanya dapat diproduksi di beberapa desa dalam satu kecamatan saja, tetapi di seluruh desa dalam kecamatan tersebut. Proses dan pelaksanaan tersebut didukung oleh struktur ruang kawasan agropolitan yang masih relevan digunakan karena pengembangan Kawasan Agropolitan mengacu pada *review master plan* dan peran serta masyarakat.

Untuk mengoptimalkan strategi Pembangunan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Madiun perlu ditingkatkan Evaluasi Pembangunan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Madiun. Dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan secara terintegrasi, perlu disusun rencana strategis dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan yang akan menjadi acuan penyusunan program pengembangan.

SUMMARY

Siska Ayu Fitria, 2014 Madison County Government Strategy in the Development Zone Cluster-Based Agropolitan (Studies in Development Planning and Agropolitan GEDANGSARI Madison County). Supervisor: Prof. Dr. Susilo Zauhar, MS and Dr. Abdullah Said, MSi.

In an effort to strengthen the economic structure in Madiun agro-based, it is necessary to the development of integrated construction systems, synergistic and sustainable. Development of agribusiness system in Madison County is planned through the process of community empowerment, empowerment Government institutions and increased investment. Rural development strategies in the agribusiness system implemented with Agropolitan pattern. Diversifikas diversity of commodities can provide added value to commodities, thus leading commodities in Madison County can result in secondary and tertiary products are also potentially be a superior product. With the internal strength GEDANGSARI Agropolitan Regions region, it is expected to be the attraction of investors to develop agro-industry activities in a larger scale again.

The focus of the study is limited to the aspect of the condition of infrastructure, human resources and access to capital in the development of cluster-based agropolitan in Madiun, process and implementation of cluster-based development agropolitan in Madison County and governments in the development strategy of cluster-based agropolitan in Madison County. Based on the focus and purpose of the study, the research method used is descriptive method with qualitative approach. This study aims to determine the process and implementation of cluster-based development agropolitan in Madison County and Madison County government strategy in the development of cluster-based agropolitan.

Referring to the results of research that Agropolitan Area Development agribusiness clusters are formed generally been realized. However, the required expansion of production areas in each cluster and increased scale of activities. Thus leading commodity, not only can be produced in several villages in a single district, but in the whole village in the township. And implementation process is supported by the structure of the space that is still relevant agropolitan used for development Agropolitan Area refers to the review master plan and the role of the community.

To optimize the development strategy Agropolitan in Madison County area needs to be improved evaluation Agropolitan Area Development in Madison County. In order to develop an integrated agropolitan, is necessary to prepare a strategic plan in Agropolitan Area Development will be the reference formulation development program.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, ucapan tanpa batas untuk Yang Maha Kuasa, Allah SWT atas setiap nafasku dan keberkahanNya. Shalawat serta salam bagi junjunganku, Nabi Muhammad SAW atas teladannya. Penulis ucapkan terimakasih kepada:

- 1. Keluarga tercinta Papi, Mami, Kakak, Keponakan yang telah banyak memberikan perhatian, kasih sayang, dan motivasi serta pengorbanan dalam bentuk apapun untuk selalu memberikan yang terbaik.
- 2. Semua teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya Administrasi Publik angkatan 2010, Adinda, Bety, Hardik, Sumbogo, Dini, Imel, Mega, Bagus, Ninda, Elly, Bhismo, Widhi, Tommy, Ipul dll yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu.
- 3. Terima Kasih kepada penghuni Kost JL Bantaran Barat II No 5, Dwi, Mega, Farisa, Mbak Vika, Mbak Nanik, Ayu, Ratih, Shinta, Viska, Bella, Ida, Indri, Mentari, Diah, Febby dan semua yang telah memberikan motivasi-motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dan kalian membuat hari-hari ku di Malang sangat Indah.
- Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas budi baik Anda semua.

Terima Kasih banyak, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua.

Malang, Oktober 2014

Penulis Siska Ayu Fitria



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, yang telah melimpahkan berkahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah Kabupaten Madiun Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kluster (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kawasan Agropolitan GEDANGSARI Kabupaten Madiun)".

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

- Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- 3. Dr. Lely Indah Mindarti, MSi selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

- 4. Prof. Dr. Soesilo Zauhar, M.S dan Drs. Abdullah Said, M. Si selaku pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, arahan, nasehat, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tahapan skripsi ini.
- Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Publik atas segala ilmu yang diberikan.
- 6. Seluruh Keluarga Besar Pemerintah Kabupaten Madiun, khususnya BAPPEDA.
- Seluruh Keluarga Besar Kawasan Agropolitan GEDANGSARI (Geger, Dagangan, Dolopo, Kebonsari) Kabupaten Madiun.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan skripsi masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Oktober 2014

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
TANDA PENGESAHAN	
ORISINILITAS SKRIPSI	
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	X
DAFTAR ISIDAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kontribusi Penelitian	12
E. Sistematika Pembahasan	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Administrasi Publik	16
1. Pengertian Administrasi Publik	16
2. PeranAdministrasi Publik	17
B. Perencanaan Pembangunan	18
1. Definisi Perencanaan	18
Definisi Pembangunan	20
3. Definisi Perencanaan Pembangunan	21
4. Peran Pemerintah dalam Pembangunan	21
5. Badan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah	
C. Teori Strategi	23
1. Pengertian Strategi	
2. Pengertian Perencanaan Strategis	
3. Syarat-syarat Strategi	
4. Komponen Penetapan Strategi	
5. Manfaat Strategi	
D. Kawasan Agropolitan	
1. Pengertian Kawasan Agropolitan	
2. Ciri-ciri Kawasan Agropolitan	33
3. Persyaratan Kawasan Agropolitan	
4. Sistem Kawasan, Cakupan Wilayah dan Tipologi Kawasan	
Agropolitan	
E. Pengembangan Kawasan Agropolitan	
1. Pengertian Pengembangan Kawasan Agropolitan	40

2. Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan	. 41
3. Sasaran Pengembangan Kawasan Agropolitan	. 43
4. Komponen Penting dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan	
5. Infrastruktur sumbardaya manusia dan aksas parmodalan	
dalam pengembangan kawasan agropilitan	. 45
F. Teori Kluster	. 49
1. Pengertian Kluster	
2. Manfaat Kluster	
3. Strategi Pengembangan Kluster	
BAB III METODE PENELITIAN	. 53
A. Jenis Penelitian	. 53
B. Fokus Penelitian	. 55
C. Lokasi Penelitian	. 57
D. Sumber Data	
E. Teknik Pengumpulan Data	. 59
F. Instrumen Penelitian	. 60
G. Analisis Data	. 61
H. Keabsahan Data	
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	. 64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Umum Kabupaten Madiun	
a. Sejarah Kabupaten	. 64
b. Visi dan Misi	
c. Kondisi Geografis dan wilayah administrative	
d. Karakteristik Wilayah	. 70
e. Kondisi Demografi	.71
2. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Kabupaten Madiun	
a. Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Madiun	
b. Struktur Dinas	
c. Tugas Pokok dan Fungsi	. 76
3. Gambaran Umum Kawasan Agropolitan GEDANGSARI	
Kabupaten Madiun	
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	
1. Kondisi infrastruktur, sumberdaya manusia dan akses permodalan	7
dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster	
di Kabupaten Madiun	
a. Kondisi Infrastruktur	
b. Kondisi Sumber Daya Manusia	. 84
c. Kondisi Akses Permodalan	. 86
2. Proses dan pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan	
Berbasis kluster di Kabupaten Madiun	
a. Pelaksanaan proses pengembangan kawasan agropolitan	. 87
b. Hasil dari pelaksanaan pengembangan kawasan	

agropolitan berbasis kluster di Kabupaten Madiun95	
3. Strategi pemerintah dalam pengembangan kawasan agropolitan	
berbasis kluster di Kabupaten Madiun dapat dilihat dengan	
bebarapa hal99	
a. Peningkatan sumberdaya manusia sebagai pelaku kegiatan	
dalam mendukung kelembagaan guna pengembangan	
kawasan agropolitan10	1
b. Pengembangan agribisnis103	
c. Peningkatan investasi dan permodalan dalam mendukung	
pengembangan kawasan agropolitan10	5
d. Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung	
pengembangan kawasan agropolitan100	6
pengembangan kawasan agropolitan	0
1. Kondisi infrastruktur, sumberdaya manusia dan akses permodalan	
dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis	
kluster di Kabupaten Madiun110	0
a. Kondisi Infrastruktur112	2
c. Kondisi Sumber Daya Manusia11:	5
d. Kondisi Akses Permodalan110	
2. Proses dan pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan	
Berbasis kluster di Kabupaten Madiun11	7
a. Pelaksanaan proses pengembangan kawasan agropolitan 11'	7
b. Hasil dari pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan	
berbasis kluster di KabupatenMadiun119	9
3. Strategi pemerintah dalam pengembangan kawasan agropolitan	
berbasis kluster di Kabupaten Madiun dapat dilihat dengan	
bebarapa hal122	2
a. Peningkatan sumber daya manusia sebagai pelaku kegiatan	
dalam mendukung kelembagaan guna pengembangan	
kawasan agropolitan	2
	3
c. Peningkatan investasi dan permodalan dalam mendukung	
pengembangan kawasan agropolitan123	5
d Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung	
pengembangan kawasan agropolitan	5
BAB V PENUTUP	8
A. Kesimpulan	8
B. Saran	0
DAFTAR PUSTAI	KA

xii

DAFTAR TABEL

No Judul	Hal.
1. Tipologi Kawasan Agropolitan	38
2. Banyaknya desa dan kelurahan menurut kecamatan tahun 2013	
di Kabupaten Madiun	70
3. Jumlah penduduk Kabupaten Madiun tahun 2013	71
4. Panjang dan Persebaran Sungai di Kawasan Agropolitan	
GEDANGSARI tahun 2013	79
5. Jumlah Penduduk di Kawasan Agropolitan GEDANGSARI	
tahun 2013	85
6. Pembagian Kluster Pertanian	89
7. Pembagian Hierarki Wilayah di Kawasan Agropolitan	T
GEDANGSARI	90
8. Hasil komoditas buah-buahan (mangga, manggisdan durian)	
tahun 2013 dalam satuan ton	98
9. Rencana Lokasi Penyediaan Bibit	108



DAFTAR GAMBAR

No Judul	Hal.
1. Proses dan Pelaksanaan Pembangunan	26
2. Komponen-komponen Analisis Data	62
3. Lambang Kabupaten Madiun	67
4. Peta Wilayah Kabupaten Madiun	68
5. Struktur Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Madiun	75
6. Konsep Keterpaduan Agribisnis	104



DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Rekomendas ijin Survey
- 2. Surat Keterangan Penelitian
- 3. Pedoman Wawancara





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi merupakan hal yang yang sangat penting dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan, karena tanpa adanya administrasi tujuan yang ingin dicapai tidak akan berjalan dengan baik. Menurut Haryanto (2008:11) bahwa administrasi publik memiliki peran penting bagi para pengambil kebijakan dalam menentukan strategi pengelolaan pemerintahan maupun organisasi publik. Administrasi publik dapat dikatakan memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat adalah dengan cara melakukan pembangunan.

Pembangunan menurut Suryono, (2004:21) merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Dalam pembangunan terjadi suatu proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan untuk hasil yang lebih baik. Peran pemerintah harus lebih aktif dalam menggerakkan masyarakat agar ikut serta dalam partisipasi pembangunan serta mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh suatu Negara maupun daerah untuk mencapai tujuan dan citacita bangsa, karena pembangunan dapat berjalan melalui kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Disisi lain pemerintah harus mempunyai perencanaan dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan yaitu merupakan

suatu tahapan awal proses pembangunan, dibutuhkan strategi dalam program pembangunan, peran masyarakat dalam pembangunan harus ditumbuhkan dengan memberikan dorongan kesadaran, pemahaman dan penghayatan bahwa pembangunan adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab seluruh rakyat. Dengan, demikian maka hasil-hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, menyebutkan bahwa pembangunan harus memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, karena di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, masalah potensi daerah yang berbeda, baik sosial, budaya dan geografisnya. Sehingga penerapan kebijakan di suatu daerah pun juga berbeda. Maka kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerahnya untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya nanti akan berbengaruh pada pencapaian hasil pembangunan yang tepat guna dan hasil guna dalam arti pembangunan yang dilaksanakan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat untuk kelangsungan hidupnya.

Potensi daerah terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia dan letak geografis, ke tiga hal tersebut menjadi modal dasar dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah dapat berhasil apabila memahami permasalahan yang dihadapi daerah dan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Menurut Rudy (2002:16) mengemukakan bahwa permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunannya yaitu bukan karena keterbatasan sumber dana pembangunan atau terbatasnya sumber daya alam dan sumber daya manusia

yang dimiliki, tetapi yang harus diperhatikan adalah bagimana manajemen pembangunannya. Setiap daerah ditantang untuk berbenah diri menghadapi era persaingan yang tidak hanya bersifat lokal tetapi juga bersifat global. Persaingan ini menuntut setiap bangsa, negara dan daerah untuk berbenah diri dengan memberi lingkungan paling kondusif bagi pelaku bisnis dalam berusaha. Hal ini memerlukan strategi dan perencanaan yang dirumuskan oleh segenap komponen pembangunan daerah (pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil) untuk dapat unggul di tingkat regional maupun internasional guna menunjukkan usaha yang paling kompetitif, yang dikenal dengan istilah daya saing daerah.

Pemerintah telah mencanangkan pelaksanaan pembangunan dalam bentuk pembangunan nasional secara terencana, bertahap dan berkesinambungan, salah satunya pembangunan agropolitan. Pengembangan atau pembangunan kawasan agropolitan mempunyai peranan penting karena wilayah agropolitan yang menampilkan sistem agribisnis akan menghasilkan aliran manfaat ekonomi untuk menjamin keberlanjutan. Hal ini ditandai dengan transformasi struktur ekonomi wilayah yaitu kenaikan peran sektor manufaktur yang berbasis *on-farm* yaitu pengolahan hasil produksi. Pada wilayah tersebut biasanya terjadi proses pembelajaran yang luar biasa pada masyarakat dalam hal berwirausaha (*entrepreneurship*). (*Masterplan kawasan agropolitan Kabupaten Madiun tahun* 2005).

Agropolitan merupakan salah satu upaya mempercepat pembangunan pedesaan pertanian, dimana kota sebagai pusat kawasan dengan ketersediaan sumberdayanya, tumbuh dan berkembang dengan mengakses, melayani,

mendorong, dan menghela usaha agrobisnis di desa-desa kawasan (hinterland) dan desa-desa sekitarnya, sedangkan kawasan agropolitan menurut Rustiadi dan Pranoto (2007:6) merupakan kawasan pedesaan secara fungsional yang kawasan dengan kegiatan utama adalah sektor pertanian. Berdasarkan kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan kawasan agropolitan pada pasal 1 ayat 24 Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Konsep pengembangan agropolitan pertama kali diperkenalkan Mc. Douglass dan Friedmann, sebagai suatu siasat untuk percepatan pembangunan pedesaan. Konsep ini mewujudkan pelayanan perkotaan di kawasan pedesaan atau dengan istilah lain yang digunakan oleh Friedmann adalah "menciptakan kota di pedesaaan". Dengan demikian petani atau masyarakat desa mandiri dalam pelayanan kegiatan agribisnis tidak tergantung dengan kota. Ruang lingkup pelayanan agribisnis yang diciptakan di pedesaan antara lain adalah: teknik budidaya pertanian, teknologi agroindustri, sistem kredit modal kerja dan informasi pasar. Pelayanan agribisnis yang diinternalisasi ke pedesaan juga diharapkan mampu menekan besarnya biaya produksi dan pemasaran dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses produksi dan kinerja pemasaran. Efisiensi dan efektifitas produksi dapat ditingkatkan dengan inovasi teknologi, kemudahan memperoleh modal kerja dan penyediaan fasilitas proses produksi,

pemasaran serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia. (*Masterplan kawasan agropolitan Kabupaten Madiun tahun 2005*).

Pendekatan agropolitan dalam rangka percepatan pembangunan pedesaan diharapkan akan dapat mensejahterakan masyarakat pedesaan setara dengan masyarakat perkotaan. Potensi desa perlu digali dan dikembangkan setara dengan kota terkait, sehingga terjadi keseimbangan sosio-ekonomi, sosio-politik dan sosio-budaya (rural-urban development linkage). Harmoni pembangunan desakota diharapkan mengurangi urbanisasi serta eksploitasi atau penyedotan sumberdaya desa ke kota.

Di Indonesia, pada dasarnya pengembangan kawasan agopolitan bukan konsep baru tetapi dapat digunakan untuk mengoptimalkan hasil-hasil pada daerah-daerah kawasan sentra produksi (KSP), kawasan pengembangan ekonomi maupun pada kawasan tertinggal. terpadu (KAPET) Disamping pengembangan kawasan agropolitan juga perlu mengoptimalkan hasil-hasil program sebelumnya seperti program bimbingan masyarakat (BIMAS), program kawasan industri masyarakat perkebunan (KIMBUN), program kawasan usaha peternakan (KUNAK), program penyediaan prasarana dan sarana pedesaan (PPSD) dan program pengembangan kecamatan (PPK). Dengan demikian program kawasan yang akan dikembangkan adalah untuk mensinergikan berbagai program baik yang berasal dari pusat, propinsi dan kabupaten/ kota pada kawasan andalan yang ditetapkan daerah.

Propinsi Jawa Timur memiliki delapan kawasan andalan yang menjadi motor pertumbuhan, yakni (1) Gerbangkertosusila, (2) Malang dan sekitarnya, (3)

Tuban dan sekitarnya, (4) Probolinggo – Pasuruan dan sekitarnya, (5) Situbondo-Bondowoso – Jember dan sekitarnya, (6) Madiun dan sekitarnya, (7) Banyuwangi dan sekitarnya, serta (8) Kediri – Tulungaggung – Blitar dan sekitarnya. Tiap wilayah memiliki karakteristik atau struktur ekonomi yang khas (Pemprop Jatim, 2005). Pengembangan agropolitan yang berkelanjutan di Jawa Timur seyogyanya mempertemukan aspek-aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Aspek lingkungan dan sosial terwakili oleh keadaan sistem produksi pertanian dan masyarakat pada sentra-sentra produksi pertanian. Kinerja dua aspek ini lumayan baik terbukti dengan dominasi produksi pertanian di Jawa Timur di tingkat nasional. Data-data berikut sudah sangat umum di ketahui. Jawa Timur secara umum memproduksi rata-rata 35% tanaman pangan dan holtikultura nasional. Komoditi yang dominan meliputi tebu, kopi, kakao, dan tembakau. Nugroho (2007:73).

Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) sebagai salah satu pendekatan pembangunan di Jawa Timur telah dimulai sejak tahun 2003 dan Kabupaten Madiun merupakan salah satu dari 20 kawasan agropolitan di Jawa Timur sesuai SK. Gubernur Nomor 0540/41/201.2/2007 tentang Penetapan Kabupaten Madiun sebagai Lokasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Jawa Timur dan Surat Keputusan Bupati Nomor 271 Tahun 2005 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Agropolitan GEDANGSARI (Geger, Dolopo, Dagangan, Kebonsari) tentang Pembuatan Masterplan/Album Peta Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Madiun Tahun 2005. Peran fungsi Pokja (Kelompok Kerja) dalam pengembangan agropolitan sudah sesuai dengan Tupoksi (Tugas pokok dan fungsi) dari masing-masing SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah)

yang terkait yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Badan Ketahanan Pangan, Kantor Lingkungan Hidup, Konsultan LPPM IM3 Kabupaten Madiun.

Pengembangan agribisnis di Kabupaten Madiun direncanakan melalui proses pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan institusi pemerintah dan peningkatan investasi. Strategi pengembangan sistem agribisnis tersebut dilaksanakan dengan pola agropolitan. Pengembangan agropolitan di Kabupaten Madiun ditekankan pada sektor pertanian dan industri kecil (agroindustri) pedesaan. Pengembangan sistem agribisnis di Kabupaten Madiun merupakan kegiatan pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekononomi lokal adalah usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah. Dalam pengembangan ekonomi lokal harus mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki suatu daerahnya terlebih dahulu agar tujuan atau sasaran yang diinginkan dapat tercapai. Agropolitan di Kabupaten Madiun merupakan usaha mengembangkan potensi yang dimiliki Kabupaten Madiun, sehingga dapat meningkatkan percepatan pembangunan pedesaan dengan kedaulatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pedesaan. Diharapkan dapat mewujudkan suatu "agropolis" yang dimiliki

kegiatan ekonomi utama agribisnis serta mampu mencegah urbanisasi. (Masterplan agropolitan Kabupaten Madiun tahun 2005).

Dalam kebijakan kewilayahan rencana tata ruang Kabupaten Madiun tahun 2009 – 2029 kawasan agrolitan ditetapkan menjadi pengembangan kawasan strategis ekonomi dengan penamaan "Kawasan Agropolitan GEDANGSARI (Bagian dari Kawasan Agropolitan Wilis-1). Konsep perencanaan kawasan agropolitan di Kabupaten Madiun berada di Kabupaten Madiun sebelah selatan, yaitu di Kecamatan Geger, Dolopo, Dagangan dan Kebonsari yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Gedangsari atau di dalam kawasan tersebut nantinya direncanakan menjadi kota tani dengan pusat kegiatan di perkotaan Dolopo.

Banyak potensi agro di Kabupaten Madiun tetapi pemerintah memilih wilayah GEDANGSARI, kawasan GEDANGSARI dijadikan pengembangan agropolitan di Kabupaten Madiun karena wilayah tersebut saling berdekatan dan memenuhi syarat dalam pengembangan kawasan agropolitan salah satunya jumlah penduduk di kawasan agropolitan sudah memenuhi syarat karena minimal 75.000-225.000 jiwa atau 15.000 – 45.000 KK (untuk setiap kota tani dengan hinterlandnya). Dengan ditetapkannya kawasan agropolitan GEDANGSARI ini diharapkan akan menjadi magnet pertumbuhan bagi Kabupaten Madiun bagian selatan sehingga aktivitas perekonomian di Kabupaten Madiun akan menjadi lebih hidup karena basis perekonomian Kabupaten Madiun adalah pertanian. Produk unggulan yang direncanakan akan dikembangkan di kawasan agropolitan GEDANGSARI dibagi menjadi beberapa kluster.

Kluster menurut Fatimah (2006:13) yaitu pemusatan geografis industriindustri terkait kelembagaannya. Kluster terdiri atas industri inti, industri terkait,
industri penunjang, dan kegiatan-kegiatan ekonomi (sektor-sektor) penunjang dan
terkait lain, yang dalam kegiatannya akan saling terkait dan saling mendukung.
Lingkup geografis kluster dapat sangat bervariasi, terentang dari satu desa saja
atau salah satu jalan di daerah perkotaan sampai mencakup sebuah kecamatan atau
provinsi. Kluster juga didefinisikan sebagai pengelompokkan suatu kegiatan yang
sejenis dalam lingkup wilayah tertentu, atau dalam pengertian yang lebih sempit
kluster disebut sebagai sentra industri. Sejalan dengan perubahan lingkungan
global, maka pengertian konsep tersebut menjadi berkembang dan makin luas
lingkupnya. Kluster industri adalah kelompok industri spesifik yang dihubungkan
oleh jaringan mata rantai proses penciptaan atau peningkatan nilai tambah.

Adanya pengembangan kluster, merupakan solusi yang dinilai paling efektif dalam pengembangan ekonomi lokal Kabupaten Madiun. Sebab dengan pengembangan kluster, berarti mengembangkan industri yang bersifat terfokus (spesialisasi) pada jenis-jenis produk yang berpeluang memiliki daya saing. Sehingga, agar pengembangan kluster dapat optimal, diharuskan peran dari berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat dan swasta perlu mendorong adanya teknologi baru sebagai inovasi di dalam industri kecil menengah tersebut, agar proses produksi pun dapat meningkat baik secara kuantitas dan kualitas, dengan demikian jelaslah sudah bahwa perekonomian suatu daerah dapat mengalami peningkatan melalui cara mengembangkan kembali kluster-kluster industri kecil dan menengah.

BRAWIJAYA

Dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Madiun terhadap pengembangan kawasan agropolitan melalui kebijakan program dan anggaran kepada SKPD adalah dengan pembentukan model kluster setiap tahunnya, mulai *action* tahun:

- 1. Tahun 2007 kluster budidaya kakao: Kelompok Tani "Argo Mulyo": di Desa Padas Kecamatan Dagangan
- 2. Tahun 2008 kluster ternak sapi: Kelompok Tani "Mardi Mulyo": di Desa Banaran Kecamatan Geger
- 3. Tahun 2009 kluster budidaya ikan tawar: Kelompok Tani "Mina Makmur": di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo
- 4. Tahun 2010 kluster gula mangkok: Kelompok tani "Sumber Manis": di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari (*Masterplan agropolitan Kabupaten Madiun tahun 2005*).

Pembangunan pedesaan sebagai produsen hasil pertanian masih kurang optimal dibandingkan pembangunan perkotaan sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, telah mendorong aliran sumber daya dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan secara tidak seimbang. Kesenjangan sosial dan kehidupan masyarakat desa dan kota yang semakin melebar. Disisi lain terdapat masalah dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Madiun seperti pergeseran fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian, kepemilikan lahan pertanian yang relatif menyempit, minimnya infrastruktur pedesaan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pedesaan, semuanya merupakan refleksi perekonomian pedesaan di Kabupaten Madiun.

Kabupaten Madiun memerlukan strategi dalam membangkitkan pembangunan ekonomi yang mampu memberikan kehidupan lebih baik bagi mayoritas penduduk di pedesaan yang hidup di sektor pertanian melalui pengembangan kawasan agropolitan. Mensikapi berbagai tantangan dalam

pembangunan pertanian yang sejalan dengan upaya percepatan pembangunan pedesaan dan pengembangan ekonomi lokal, diperlukan komitmen yang kuat dan kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat maupun swasta. Untuk hal tersebut, pengembangan kawasan agropolitan merupakan salah satu pendekatan pembangunan pedesaan berbasis pertanian dalam artian luas (termasuk kegiatan agrowisata, minapolitan dan sebagainya), dengan menempatkan kota tani sebagai pusat kawasan dan ketersediaan sumberdayanya, sebagai modal tumbuh dan berkembangnya kegiatan saling melayani dan mendorong usaha agrobisnis antar desa-desa kawasan (hinterland) dan desa-desa sekitarnya. Sehingga terwujudnya sistem usaha agribisnis antara perkotaan dan pedesaan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui perkembangan agropolitan yang ada di Kabupaten Madiun dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah Kabupaten Madiun Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kluster (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kawasan Agropolitan GEDANGSARI Kabupaten Madiun)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada maka perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi infrastruktur, sumberdaya manusia, dan akses permodalan dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster di Kabupaten Madiun ?

- 2. Bagaimanakah proses dan pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster di Kabupaten Madiun?
- 3. Bagaimanakah strategi pemerintah Kabupaten Madiun dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kondisi infrastruktur, sumberdaya manusia, dan akses permodalan dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster di Kabupaten Madiun
- 2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses dan pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster di Kabupaten Madiun
- 3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemerintah Kabupaten Madiun dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster

D. Kontribusi Penelitian

Dari segi akademis maupun segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yaitu sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Penelitian ini diharapkan mampu melatih dan menerapkan teori-teori yang telah didapat dan meningkatkan kemampuan berfikir dalam penulisan karya ilmiah.

 Penelitian ini dapat dijadikan refrensi bagi peneliti lain sebagai bahan perbandingan selanjutnya, serta dapat dijadikan acuan bagi pihak yang melakukan penelitian.

b. Bagi Perguruan Tinggi

- Sebagai bahan informasi dalam rangka menambah wawasan tentang pengembanganan kawasan agropolitan sebagai potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pustaka untuk mengadakan penelitian lanjutan dan sebagai bahan informasi dalam rangka menambah wawasan tentang potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah.

2. Kontribusi Praktis

- a. Sebagai bahan masukan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Madiun dalam proses pengambilan keputusan ataupun kebijakan yang berkaitan dengan upaya pengembangan potensi ekonomi lokal agar mampu meningkatkan daya saing daerahnya melalui pengembanagn kawasan agropolitan.
- b. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Madiun dalam mengelola potensi ekonomi lokalnya agar mampu memperkuat daya saing daerahnya melalui pengembangan kawasan agropolitan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu

BRAWIJAYA

administrasi publik dan juga sebagai bahan pembanding atau lanjutan atas penelitian yang serupa.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan beberapa hal, diantaranya *pertama*, latar belakang mengemukakan permaslahan berkaitan dengan judul penelitian sehingga menarik untuk diteliti. *Kedua*, rumusan masalah yang merupakan kajian yang akan dibahan dalam penelitian. *Ketiga*, tujuan penelitian yang berisikan hal-hal yang hendak dicapai atau ditemukan nantinya. *Keempat*, adalah kontribusi penelitian baik secara akademis maupun secara paktis sebagai pernyataan manfaat dari hasil penelitian secara lebih spesifik. *Kelima*, sistematika pembahasan yang merupakan uraian singkat mengenai bab-bab dalam penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori. Teori yang adalah teori administrasi publik, perencanaan pembangunan, strategi, kawasan agropolitan, pengembangan kawasan agropolitan, dan kluster. Teori yang digunakan merupakan kutipan pendapat dari berbagai para ahli dari buku maupun jurnal yang relevan dengan kajian penelitian

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai langkah-langkah penelitian diawali dari : jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data serta analisis dan interpretasi data. Peneliti akan membahas tentang penyajian data yang diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang berdasar atas fokus peneliti setelah data-data didapatkan kemudian akan dilakukan analisis data dan iterpretasi data yang berkaitan dengan strategi pemerintah Kabupaten Madiun dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan yaitu temuan pokok penelitian sesuai dengan tujuan penelitian serta saran-saran yang terkait dengan hasil penelitian yang selanjutnya dapat digunakan sebagai rekomendasi pada penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Dalam kehidupan sehari-hari administrasi publik sangat penting, karena administrasi publik merupakan ilmu yang memperlajari tentang bagaimana pengelolaan organisasi publik. Menurut pendapat Keban (2004:6) Administrasi Publik yaitu:

"Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan memberikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik".

Menurut Sondang Siagian (2008:2) mendefinisikan sebagai administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan administrasi publik menurut Soempomo dalam (Thoha, 2008:44) adalah bagian dari keseluruhan lembaga-lembaga dan badan-badan pemerintah negara sebagian dari pemerintah eksekutif baik dipusat maupun di daerah yang tugas dan kegiatannya terutama melaksanakan kebijakan pemerintah. Pandangan ini lebih menekankan peran Negara yang sangat dominan dan terpusat dalam mengelola pemerintah dan mengabaikan masyarakat atau

BRAWIJAYA

publik untuk mengambil peran dalam mengelola pemerintah, mekipun dalam pelaksanaannya masyarakatlah yang menjadi tujuan utama.

Jadi dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa administrasi publik pada intinya merupakan pelaksanakan pembangunan dan mengurusi atau memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat dan pencapaian tujuan yang dilakukan lebih dari satu orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Peran Administrasi Publik

Administrasi publik memiliki peran penting bagi para pengambilan kebijakan dalam menetukan strategi pengelolaan pemerintahan maupun organisasi publik.

"Di dalam ilmu administrasi publik, Thoha (20011:104) memandang bahwa studi mengenai kebijaksanaan administrasi publik menjadi sangat popular, akan tetapi sebagai halnya barang baru bidang kajian ini sebagian besar masih deskriptif, dan masih sangat sulit membangunnya. Setapak demi setapak para peneliti memulai untuk menggeneralisasikan dan membangun teori tentang proses pengambilan kebijaksanaan pemerintah dengan menggunakan model-model yang dikembangkan dari bidang studi lainnya".

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Hebert A. Simon dalam (Thoha, 2011:105) bahwa studi tentang kebijakan adalah meminjam dari semua ilmu-ilmu sosial, dan analisis tentang kebijakan dipandang sebagai bidang studi yang bisa berintegrasi dengan ilmu-ilmu sosial.

Dalam menjalankan pengelolaan sumberdaya harus disertai dengan tanggung jawab publik dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sehingga perlu transparansi dalam mengelola sumber daya

BRAWIJAYA

pemerintah daerah. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan sumber daya adalah pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengerakan, dan pengawasan dalam pengelolaan sumberdaya agar memenuhi harapan pemerintah dan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa peran administrasi publik sangat diperlukan untuk pengelolaan sumberdaya yang bertujuan pada kesejahteraan sebagai salah satu bentuk pencerminan Negara demokrasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi, kebijakan-kebijakan, maupun program-program. Dalam proses pengelolaan atau pengembangan sumber daya, masyarakat adalah faktor terpenting karena tanpa keikutsertaan masyarakat tujuan pemerintahan tidak akan berjalan lancar.

B. Perencanaan Pembangunan

1. Definisi Perencanaan

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Perencanaan merupakan suatu proses yang tidak pernah berakhir. Perencanaan merupakan usaha sadar dalam pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang, tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan, di dalam dan oleh suatu organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Sa'id & Intan (2001:44) mendefinisikan, bahwa perencanaan merupakan suatu upaya penyusunan program baik program yang sifatnya

secara umum maupun yang spesifik, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Perencanaan pada dasarnya adalah penetapan alternatif, yaitu menetukan bidang dan langkah perencanaan yang akan di ambil dari berbagai kemungkinan bidang dan langkah yang ada. Bidang dan langkah yang diambil ini tentu saja dipandang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sumber daya yang tersedia dan mempunyai resiko yang sekecil-kecilnya. Oleh karena itu, dalam penentuannya timbul berbagai bentuk perencaaan yang merupakan alternatif-alternatif, ditinjau dari berbagai sudut, seperti yang di jelaskan oleh Khairuddin (1992:48), di antaranya:

- a. Dari segi jangka waktu, perencanaan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu (1) perencanaan jangka pendek (1 tahun), dan (2) yaitu perencanaan jangka panjang (lebih dari 1 tahun).
- b. Dari segi luas lingkupnya, perencanaan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu (1) perencanaan nasional (umumnya untuk mengejar keterbelakangan suatu bangsa dalam berbagai bidang), (2) perencanaan regional (untuk menggali potensi suatu wilayah dan mengembangkan kehidupan masyarakat wilayah itu), dan (3) perencanaan lokal, misalnya: perencanaan kota (untuk mengatur pertumbuhan kota, menertibkan penggunaantempat dan memperindah corak kota) dan perencanaan desa (untuk menggali potensi suatu desa serta mengembangkan masyarakat desa tersebut).
- c. Dari segi bidang kerja yang dicakup, dapat dikemukakan antara lain: industrialisasi, agrarian (pertanahan), pendidikan, kesehatan, pertanian, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya.
- d. Dari sedi tata jenjang organisasi dan tingkat kedudukan *manager*, perencanaan dibedakan menjadi 3, yaitu: (1) perencanaan haluan *policy planning*, (2) perencanaan program (program *planning*) dan (3) perencanaan langkah *operational planning*.

Jadi peneliti menyimpulkan bahwa perencanaan adalah proeses terpenting, karena tanpa adanya perencanaan fungsi-fungsi pengorganisasian, pengarahan, pengembangan, dan pengontrolan tidak dapat berjalan. Perencanaan merupakan proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.

2. Definisi Pembangunan

Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Bangsa Indonesia, seperti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mencantumkan tujuan pembangunan nasionalnya.

Menurut Siagian dalam Agus Suryono (2004:21) "pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dengan demikian, berdasarkan pendapat diatas pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar dan terencana dan tujuan dari pembangunan adalah suatu usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan Negara yang telah ditentukan".

Sedangkan menurut Tjiptoherijanto dan Manarung (2010:132) mengatakan bahwa pembangunan dapat dipandang suatu kebijakan publik yang multidimensi dan lintas generasi. Dapat dikatakan multidimensi karena pembangunan mencakup dimensi-dimensi ekonomi dan non ekonomi. Pembangunan memiliki karakteristik yang berbeda antara pembangunan yang dilakukan sekarang dan yang akan dilakukan dimasa mendatang.

Dari definisi-definisi oleh para ahli tersebut, bisa disimpulkan bahwa pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang dianggap lebih baik.

3. Definisi Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan memang suatu usaha refleksi dari peran pemerintah dalam mendorong gerak pembangunan ke arah tertentu. Tetapi perlu diingat bahwa proses atau usaha pembangunan yang berencana adalah proses usaha masyarakat yang luas. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan harus pula dilihat dalam konteks dinamika proses pembangunan dari suatu masyarakat bangsa serta perlu disusun dalam perencanaan strategis. Riggs (1996:114) mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu proses yang melibatkan pengerahan nasional dan percepatan melakukan perubahan sosial untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu, termasuk didalamnya adalah sejumlah keputusan dan usaha-usaha melaksanakannya.

Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan pada pembangunan nanti, agar pada proses pembangunan dapat terarah seperti apa yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga, agar tujuan dan cita-cita pemerintah dapat tercapai maka diperlukan suatu perencanan pembangunan yang jelas

dan terarah. Begitu pula dengan kawasan agropolitan di Kabupaten Madiun agar strategi pengembangan kawasan agropolitan dapat tercapai, maka diperlukan suatu strategi atau perencanaan pembangunan yang baik dan terarah. Hal ini bertujuan agar kawasan agropolitan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin.

4. Peran Pemerintah dalam Pembangunan

Keterlibatan birokrasi pemerintah dalam proses pembangunan seringkali diidentifikasikan dengan peranannya sebagai inovator, dinamisator dan stabilitator pembangunan atau secara singkat disebut sebagai *agent of development* (Hardjanto, 2008:14). Peran pemerintah sebagai unsur pendorong pembangunan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut, menurut Djamin (1974:24):

- a. Fungsi pengaturan: pemerintah berperan menentukan kebijakan pembangunan pemberian pengarahan dan bimbingan, pengaturan melalui perijinan dan pengawasan.
- b. Fungsi pemilikan: pemerintah memiliki sendiri usaha-usaha pembangunan ekonomi atau sosial yang penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri oleh swasta.
- c. Fungsi penyelenggaraan: pemerintah menyelenggarakan sendiri semua kegiatan ekonomi atau sosial.

Selain itu, pendapat lain menurut Irving Swerdlow, yang dikutip oleh Hardjanto (2008:14), menyebutkan peran pemerintah dalam pembangunan adalah:

- a. *Direct operation*: pemerintah menjalankan sendiri (operasi langsung) kegiatan-kegiatan pemabangunan.
- b. *Direct control*: pemerintah melakukan pengendalian langsung terhadap usaha-usaha pembangunan lewat perizinan, lisensi, penjatahan, dan penetapan harga dan sebagainya.

c. *Direct influence*: pemerintah hanya memberikan pengaruh langsung dengan cara memberikan persuasi nasehat dalam usaha-usaha pembangunan.

Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pembangunan sangat penting dikarenakan peran pemerintah dalam pembangunan merupakan kunci menuju masyarakat yang lebih baik. Peran pemerintah juga harus aktif dan positif karena pemerintah harus mempunyai sarana utama bagi rakyatnya terutama yang berkenaan dengan upaya meningkatkan tingkat taraf hidup atau tingkat kemakmuran rakyatnya.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berada di wilayah kabupaten dan kota memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan teknis perencanaan pembangunan daerah. Bappeda Kabupaten/Kota merupakan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi :

- 1. Menyusun Program Perencanaan Daerah (Properda)
- 2. Menyusun Program-program Tahunan Daerah (Propetada) sebagai pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dalam pasal ini yang dibiayai oleh Daerah atau Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK)
- 3. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan lainnya yang berada di wilayah daerah tersebut.
- 4. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Tim anggaran.
- 5. Pelaksanaan koordinasi dan penelitian terhadap usulan perencanaan pembangunan yang diajukan dinas-dinas/instansi yang ada di wilayah daerah.

- 6. Penyusunan persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah (Rakorbang)
- 7. Pelaksanaan monitoring, menganalisa dan mengevaluasi, mendokumentasikan serta mevisualisasikan hasil pelaksanaan pembangunan serta berbagai potensi di daerah.
- 8. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang perencanaan. Riyadi. (2003:41)

Dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan, tentunya banyak melibatkan barbagi pihak baik instansi pemerintahan, swasta maupun masyarakat instansi pemerintah disini adalah Bappeda. Bappeda disini berperan sebagai koordinator dalam penyusunan dan perencanaan pembangunan begitu juga dalam pelaksanaannya hingga tahap evaluasi di tingkat daerah baik Kabupaten maupun Kota.

Untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat dalam pembangunan maka dipakailah sistem perencanaan dari bawah keatas (bottom up planning) yang merupakan satu sistem dimana dalam penyusunan perencanaan pembangunan saat ini telah berbeda dengan masa sebelum pelaksanaan UU No. 23/2004 yang mana cenderung menggunakan sistem perencanaan pembangunan top down planning dan buttom up planning dalam pembiayaan akan maupun teknisnya sehingga seluruh pelaksanaan pembangunan di daerah diatur oleh pusat. Dalam rapat koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang diusulkan pada tingkat yang lebih tinggi dimulai dengan :

a. Musyawarah Pembangunan (Musbang)

Musyawarah ini dilakukan pada tingkat desa/kelurahan dan biasanya dilakukan pada bulan Maret-April. Pada Musbang ini dibicarakan

masalah inventarisasi potensi pembangunan Desa/Kelurahan, permasalahan sekaligus saran pemecahan termasuk penyusunan usulan rencana program dan proyek pembangunan baik dibiayai oleh subsidi Desa.

b. Temu Karya Pembangunan

Pertemuan ini dilakukan pada bulan April-Mei diskusi ini menyangkut tentang tujuan untuk membahas kembali rencana program/proyek pembangunan hasil diskusi pembangunan tingkat Desa/Kelurahan guna memperoleh keterpaduan program dan proyek pada tingkat Kecamatan. Forum ini dapat menghasilkan perumusan :

- Usul rencana program/proyek yang akan dibiayai oleh swadaya masyarakat/bersangkutan maupun inpres subsidi desa.
- 2. Usul rencana program/proyek yang sudah selesai akan dibiayai oleh APBD Pemerintah kabupaten/Pemerintah kota, bantuan inpres, DAU, dana khusus dari pusat kemudian diteruskan kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dibahas dalam forum konsultasi intern Bappeda.

c. Konsultasi Nasional Pembangunan

Rapat koordinasi ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memantapkan lagi hasil-hasil yang tercapai dalam forum konsultasi intern dan regional Bappeda Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi Bappeda memiliki peranan yang sangat dalam proses

tercapainya pembangunan yang sukses sehingga berjalan dengan efektif.

Pembiayaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh wilayah masing-masing yang didanai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagian lagi berasal dari dan bantuan pusat yaitu Dana Alikasi Umum (DAU). Untuk mendapatkan informasi mengenai proyek-proyek yang menjadi keinginan masyarakat serta meningkatkan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah maka perlu ditempuh suatu cara yang bertahap melalui pertemuan-pertemuan rapat, pertemuan serta rapat tersebut bisa dimulai dari tingkat bawah dahulu yaitu : tingkat Desa untuk kemudian bisa diteruskan pada tingkat yang lebih tinggi Kelurahan sampai Nasional.

- 1. Informasi untuk perencanaan (statistik, penelitian, dll)
- 2. Identifikasi masalah pembangunan
- 3. Analisa dan pembentukan kebijaksanaan
- 4. Rencana makro
- 5. Perkiraan sumber- sumber pembangunan
- 6. Perencanaan ektoral
- 7. Perencanaan regional



- 1. Perencanaan dan penganggaran
- 2. Aktifitas rencana program pelaksanaan
- 3. Manajemen pelaksanaan
- 4. Kebijaksanaan
- 5. Komunikasi dukungan pembangunan
- 1. Pengendalian dalam Pelaksanaan pembangunan
- 2. Pengawasan
- 3. Tinjauan Pelaksanaan dan evaluasi
- 4. Perkembangan jangka panjang

Gambar 1: Proses dan Pelaksanaan Pembangunan

Sumber : *Mubyarto* (2003:98)

Perencanaan pembangunan merupakan suatu bentuk alat pengalokasian berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap perencanaan pembangunan memerlukan informasi yang tepat. Informasi-informasi ini pada awalnya adalah data mentah yang kemudian diolah untuk disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan. Namun hal tersebut belum menjadi bagian dari pengambilan keputusan karena data mentah yang diolah menjadi informasi masih membutuhkan mekanisme yang terwakili dalam suatu model, yaitu model pengambilan keputusan dalam sistem informasi.

C. Teori Strategi

1. Pengertian Strategi

Berbagai cara yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi karena adanya faktor yaitu faktor eksternal dan internal, maka organisasi perlu menggunakan cara-cara yang tepat untuk mengantisipasinya agar tujuan organisasi tercapai. Cara yang digunakan oleh organisasi dapat disebut sebagai strategi. Konsep strategi pada umumnya selalu dikaitkan dengan perang karena peranglah yang seringkali menggunakan term atau istilah strategi dalam rangka menggunakan peperangan (the war) atau pertempuran (the battle). Istilah strategi pada mulanya bersumber dari kalangan militer dan secara popular sering dinyatakan sebagai kiat jenderal untuk memenangkan peperangan. Strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berarti sebuah cara

atau siasat perang untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan (Daryanto, 1997:560). Dewasa ini istilah strategi pun mulai berkembang sebagai sebuah pengorganisasian secara melembaga dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuannya sebab dalam arti sesungguhnya manajemen puncak memang terlibat dalam satu bentuk peperangan (Siagian, 2002:15).

Peranan srategi dalam mencapai tujuan organisasi sangat penting. Strategi yang baik akan menambah kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Mengintip pendapat beberapa ahli, bahwa strategi dapat didefinisikan dalam beberapa pengertian (Salusu, 2002:99-100):

a. Shirley

Menungkapkan bahwa strategi merupakan peluang ekstern, kendalakendala ekstern, kapabilitas intern dan nilai-nilai perorangan dari pejabat teras.

b. Hax dan Majluf

Strategi merupakan suatu pola keputusan yang konsisten menyatu dan integral dimana mampu menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak dan alokasi sumber daya.

Telah banyak definisi mengenai strategi oleh beberapa ahli yang intinya bahwa strategi merupakan suatu alat yang digunakan untuk pencapaian tujuan. Strategi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu

yang dianggap penting, dimana tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar. Strategi mencerminkan bagaimana organisasi atau pemerintah dapat mencapai tujuan dan mengukur keberhasilan tujuan yang dicapai agara proses perbaikan di dalamnya tetap berkelanjutan sebagai respon dari cepatnya perubahan lingkungan.

Dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan cara untuk bertindak yang dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Strategi merupakan suatu kerangka kerja fundamental dari sebuah organisasi dimana strategi dapat memberikan arahan dan tujuan bagi organisasi dan berupaya untuk beradaptasi terhadap tuntutan perubahan lingkungan berdasarkan pertimbangan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi atau pemerintah melalui hubungan efektif dengan lingkungan. Strategi sebagai proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, dalam strategi ini disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Strategi bukan hanya dilakukan untuk kepala atau atasan saja melainkan strategi dilaksanakan oleh setiap orang pada setiap tingkat, bukan hanya oleh pejabat tinggi, karena strategi tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama.

BRAWIJAYA

2. Pengertian Perencanaan Strategis

Strategi merupakan alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan. Maka dari itu sebelum membuat rencana strategis, maka diperlukan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan strategis disebut juga perencanaan jangka panjang, perencanaan strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu organisasi. Dalam perencanaan tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, dan meyusun program atau kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi

Menurut LAN Modul 1 (2007:6) rencana startegis merupakan suatu alat manajemen yang bertujuan membantu organisasi membuat rencana masa depan. Rencana strategi dapat dilihat sebagai formulasi secara menyeluruh yang menjelaskan bagaimana usaha-usaha dilakukan untuk mencapai tujuan melalui penerapan strategi-strategi yang dipilih.

Dapat disimpulkan bawah rencana strategis adalah rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil. Sedangkan Perencanaa strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka panjang selama beberapa tahun kedepan. Hasil dari proses perencanaan strategi berupa dokumen yang dinamakan *strategic plan* yang berisi informasi tentang program-program beberapa tahun yang akan datang.

3. Syarat – Syarat Strategi

Orientasi strategi adalah bertumpu padan implikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Agar penyusunan strategi dapat berjalan sengat tepat sasaran dan dapat diimplementasikan secara efektif, Siagian (2002:102-103) mejelaskan ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun strategi, yaitu :

- a. Strategi yang dirumuskan harus mampu di satu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang diperkirakan akan timbul dan di pihak lain memperkecil dampak berbagai faktor yang sifatnya negatif atau bahkan berupa ancaman bagi organisasi dan kelangsungannya.
- b. Strategi harus memperhitungkan secara realistis kemampuan suatu organisasi dalam menyediakan berbagai daya, sarana, prasarana, dan dana yang diperlukan untuk mengoperasionalkan strategi tersebut.
- c. Strategi yang telah ditentukan dioperasionalkan secara teliti. Tolok ukur tepat tidaknya suatu strategi bukan terlihat pada proses perumusan saja, akan tetapi juga mencakup pada operasional atau pelaksanaanya.

Jadi agar strategi berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, strategi harus bisa melihat kenyataan yang ada dan teliti dalam menjalankan strategi agar terhindar dari hambatan-hambatan dalam menjalankan suatu misi pemerintah dan tercipta strategi yang optimal. Pada penyusunan strategi pada sebuah organisasi harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan agar strategi bisa berjalan optimal dan dapat menunjang keberlangsungan hidup organisasi.

4. Komponen Penetapan Strategi

Menurut Salusu (2002:23) komponen yang harus dikenali dan diperhatikan dalam menetapkan strategi adalah sebagai berikut:

a. Tipe dan struktur organisasi

Setiap organisasi memiliki kepribadian yang khas. Tipe dan struktur yang dipilih untuk digunakan harus dikaitkan dengan kepribadian yang dimaksud. Secara tradisional, tipe dan struktur yang paling banyak digunakan adalah tipe yang hierarki atau pyramid. Tipe demikian cocok untuk organisasi besar, kompleks dan kultur organisasi membenarkan berlakunya jarak kekuasaan dan oleh karena itu memerlukan berbagai lapisan kewenangan.

b. Gaya Manajerial

Para teoretisi dan praktisi yang mendalami teori kepemimpinan dan gaya manajerial dalam mengelola organisasi yang besar dan kompleks menekan beberapa hal. Pertama; kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang situasional. Kedua; gaya manajerial yang tepat ditentukan oleh tingkat kedewasaan atau kematangan para anggota organisasi (pengetahuan, pendidikan, mental, intelektual maupun secara emosional). Ketiga; peranan manjerial apa yang diharapkan dalam organisasi (simbol organisasi atau pemrakarsa visi kedepan bagi organisasi tersebut).

c. Kompleksitas lingkungan

Merupakan kenyataan pula bahwa setiap organisasi menghadapi kondisi lingkungan yang berbeda-beda dimana cenderung bersifat dinamis. Gerakan yang sangat dinamis tersebut tentunya berpengaruh terhadap cara kelola organisasi, termasuk dalam merumuskan dan menetapkan strategi.

d. Hakikat berbagai masalah yang dihadapi

Jika dikatakan bahwa strategi merupakan keputusan dasar yang diambil oleh manajemen puncak, salah satu implikasi pernyataan tersebut ialah bahwa manajemen puncak harus merupakan orang-orang yang cekatan memecahkan masalah, terlepas apakah masalah itu rumit dan mempunyai dampak kuat untuk jangka panjanga atau realatif sederhana dan dengan dampak yang tidak kuat dan hanya bersifat jangka pendek atau sedang. Yang jelas ialah bahwa pendekatan dan teknik yang digunakan untuk memecahkan masalah harus berhasil mencabut akar permasalahan dan tidak sekedar mengobati gejala-gejalanya saja. Tentunya diperlukan kemampuan melakukan analisis informasi sehingga analisis yang dilakukan tampak berbagai alternatif yang mungkin ditempuh. Guna pelaksanaannya berjalan sukses tentunya dibutuhkan dukungan berbagai pihak yang bekerja di dalamnya.

5. Manfaat Strategi

Strategi ditetapkan oleh suatu organisasi pemerintah dan non pemerintah sebagai kelanjutan dari perencanaan kegiatan yang dilakukan. Penentuan strategi ini tentunya tidak terlepas dari rantai kegiatan yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Strategi pada umumnya merupakan perhitungan mengenai rangkaian kebijaksaaan secara ilmiah. Secara implisit Sondang (2002:206-209) mengungkapkan manfaat dari penetapan strategi pada organisasi antara lain:

- 1. Memperjelas makna dan hakikat suatu perencanaan melalui identifikasi rincian yang lebih spesifik tentang bagaimana organisasi harus mengelola bidang-bidang yang ada di masa mendatang
- 2. Merupakan langkah-langkah atau cara yang implementasinya kegiatan dalam rangka penetapan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan
- 3. Sebagai penuntun atau rambu-rambu dan arahan pelaksanaan kegiatan di berbagai bidang
- 4. Dapat mengetahui secara konkret dan jelas tentang berbagai cara untuk mencapai sasaran atau tujuan serta prioritas pembangunan pada bidang tersebut berdasarkan kemampuan yang dimiliki
- 5. Sebagai rangkaian dari proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan
- 6. Mempermudah koordinasi bagi semua pihak agar mempunyai partisipasi dan persepsi yang sama tentang bentuk serta sifat interaksi, interdependensi dan interrelasi yang harus tetap tumbuh dan terpelihara dalam mengelola jalannya roda organiasai, sehingga akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kemungkinan timbulnya konflik antara berbagai pihak yang terkait. Dengan demikian strategi dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan strategi yang tepat, nantinya diharapkan akan membantu suatu organisasi atau kelompok atau pemerintah dengan masyarakat untuk lebih sistematis, logis dan rasional dalam pencapaian tujuannya. Karena aktivitas formulasi strategi akan mempertinggi kemampuan organisasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan lebih peka terhadap ancaman yang datang dari luar organisasi.

D. Kawasan Agropolitan

1. Pengertian kawasan agropolitan

Agropolitan terdiri dari dua kata yaitu agro dan politan (polis). Agro berarti pertanian dan politan berarti kota, kata agro merupakan kota dalam bahasa latin yang bermakna tanah yang dikeolala atau budidaya tanaman yang kemudian digunakan untuk menunjuk berbagai aktivitas berbasis pertanian. Pengertian politan dalam kata agropolis atau agrometropolis, adalah lokasi pusat pelayanan sistem kawasan sentra atau aktivitas ekonomi berbasis pertanian (Suwandi, 2005:9).

Soemarno (2008:4) berpendapat bahwa agropolitan merupakan suatu pendekatan pembangunan melalui gerakan masyarakat dalam membangun ekonomi berbasis pertanian (agribisnis) secara terpadu dan berkelanjutan pada kawasan terpilih melalui pengembangan infrastruktur pedesaan yang mampu melayani, mendorong, dan memacu pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya.

Kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) merupakan kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada disekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintahan,

tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi kawasan yang ada. Soemarno (2008:4).

Pengelolaan ruang dimaknakan sebagai kegiatan pengaturan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, penertiban dan peninjauan kembali atas pemanfaatan ruang kawasan sentra produksi pangan (agropolitan). Kawasan pedesaan harus dikembangkan sebagai satu kesatuan pengembangan wilayah berdasarkan keterkaitan ekonomi antara desa-kota (urban-rural linkages), dan menyeluruh hubungan yang bersifat interpendensi/timbal balik yang dinamis.

2. Ciri-ciri Kawasan Agropolitan

Suatu kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) yang sudah berkembang menurut Soemarno (2008:4-6) harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1. Sebagian besar kegiatan masyarakat di kawasan tersebut di dominasi oleh kegiatan pertanian dan atau agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan terintegrasi mulai dari :
 - a. Subsistem agribisnis hulu (*up stream agribusiness*) yang mencakup: mesin, peralatan pertanian pupuk.
 - b. Subsistem usaha tani/pertanian primer (*on farm agribusiness*) yang mencakup usaha: tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan.
 - c. Subsistem agribisnis hilir (*down stream agribusiness*) yang meliputi: industri-industri pengolahan dan pemasarannya, termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor.
 - d. Subsistem jasa-jasa penunjang (kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis) seperti: perkreditan, asuransi, transortasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan, penyuluhan, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.
- 2. Adanya keterkaitan antar kota dengan desa (*urban-rural lingkages*) yang bersifat interpedensi/timbale balik dan saling membutuhkan, dimana kawasan pertanian di perdesaan mengembangkan usaha budi daya (*on farm*) dan produk olahan skala rumah tangga (*off fram*), sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha

- budi daya dan agribisnis seperti penyediaan sarana pertanian antara lain: modal, teknologi, informasi, peralatan pertanian dan lain sebagainya.
- 3. Kegiatan sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan pertanian atau agribisnis, termasuk didalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian (termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor), perdagangan agribisnis hulu (sarana pertanian dan permodalan), agrowisata dan jasa pelayanan.
- 4. Kehidupan masyarakat di kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) sama dengan suasan kehidupan di perkotaan, karena prasarana dan infrastruktur yang ada dikawasan agropolitan diusahakan tidak jauh berbeda dengan kota.

3. Persyaratan Kawasan Agropolitan

Suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi suatu kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) menurut Soemarno (2008:6) harus dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian khususnya pangan, yang dapat dipasarkan atau telah mempunyai pasar (selanjutnya disebut komoditi unggulan)
- 2) Memiliki prasarana dam infrastruktur yang memadai mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis khususnya pangan, seperti misalnya: jalan, sarana irigasi/pengairan, sumber airbaku, pasar, terminal, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, pusat informasi pengembangan agribisnis, sarana produksi pengolahan hasil pertanian, dan fasilitas umum serta fasilitas sosial lainnya.
- 3) Memiliki sumber daya manusia yang mau dan berpotensi untuk mengembangkan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).
- Konservasi alam dan kelestarian lingkungan hidup bagi kelestarian sumberdaya alam, kelestarian sosial budaya maupun ekosistem secara keseluruhan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan kawasan agropolitan harus memenuhi persyaratan yaitu lahan yang memadahi, infrastruktur yang mendukung, sumberdaya manusia yang berkompeten, dan dalam pengembangan kawasan agropolitan harus tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar.

4. Sistem Kawasan, Cakupan Wilayah dan Tipologi Kawasan Agropolitan

Kawasan Sentra produksi pangan (agropolitan) menurut Soemarno (2008:7) terdiri atas :

- 1) Kawasan lahan pertanian (hinterland)
 Berupa kawasan pengolahan dan kegiatan pertanian yang mencakup kegiatan pembenihan, budidaya dan pengolahan pertanian. Penentuan hinterland berupa kecamatan/desa didasarkan atas jarak capai/radius keterkaitan dan ketergantungan kecamatan/desa tersebut pada kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) di bidang ekonomi dan pelayanan lainnya.
- 2) Kawasan permukiman Merupakan kawasan tempat bermukimnya para petani dan penduduk kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).
- 3) Kawasan pengolahan dan industri Merupakan kawasan tempat penyeleksian dan pengolahan hasil pertanian sebelum dipasarkan dan dikirim ke terminal agribisnis atau pasar, atau diperdagangkan. Kawasan ini bisa berdiri pergudangan dan industri yang mengolah langsung hasil pertanian menjadi produk jadi.
- 4) Kawasan pusat prasarana dan pelayanan umum Yang terdiri dari pasar, kawasan perdagangan, lembaga keungan, terminal agribisnis dan pusat pelayanan umum lainnya.
- Keterkaitan antara kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) dengan kawasan lainnya.
 Misalnya: kawasan permukiman, kawasan industri, dan kawasan konservsi alam.

Suatu wilayah atau kawasan senta produksi pangan (agropolitan), bisa dipetakan berdasarkan potensi sektor unggulan usaha pertanian dari wilayah tersebut. Cakupan wilayah kawasan sentra produksi pangan (agropolitan), menurut Soemarno (2008:7), terbagi atas tipologi pertanian, yaitu:

- 1) Sektor usaha pertanian tanaman pangan
- 2) Sektor usaha pertanian holtikultura
- 3) Sektor usaha perkebunan

BRAWIJAYA

- 4) Sektor usaha peternakan
- 5) Sektor usaha perikanan darat
- 6) Sektor usahaperikanan laut
- 7) Sektor usaha agrowisata
- 8) Kawasan hutan wisata konservasi alam

Kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) memiliki tipologi kawasan sesuai klasifikasi sektor usaha pertanian dan agribisnisnya masing – masing, tipologi tesebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 Tipologi Kawasan Agropolitan

No.	Sektor Usaha Pertanian	Tipologi Kawasan	Persyaratan Agropolitan
1.	Tanaman Pangan	Dataran rendah dan dataran tinggi,	Harus sesuai dengan jenis komoditi yang
	3	dengan tekstur lahan yang datar, memiliki sarana	dikembangkan seperti ketinggian lahan, jenis tanah, testur lahan, iklim,
		pengairan (irigasi) yang memadai.	dan tingkat keasaman tanah.
2.	Hortikultura	Dataran rendah dan dataran tinggi, dengan tekstur	Harus sesuai dengan jenis komoditi yang dikembangkan seperti
	Ċ	lahan datar dan berbukit, dan tersedia air yang memadai.	ketinggian lahan, jenis tanah, testur lahan, iklim, dan tingkat keasaman tanah.
3.	Perkebunan	Dataran tinggi dengan tekstur lahan berbukit, dekat dengan kawasan konservasi alam	Harus sesuai dengan jenis komoditi yang dikembangkan seperti ketinggian lahan, jenis tanah, testur lahan, iklim, dan tingkat keasaman tanah.
4.	Peternakan	Dekat dengan kawasan pertanian dan perkebunan, dengan sitem sanitasi yang memadai.	Lokasi tidak boleh berada dipermukiman dan memperhatikan aspek adaptasi lingkungan.

Memperhatikan aspek

UA		kolam perikanan	keseimbanganekologi dan
	WALL	darat, tambak,	tidak merusak ekosistem
		danau alam dan	lingkungan yang ada.
	VIII. THE TAXY	danau buatan,	
		daerah aliran sungai	HAIVEHERD
13)		baik dakam bentuk	VIIINIVITUE!
KG		keramba maupun	
		tangkapan alam.	
6.	Agrowisata	Pengembangan	Harus sesuai dengan jenis
17-3		usaha pertanian dan	komoditi yang
		perkebunan yang	dikembangkan seperti
	05	disamping tetap	ketinggian lahan, jenis
		berproduksi	tanah, testur lahan, iklim,
		dikembangkan	dan tingkat keasaman
		menjadi kawasan	tanah.
		wisata alam tanpa	
		meninggalkan	9
		fungsi utamanya	\sim
	3	sebagai lahan	
		pertanian produktif.	分
7.	Hutan wisata	Kawasan hutan	Sesuai dengan karakteristik
	konservasi alam	lindung dikawasan	lingkungan alam wilayah
		tanah milik Negara,	konservasi hutan setempat.
		kawasan in	
	Y	biasanya berbatasan	
		langsung dengan	T I
	a	kawasan lahan	21
	L,	pertanian dan	22
		perkebunan dengan	
		tanda batas wilayah	
		yang jelas.	
Sumbe			

Perikanan darat Terletak pada

Dapat disimpulkan dengan melihat tabel di atas bahwa setiap pembagian sektor usaha pertanian, tipologi kawasan dan persyaratan agropolitan pun juga berbeda karena setiap wilayah berbeda-beda tekstur tanah dan iklim nya jadi dalam penempatan sektor usaha pertanian harus benar-benar disesuaikan.

E. Pengembangan Kawasan Agropolitan

1. Pengertian Pengembangan Kawasan Agropolitan

Pengembangan kawasan merupakan suatu usaha yang sangat kompleks yang menyangkut organisasi, manajemen, sosial, keuangan, budaya, pemasaran, dan lain-lain. Berdasarkan issue dan permasalahan pembangunan perdesaan yang terjadi, pengembangan kawasan agropolitan merupakan alternatif solusi untuk pengembangan wilayah (pedesaan). Menurut Soemarno (2008:1) Pengembangan kawasan agropolitan merupakan upaya untuk mempercepat pembangunan daerah berbasis keunggulan pertanian. Tujuan utamanya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan agropolitan dan sekitarnya.

Konsep pengembangan agropolitan mengacu pada tulisan MC. Douglass dan Friedmann (1974) yaitu sebagai strategi untuk mengembangkan pedesaan. Pengembangan konsep ini pada dasarnya berupaya untuk mengembangkan pelayanan perkotaan di kawasan pedesaan, atau dengan kata lain di istilahkan sebagai kota ladang. Dengan konsep agropolitan, maka petani tidak perlu harus pergi ke kota untuk mendapatkan pelayanan, baik pelayanan yang berhubungan dengan produksi, pemasaran, ataupun kebutuhan sosial budaya dan kebutuhan harian.

Dapat disimpulkan bahwa pengembangan kawasan agropolitan merupakan bagian dari potensi kewilayahan kabupaten dimana kawasan agropolitan itu berada. Pengembangan kawasan agropolitan yang

merupakan penguatan sentra-sentra produksi pertanian/perikanan yang berbasiskan kekuatan internal, akan mampu berperan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai daya kompetensi inter dan intra regional. Pengembangan kawasan agropolitan merupakan pembangunan ekonomi berbasis pertanian di kawasan agribisnis, yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kenyataan, berkelanjutan dan terdesentralisasi yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah.

2. Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan

Terdapat 4 (empat) strategi/upaya pokok menurut Muliaanggun (2002) sebagai kunci keberhasilan dalam membangun agropolitan, yaitu :

- 1. Sumber daya manusia unggul;
- 2. Terbangunnnya sistem dan usaha agribisnis yang kuat;
- 3. Berkembangnya investasi dan permodalan agribisnis; dan
- 4. Terbangunnya sarana dan prasarana yang memadai dan mendukung kegiatan agribisnis.

Oleh karena itu pengembangan kawasan agropolitan haruslah mampu melihat kedepan dan melakukan pembangunan berkelanjutan melalui :

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan SDM pertanian dapat ditempuh melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan pertanian, pengembangan kawasan agropolitan, dan lain sebagainya. Pengembangan SDM di kawasan agropolitan menjadi tanggung jawab bersama, antar pemerintah, swasta, dan masyarakat.

b. Pengembangan Agribisnis

Strategi pengembangan agribisnis yang utuh dan bertahap di setiap daerah memerlukan pendekatan berbeda untuk setiap kawasan agropolitan. Para pelaku agribisnis dan petani di kawasan agropolitan harus mampu menganalisis keuntungan usaha taninya dengan mengembangkan modal usaha tani terpadu dan berkelanjutan, pengolahan produk pertanian yang mampu memiliki nilai tambah dan daya saing, dan lain-lain.

c. Pengembangan investasi dan Permodalan

Strategi ini dapat diterapkan dengan bantuan modal dan kredit yang dilakukan dengan prinsip mendidik terstruktur, dan sistematis. Bantuan langsung dalam bentuk bergulir atau cuma- cuma dalam bentuk uang atau modal kerja yang diberikan haruslah berdasarkan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat kawasan agropolitan dan mengarah kepada masyarakat. Untuk itu, sebelumnya harus dilakukan identifikasi dan analisis kebutuhan masyarakat kawasan. Kredit ini hendaknya tidak dibatasi untuk usaha budidaya saja, tetapi bisa digunakan untuk segala macam usaha baik *on farm* maupun *off fram*.

d. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pengembangan sarana dan prasarana yang perlu dikembangkan harus berwawasan lingkungan, dengan demikian perlu memperhatikan aspek kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik

tingkat propinsi maupun kabupaten. Sarana dan prasarana yang dikembangkan perlu diarahkan untuk menunjang :

- a. Peningkatan produktivitas pertanian (on farm)
- b. Pengolahan hasil, sebagai uapaya untuk mendapatkan nilai tambah atas produk hasil pertanian (off farm)
- c. Pemasaran hasil, sebagai uapaya menunjang pemasaran hasil yang dapat memperpendek mata rantai tata niaga hasil pertanian.

3. Sasaran Pengembangan Kawasan Agropolitan

Sasaran pengembangan kawasan agropolitan adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan masyarakat pelaku agribisnis;
- b. Pengembangan komoditas unggulan pertanian;
- c. Pengembangan kelembagaan petani dan penyedia jasa pertanian;
- d. Pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha tani dan investasi;
- e. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang.

Dengan adanya sasaran pengembangan akan lebih terarah mana yang harus dikembangkan dan bagian-bagian yang mendukung pengembangan itu sendiri dan agar proses pengembangan kawasan agropolitan berjalan sesuai rencana dan harapan.

4. Komponen Penting dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan

Pengembangan kawasan agropolitan memerlukan komponen penting yang menjadi prinsip dasar dan harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat, yaitu pengembangan daru unsur-unsur essensial yaitu SDM dan kelembagaan yang berperan dan berada di kawasan agropolitan, serta adanya *masterplan* kawasan rencana program tahunannya. Menurut Suwandi (2005:28), ada 4 (empat) unsur kelompok

sasaran (*stakeholders*) yang berperan dalam pengembangan kawasan agropolitan, yaitu:

- 1) Unsur Mayarakat (terutama petani)
- 2) Unsur Birokrat
- 3) Unsur Pengusaha
- 4) Unsur Pendukung, yang terdiri dari:
 - a. Para cerdik pandai, pemuka masyarakat
 - b. Pemuka adat, pemuka agama
 - c. Universitas, pesantren
 - d. LSM, perorangan dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang peduli terhadap uapaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan

Ada empat prinsip pemberdayaan yang harus diterapkan dalam mengembangkan kawasan agropolitan,menurut Suwandi (2005:29-30) yaitu:

- 1. Prinsip kerakyatan
 Pembangunan diutamakan bagi kesejahteraan rakyat banyak, bukan kesejahteraan perorangan atau kelompok.
- 2. Prinsip swadaya
 Bimbingan dan dukungan kemudahan (fasilitas) yang diberikan
 haruslah mampu menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian,
 bukan menumbuhkan ketergantungan.
- 3. Prinsip Kemitraan Memperlakukan pelaku agribisnis sebagai mitra kerja pembangunan yang berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan mereka dalam seluruh proses pengambilan keputusan akan menjadikan mereka sebagai pelaku dan mitra kerja yang aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- 4. Prinsip Bertahap dan Berkelanjutan Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakat setempat serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

5. Infrastruktur, sumber daya manusia dan akses permodalan dalam pengembangan kawasan agropilitan

Menurut Grigg (dalam Kodoatie, 2003:9), infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Dengan demikian dapat diartikan, bahwa pengertian infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial.

Menurut Suryanto (2009), Infrastruktur merupakan suatu rangkaian yang terdiri dari beberapa bangunan fisik yang masing-masing saling mengkait dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Misalnya jaringan jalan, dimana jalan adalah merupakan sarana yang salah satu fungsinya dapat dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa sektor lainnya seperti permukiman, perdagangan, kawasan industri, wilayah pusat pemerintahan dan lain sebagainnya. Sehingga setiap kali terjadu pembangunan infrastruktur seyogyanya diperlukan koordinasi secara mendalam dan antisipatif antar institusi terkait agar kemanfaatannya dapat berfungsi secara maksimal dan berdayagunatinggi serta nyaman bagi masyarakat pengguna.

Pengertian infrastruktur berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378 Tahun 1987 tentang Standar Kontruksi Bangunan Indonesia, Lampiran 22, adalah: "prasarana lingkungan adalah jalan, saluran air minum, saluran air limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan listrik".

Pengertian infrastruktur menurut Kelompok Bidang Keahlian Manajemen Rekayasa Kontruksi ITB Tahun 2001 dalam Surdia (2008) yaitu infrastruktur (prasarana) adalah bangunan atau fasilitas fisik yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi suatu masyarakat atau suatu komunitas.

Dari beberapa pengertian mengenai infrastruktur di atas peneliti menyimpulkan bahwa insfrastruktur di merupakan sistem fisik yang menyediakan fasilitas publik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam lingkup sosial dan ekonomi dalam rangka untuk tercapainya sebuah pembangunan publik, tanpa adanya infrastruktur yang memadai pembangunan tidak akan berjalan dengan baik.

1. Jenis-jenis Infrastruktur

Adapun jenis infrastruktur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Pasal 5 mencakup:

- a) Infrastruktur transportasi;
- b) Infrastruktur jalan;
- c) Infrastruktur pengairan;
- d) Infrastruktur air minum dan sanitasi;
- e) Infrastruktur telematika;
- f) Infrastruktur ketenagalistrikan dan;
- g) Infrastruktur pengangkut minyak dan gas bumi.

Konsep pengembangan sumber daya manusia, selama ini terdapat perbedaan dan ketidaksamaan pengertian pengembangan sumber daya manusia diantara para pakar. Ketidaksamaan pengertian ini muncul sebagai akibat setiap negara mempunyai pengertian yang disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan masing-masing negara. Secara teoritis kita kenal empat perspektif tentang peran pembangunan sumber daya manusia dalam pembangunan (Moeljarto, 2002):

- 1. Perspektif Functionalist, salah seorang pelopor fungsionalis yakni Durkheim, berpendapat bahwa pendidikan sebagai komponen utama pembangunan sumber daya manusia harus berfungsi sebagai wacana untuk mewariskan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat yang dapat memperkuat homogenitas dengan mewajibkan konformitas sikap, perilaku, dan keterampilan. Menurut perspektif ini, kualitas manusia "diprogram" melalui pendidikan.
- 2. Perspektif Liberal, bagi kaum liberal seperti John Dewey, pembangunan sumber daya manusia lebih dari sekedar mendorong konformitas individu dengan tata nilai yang ada, akan tetapi harus mendorong individu untuk mengembangkan potensinya sebagai manusia melalui pengembangan talenta fisik, emosi, spirit dan intelektualnya.
- 3. Perspektif Sosial-Demokratis, perspektif ini melihat peranan pembangunan sumber daya manusia dalam mewujudkan persamaan dan keadilan sosial. Karenanya, *apabila* pendidikan gagal dalam mewujudkan *equality of opportunity*, maka hal itu akan berarti kegagalan dalam mengembangkan potensi individu.
- 4. Perspektif Marxist, sebagaimana diduga, perspektif ini sangat berbeda dengan perspektif lainnya. Mereka melihat di dalam masyarakat yang kapitalis, pembangunan sumber daya manusia merupakan proses reproduksi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan mereka yang menguasai tenaga kerja dan faktor produksi. Kurikulum pendidikan menghasilkan tenaga kerja yang pasif, taat (*obedient*), yang menerima struktur kekuasaan tanpa mempersoalkannya.

Manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan, karenanya pendidikan dan pelatihan merupakan aspek yang cukup penting dilakukan dalam jangka pendek untuk memenuhi tenaga kerja terampil, berwawasan luas serta punya visi ke depan. Disisi lain, Louis Emmerij (dalam Tadjudin, 1993) merumuskan pengembangan sumber daya aparatur merupakan tindakan: a) kreasi sumber daya manusia, b) pengembangannnya, c) menyusun struktur insentif/upah sesuai dengan peluang kerja yang ada. Ketiga pengertian ini mengandung upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan formal dan pelatihan serta pemanfaatan sumber daya tersebut.

Pengembangan kawasan agropolitan tidak dapat dilepaskan dari aspek permodalan, menyangkut anggaran, sarana material, peralatan, bahan-bahan yang diperlukan dan ruang atau gedung.

Teori Kutub Pertumbuhan didasarkan pada kepercayaan bahwa pemerintahan pada negara berkembang, dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dengan jalan melakukan investasi besar-besaran pada industri yang memerlukan modal besar dalam kota-kota besar atau daerah tertentu. Pertumbuhan ini ditujukan untuk menciptakan spread effect kepada daerah pedesaan dalam pembangunan regional rangka (Rondinelli, 2001; 89).

Teori Kutub Pertumbuhan selalu identik dengan top-down planning (sistem perencanaan terpusat) dan menitikberatkan investasi pada high technology untuk pembangunan industrial perkotaan, dimana kutub pertumbuhan adalah ruang yang terkonsentrasi (aglomerasi) yang terkait dengan industri

F. Teori Kluster

1. Pengertian kluster

Istilah kluster (*cluster*) mempunyai makna kumpulan, kelompok, himpunan suatu obyek tertentu yang memiliki keserupaan atau atas dasar karakteristik tertentu. Kluster juga diartikan sebagai pusat aktivitas komoditas atau industri tertentu dalam suatu wilayah. Biasanya berwujud sebagai kawasan tempat beroperasinya sekelompok perusahaan-perusahaan. Menurut Anonim (dalam Fatimah 2006:13) kluster merupakan pemusatan geografis indusrti-industri terkait dan kelembagaan-kelembagaannya. Dari segi bisnis, kluster di identifikasikan atas daerah yang luas disepanjang pertalian-pertalian industri. Sebaliknya ditinjau dari segi pembangunan, kepentingan yang besar diletakkan pada kedekatan geografis, dengan menyoroti kelemahan pertalian industri tersebut di Negara yang sedang berkembang.

Kluster menurut Hartanto (dalam,Virsa 2004:19) merupakan sekelompok perusahaan dan lembaga terkait berdekatan secara geografis, memiliki kemiripan yang mendorong kompetisi dan bersifat complementaris. Selain itu, lebih jauh digambarkan kluster merupakan konsentrasi geografis atas berbagai industri terkait, penyedia jasa pendukung dan berbagai institusi yang mendukungnya. Sebenarnya pada kluster tidak ada batasan yang pasti mengenai kedekatan geografis, kluster dapat berupa sebuah kawasan tertentu, sebuah kota dan wilayah yang lebih luas, bahkan kluster juga berupa sebuah wilayah lintas Negara.

Konsep pengembangan berdasarkan kluster berfokus pada keterkaitan antara pelaku dalam jaringan kerja produksi sampai jasa pelayanan dan upaya-upaya inovasi pengembangannya. Kluster yang berhasil adalah kluster yang terspesialisasi, memiliki daya saing dan keunggulan komparatif dan berorinetasi eksternal. Hartanto (dalam Virsa 2004:20) mengidentifikasi karakteristik kluster wilayah yang berhasil, yaitu dengan adanya spesialisasi jaringan lokal, akses yang baik pada permodalan, institusi penelitian, pengembangan dan pendidikan, mempunyai tenaga kerja yang bermutu dan berkualitas, menjalin kerjasama yang baik antara perusahaan dan lembaga lainnya, mengikuti perkembangan teknologi serta mempunyai inovasi dan semangat yang tinggi.

Untuk mengembangkan kluster, perlu dilakukan beberapa tindakan, yaitu:

- 1. Memahami kondisi dan standar ekonomi kawasan;
- 2. Menjalin kerjasama;
- 3. Mengelola dan meningkatkan pelayanan;
- 4. Mengembangkan tenaga ahli;
- 5. Mendorong inovasi dan kewirausahaan;
- 6. Mengembangkan pemasaran dan memberi label khas bagi kawasan

2. Manfaat Kluster

Pada dasarnya terdapat 2 tipe manfaat bagi perusahaan yang berada dalam kluster yaitu manfaat aktif dan manfaat pasif. Manfaat pasif adalah manfaat yang di peroleh perusahaan dalam kluster tanpa harus melakukan aktivitas tertentu, sedangkan manfaat aktif adalah manfaat yang akan

semakin menjadi besar apabila perusahaan didalam kluster melakukan upaya yang aktif atau terus-menerus.

Pada dasarnya kluster akan mendorong berkumpulnya tenaga kerja yang mempunyai keahlian atau pengalaman di wilayah tertentu. Tuntutan kemajuan dan kompetisi akan mendorong teknologi yang lebih baik dan tenaga kerja yang lebih baik pula. Dengan manfaat aktif akan lebih membuat suatu rencana akan menjadi lebih baik karena melakukan upaya bersama untuk kemajuan.

Tetapi manfaat yang dimaksud disini adalah dengan adanya kluster pada program pemerintah akan lebih terfokuskan pada komoditas yang akan di budidaya atau dikembangkan karena berbasis pada pengelompokkan sehingga dapat terfokus, kelompok satu dengan lainnya yang berbeda aktivitas komoditas yang dijalankan dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Lokasi yang berdekatan bisa menciptakan efisiensi waktu dan biaya.

3. Strategi Pengembangan Kluster

Pengembangan kluster bisa terwujud bila seluruh pelaku usaha terkait baik pemerintah, swasta maupun lembaga pendidikan bisa memberikan dukungan secara terpadu untuk penciptaan, pertumbuhan, dan pengembangan kerjasama antar pelaku. Beberapa hal yang diperlukan dalam pendekatan kluster antara lain pemerintah harus mampu memfasilitasi kerjasama antara individu atau kelompok perusahaan dengan pihak berwenang sehingga tercipta suatu kerjasama kemitraan bisnis yang



BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2011:2), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

A. Jenis Penelitian

Setiap penelitian ilmiah selalu menggunakan metode ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, sehingga suatu penelitian dapat diandalkan kesahihannya. Berdasarkan judul, rumusan masalah, dan tujuan yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), serta data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Menurut Sugiyono (2011:9) penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.

Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan and Biklen (1982) dalam Sugiyono (2011, 13-14) adalah seperti berikut:

- a. Qualitative research has the natural setting as the direct source of data and research is the key instrument;
- b. Qualitative researchis descriptive. The data collected is in the form of words of pictures rather than number;
- c. Qualitative research are concerned with process rather than simply with outcomes or product;
- d. Qualitative research tend to analyze their data inductively;
- e. "Mearning" is of essential to the qualitative approach.

Berdasarkan karakteristik tersebut dapat dikemukakan di sini bahwa penelian kualitatif itu:

- a. Dilakukan pada kondisi yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci;
- b. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka;

BRAWIJAYA

- c. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*;
- d. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif;
- e. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik diamati).

Selain itu, ciri-ciri dari penelitian kualitatif adalah: dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi selama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. Sedangkan deskriptif disini dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian dideskripsikan secara mendetail, runtun dan sesuai akan fakta lapangan. Setiap gejala, data maupun fakta mengenai Strategi Pemerintah Kabupaten Madiun Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kluster pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kawasan Agropolitan GEDANGSARI Kabupaten Madiun akan dideskripsikan secara jelas sehingga nanti akhirnya dapat dihasilkan sebuah hasil penelitian dan kesimpulan yang valid.

B. Fokus Penelitian

Menurut Lexi J Moleong fokus penelitian adalah penempatan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban. Faktor dalam hal ini dapat berupa konsep, data empiris, pengalaman atau unsur lainnya yang apabila keduanya ditempatkan secara

berpasangan akan menimbulkan sejumlah tanda tanya atau kesulitan (Moleong, 2010:93).

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut :

- 1. Aspek kondisi infrastruktur, sumberdaya manusia dan akses permodalan dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster di Kabupaten BRAWIUA Madiun
 - Kondisi infrastruktur
 - Kondisi sumberdaya manusia
 - Kondisi akses permodalan
- 2. Proses dan pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster di Kabupaten Madiun, yaitu:
 - Pelaksanaan proses pengembangan kawasan agropolitan
 - b. Hasil dari pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster di Kabupaten Madiun
- 3. Strategi pemerintah dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster di Kabupaten Madiun dapat dilihat dengan bebarapa hal, yaitu :
 - Peningkatan sumber daya manusia sebagai pelaku kegiatan dalam mendukung kelembagaan guna pengembangan kawasan agropolitan
 - b. Pengembangan agribisnis
 - Peningkatan investasi permodalan dalam mendukung dan pengembangan kawasan agropolitan
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan agropolitan

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut dilakukan serta tempat dimana peneliti dapat mengungkapkan keadaan yang senyatanya dari objek yang diteliti untuk mendapatkan data-data yang valid, akurat, yang benarbenar diperlukan untuk penelitian. Pemilihan lokasi penelitian adalah dengan didasarkan pada aspek kemudahan dalam mengakses informasi. Dalam hal ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Madiun.

Situs penelitian adalah letak atau tempat peneliti mengungkapkan keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti menentukan lokasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, Jalan Alun-Alun Utara no 4 Madiun. Adanya kesesuaian situs penelitian ini dengan substansi penelitian mampu memberikan *entry* baik berupa data, interaksi, substansi yang sesuai dengan kebutuhan deskripsi mendalam, kantor tersebut berhubungan dan mendukung pengembangan program kawasan agropolitan berbasis kluster di Kecamatan GEDANGSARI (Dagangan, Geger, Dolopo, Kebonsari). Kabupaten Madiun merupakan kawasan yang dipilih Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai kawasan pengembangan agropolitan di Kabupaten Madiun. Pertimbangan pemilihan lokasi secara praktis karena peneliti berasal dari Madiun maka peneliti bisa mendapatkan data lebih akurat karena lebih mengetahui situasi dan kondisi di daerah tersebut serta bisa mengetahui apa saja yang diperlukan di daerahnnya.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah sumber-sumber penyedia informasi yang dapat mendukung informasi tentang hal-hal yang menjadi pusat

BRAWIJAYA

perhatian peneliti. Untuk menunjang penelitian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tempat dan peristiwa

Tempat yang digunakan adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Kawasan Agropolitan GEDANGSARI (Geger, Dagangan, Dolopo, Kebonsari) Kabupaten Madiun, peristiwa yang di amati antara lain berupa informasi data yang meliputi kondisi, proses dan pelaksanaan, serta strategi pemerintah Kabupaten Madiun dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster.

2. Informan

Penentuan informan diawali dengan melakukan teknik pemilihan informan secara purposif bertujuan (*purposisive sampling*) yaitu:

- a. Bidang Ekonomi (Ir. Agus Trisilo, MBA)
- b. Sub Bidang Pertanian (Ir. Siti Nurul Hidajati, M.SI)
- c. Sub Bidang Perekonomian (Jaka S, SP)
- d. Ketua Gapoktan Desa Segulung Kecamatan Dagangan (Taryono)
- e. Ketua Gapoktan Desa Jogodayuh Kecamatan Geger (Wahid Hasim)
- f. Ketua Gapoktan Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo (Mulyono)
- g. Ketua Gapoktan Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari (Mulyadi)

3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai data sekunder yang dapat melengkai data yang diperlukan, adapun dokumen-dokumen maupun arsip-arsip yang diperlukan seperti gambaran umum lokasi penelitian seperti, gambaran

umum Kabupaten Madiun, Gambaran umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, Gambaran umum kawasan agropolitan GEDANGSARI Kabupaten Madiun dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sehingga teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. *Interview* (Wawancara)

Yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara secara langsung kepada para narasumber. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan sumber data primer untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab secara terstruktur untuk memperoleh kejelasan yang rinci mengenai strategi pemerintah Kabupaten dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster.

2. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada saat proses penelitian sedang berjalan. Observasi dalam penelitian ini meliputi data tentang kondisi infrastruktur, sumberdaya manusia, akses permodalan dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster.

3. Metode Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara menyalin dokumen-dokumen dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun. Proses pengambilan data dan penelitian dengan menggunakan kamera handphone, serta menulis hasil wawancara yang dilakukan terhadap narasumber.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2011:222). Selanjutnya Nasution dalam Sugiyono (2011:223) menyatakan:

"Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah fokus penelitian, prosedur penelitian, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti ini sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya".

Dalam penelitian ini instrumen atau alat yang digunakan adalah:

- 1. Peneliti, yaitu dengan menggunakan panca indera untuk melihat, mengamati, dan merasakan kejadian-kejadian yang ada di lapangan terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian.
- 2. Pedoman wawancara, yaitu pedoman dalam melakukan wawancara. Tujuannya agar peneliti memperoleh data atau informasi yang valid dan lengkap namun tidak menyebar kemana-mana.
- 3. Catatan lapangan, yaitu catatan yang dibuat peneliti sewaktu mengadakan pengamatan wawancara atau menyaksikan suatu kejadian tertentu.

G. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010:246) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipaham oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan analisis data kualitatif model Miles and Huberman. Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2010:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data model ini adalah:

1. Reduksi Data

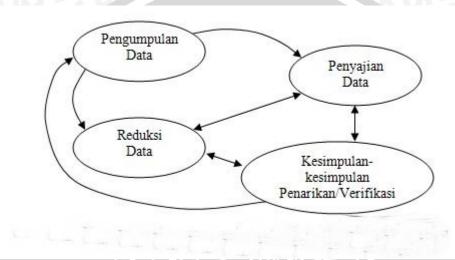
Proses pemilihan atau mereduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang didapatkan dari lokasi penelitian.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan atau hubungan kategori. Dalam arti pengorganisasian data menjadi sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan

3. Verifikasi/Menarik Kesimpulan

Kegiatan untuk menyimpulkan catatan-catatan di lapangan dimana kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi nilai kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



Gambar 2: Komponen-komponen Analisis Data

Sumber: Sugiyono (2010)

H. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas). Kriteria keabsahan data sebagaimana dijelaskan oleh Guba dan Lincoln dalam Moleong (2010) menyatakan ada empat kriteria penting yang digunakan yaitu, derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

Adapaun teknik yang dipakai dalam menentukan keabsahan data adalah sebagaimana berikut:

1. Menambah waktu penelitian

Dalam penelitian memanfaatkan waktu selama 2 bulan (Februari sampai dengan Maret 2014). Longgarnya alokasi waktu penelitian memungkinkan peneliti dapat menjalin hubungan secara akrab dengan orang-orang yang diwawancarai (informan) dan meyakinkan mereka untuk tidak merusak kehormatan dan nama baik mereka, sehingga memperoleh data yang akurat.

- 2. Pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus
 - Pengamatan dilakukan secara terus-menerus (*ajeg*), cermat dan tepat serta mendalam untuk mendapatkan informasi dari informan. Tidak dibenarkan memberikan tafsiran terhadap data yang terkumpul dengan membenarkan atau menolak tafsiran yang keliru.
- 3. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Moleong, 2010).
- 4. *Peer debriefing*, peneliti meminta bantuan kolega, melalui diskusi untuk memberikan komentar terhadap data atau temuan penelitian.
- 5. *Multi site Desain*, yaitu mengumpulkan data dari berbagai tempat, kasus, dan situasi penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Madiun

a) Sejarah Kabupaten

Kabupaten Madiun ditinjau dari pemerintahan yang sah, berdiri pada tanggal paro terang, bulan muharam, tahun 1568 masehi tepatnya jatuh hari kamis kliwon tanggal 18 juli 1568/jumat legi tanggal 15 suro 1487 Be-Jawa Islam. Berawal pada masa Kesultanan Demak, yang ditandai dengan perkawinan putra mahkota Demak Pangeran Surya Patiunus dengan Raden Ayu Retno lembah putri dari Pangeran Adipati Gugur yang berkuasa di Ngurawan, Dolopo.

Pusat pemerintahan dipindahkan dari Ngurawan ke desa Sogaten dengan nama baru Purabaya (sekarang Madiun). Pangeran Timoer dilantik menjadi Bupati di Purabaya tanggal 18 juli 1568 berpusat di desa Sogaten. Sejak saat itu secara yuridis formal Kabupaten Purabaya menjadi suatu wilayah pemerintahan di bawah seorang Bupati dan berakhirlah pemerintahan pengawasan di Purabaya yang di pegang oleh Kyai Rekso Gati atas nama Demak dari tahun 1518-1568. Pada tahun 1575 pusat pemerintahan dipindahkan dari desa Sogaten ke desa Wonorejo atau Kuncen, Kota Madiun sampai tahun 1590.

Pada tahun 1686, kekuasaan pemerintah Kabupaten Purabaya diserahkan oleh Bupati Pangeran Timur (Panembahan Rama) kepada putrinya Raden Ayu Retno Dumilah. Bupati inilah selaku senopati manggalaning perang yang

memimpin prajurit-prajurit Mancanegara Timur pada tahun 1586 dan 1587 Mataram melakukan penyerangan ke Purabaya dengan Mataram menderita kekalahan berat. Pada tahun 1590, dengan berpura-pura menyatakan takluk, Mataram menyerang pusat istana Kabupaten Purabaya yang hanya dipertahankan oleh Raden Ayu Retno Djumilah dengan sejumlah kecil pengawalnya. Perang tandang terjadi antara Sutawidjaja dengan Raden Ayu Retno Djumilah dilakukan di sekitar sendang di dekat istana Kabupaten Wonorejo (Madiun).

Pusaka Tundung Madiun berhasil direbut oleh Sutawidjaja dan melalui bujuk rayunya, Raden Ayu Retno Djumilah dipersunting oleh Sutawidjaja dan diboyong ke istana Mataram Plered (Jogjakarta) sebagai peringatan penguasaan Mataram atas Purbaya tersebut maka hari jumat legi tanggal 16 november 1590 masehi nama "Pubaya" diganti menjadi "Madiun".

Pada tahun 1927 pada zaman pemerintahan kolonial Belanda di Kabupaten Madiun dibentuk kota Administratif Madiun yang lama kelamaan berkembang menjadi kota Madiun. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pemerintahan daerah Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Tempat kedudukan pemerintah Kabupaten Madiun berada di wilayah Kota Madiun. Dalam perkembangannya, Kota Madiun yang semula merupakan wilayah tempat kedudukan pemerintah daerah Kabupaten Madiun, telah berkembang pesat menjadi sebuah kota besar yang mandiri.

Sehingga pada era kepemimpinan Bupati Bambang Koesbandono tepatnya tahun 1980 mulai dirintis pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun di wilayah Mejayan. Dilanjutkan pada era Bupati Ir. H. Djunaedi Mahendra, M.Si

membangun GOR Pangeran Timur. Secara Yuridis pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun ke Mejayan ditetapkan melauli PP. 52 tahun 2010 tentang pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari wilayah Kota Madiun ke wilayah kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun (Bappeda Kab. Madiun 2014).

b) Visi dan Misi

"KABUPATEN MADIUN LEBIH SEJAHTERA 2018"

a. Visi dan Misi

Makna Visi

1. Memaknakan adanya proses, yaitu:

Peningkatan perkonomian rakyat , penuatan agrobisnis, penguatan ketahanan sosial, peningkatan kapasitas ruang pengembangan dalam sistem pemerintahanyang demokratis dan terpercaya.

2. Memaknakan adanya upaya, yaitu:

Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan perluasan lapangan pekerjaan.

3. Memaknakan adanya wujud, yaitu:

Masyarakat hidup dinamis, tentram dan terayomi. Berdasarkan prinsip hari esok lebih baik dari hari ini.

Misi Kabupaten Madiun:

- Peningkatan perekonomian rakyat berbasis agro dan berwawasan bisnis
- 2. Peningkatan sistem sosial yang dinamis, berkeadilan dan berbudaya

BRAWIJAYA

- 3. Peningkatan daya saing daerah dan kelestarianlingkungan hidup
- 4. Peningkatan pemerintahan yang demokratis dan terpercaya
- 5. Arti dan Makna Lambang Kabupaten Madiun:



Gambar 3: Lambang Kabupaten Madiun

Sumber: www.madiunkab.go.id

Motto Kabupaten Madiun: AAPIK (Aman Asri Intensif Kelestarian Lingkungan)

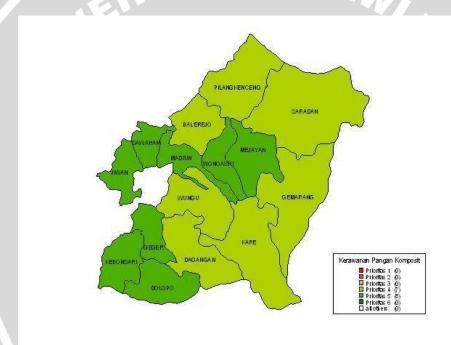
Lambang Kabupaten Madiun terdiri dari:

- 1. Bentuk Seluruhnya merupakan Perisai : Lambang Pertahanan
- 2. Bintang Bersudut 5 (Lima): Lambang Pancasila
- 3. Pohon Beringin: Lambang Kesentausaan dan Kehidupan
- 4. Keris: Pusaka Nenek Moyang sebagai Lambang Kebudayaan
- 5. Sayap : Lambang Kekuatan semangat mencapai cita-cita
- 6. Padi dan Kapas: Lambang Kemakmuran Rakyat
- 7. Warna-warna yang dipakai
 - a. Putih (Pita, Kapas): Lambang Kesucian
 - b. Hijau (Beringin, Daun Kapas, Padi): Lambang Penghargaan
 - c. Merah (Pangkal Sayap): Lambang Keberanian

- d. Kuning (Emas) Sayap, Padi,
- e. Pinggiran, Pita, Bintang: Lambang Keluhuran
- f. Hitam (Warna dasar): Lambang Keabadian

c) Kondisi Geografis dan wilayah administratif

Kabupaten Madiun merupakan salah satu Kabupaten dari Propinsi Jawa Timur yang terletak pada $111^025'45'' - 111^051'$ Bujur Timur dan $7^012' - 7^048'30''$ Lintang Selatan.



Gambar 4. Peta Wilayah Kabupaten Madiun

Sumber: Kab. Madiun 2014

Kabupaten Madiun memiliki luas wilayah sebesar 1.010,86 km² dan memiliki batas administrasi sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten
 Ngawi

2. Sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk

3. Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo

4. Sebelah Barat : Kabupaten Magetan dan Ngawi

Kabupaten Madiun merupakan salah satu Kabupaten dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa dan terletak hampir di ujung barat provinsi Jawa Timur. Jarak antara Kabupaten Madiun dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur kurang lebih 175 km kea rah timur, sedangkan jarak dengan Ibu Kota Negara kurang lebih 775 km dengan arah berlawanan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Madiun terletak di dataran rendah, dengan curah hujan sebesar 16.650,25 mm. setahun, hari hujan sebanyak 88 hari pertahun.

Secara administratif Kabupaten Madiun terdiri dari 15 kecamatan dalam seratus sembilan puluh delapan (198) desa dan delapan (8) kelurahan. Kecamatan terluas di Kabupaten Madiun adalah Kecamatan Kare seluas 19.085 Ha sedangkan Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Sawahan yaitu seluas 2.215 Ha. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 Banyaknya desa dan kelurahan menurut kecamatan tahun 2013 di Kabupaten Madiun

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Desa	Kelurahan
1.	Kebonsari	47,45	14	
2.	Geger	36,61	19	
3.	Dolopo	48,85	10	2
4.	Dagangan	72,36	17	
5.	Wungu	45,54	12	2
6.	Kare	190,85	8	
7.	Gemarang	101,97	7	4 1/1
8.	Saradan	152,92	15	
9.	Pilangkenceng	81,34	18	-
10.	Mejayan	55,22	11	3
11.	Wonoasri	≥ \33,93	10	_
12.	Belerejo	51,98		-
13.	Madiun	35,93	12	
14.	Sawahan	22,15	13	
15.	Jiwan 🧶	33,76	14	/ <u>}</u>
Jum	lah	101.086	198	8

Sumber: Kabupaten Madiun Dalam Angka, 2013

d) Karakteristik Wilayah

Kabupaten Madiun terletak pada daerah dengan kelerengan relatif datar dengan lereng antara 0-15% seluas 67.577,295 Ha atau 66.85% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Madiun. Berdasarkan kelas kelerengan wilayah yang mempunyai luasan terbesar adalah kelerengan 0-2% seluas 44.278,375 Ha atau 43.8%. Berdasarkan letak ketinggian dai permukaan laut (yang di hitung dari titik 0 meter permukaan air laut/pasang terendah), Kabupaten Madiun terletak antara 0-1.500 meter dari permkaan laut.

e) Kondisi Demografi

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Madiun, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 Jumlah penduduk Kabupaten Madiun tahun 2013

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk Laki-Laki (Jiwa)	Jumlah Penduduk Perempuan (Jiwa)	
1.	Kebonsari	30.425	31.566	
2.	Geger	34.483	35.482	
3.	Dolopo	31.995	32.907	
4.	Dagangan	27.959	28.397	
5.	Wungu	30.962	32.157	
6.	Kare	17395	17.246	
7.	Gemarang	19.379	19.073	
8.	Saradan	39.704	39.309	
9.	Pilangkenceng	29.593	30.114	
10.	Mejayan	25.053	24.973	
11.	Wonoasri	19.030	18.962	
12.	Balerejo	23.931	24.543	
13.	Madiun	20.720	21.579	
14.	Sawahan	13.366	13.818	
15.	Jiwan	31.444	32.377	
N	Kabupaten Madiun	395.439	402.503	

Sumber: Kabupaten Madiun dalam Angka, 2013

Penduduk Kabupaten Madiun berdasarkan bidang mata pencaharian tahun 2013, terdiri dari:

1. Bidang Pertanian : 59,66 %

2. Bidang Perdagangan : 17,14 %

3. Bidang Jasa : 13,86 %

4. Bidang Industri : 9,34 %

2. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun

a) Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Madiun

Visi:

"Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang strategis, menuju terwujudnya Kabupaten Madiun lebih sejahtera 2018".

Makna Visi:

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, merumuskan dan mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang efisien, guna melakukan proyeksi kondisi 5 tahun kedepan berdasarkan analisis internal, eksternal, serta pengendalian dan evaluasi. Kabupaten Madiun lebih sejahtera 2018 bermakna terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dari kondisi lima tahu sebelumnya, terukur dari aspek:

- 1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat (IPM): 72,78
- 2) Pertumbuhan ekonomi: 6,61
- 3) Peningkatan pendapatan per kapita: 4,40
- 4) Perluasan lapangan pekerjaan: 27.960.200

Misi:

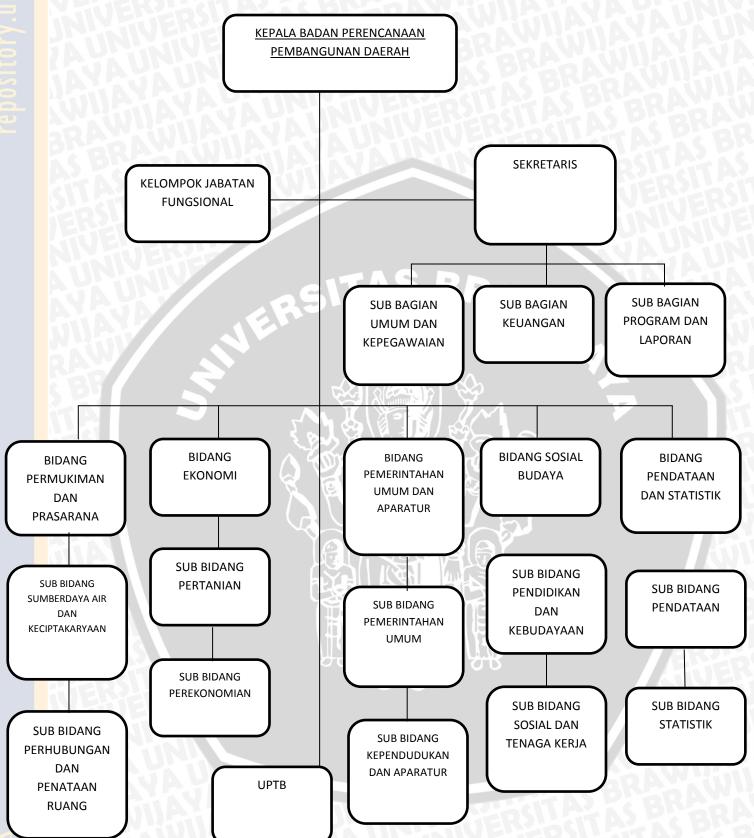
- 1) Melaksanakan perencanaan yang koordinatif, integratif, analisis, advokatif dan evaluatif dalam pelaksanaan pembangunan di bidang infrastruktur, ekonomi, sosial budaya dan tata pemerintahan daerah
- 2) Melaksanakan manajemen data dalam rangka pengendalian, evaluasi, pengembangan, dan akuntabilitas pembangunan daerah
- 3) Melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
- 4) Menjalankan organisasi dan tata laksana Bappeda yang professional
- 5) Mewujudkan *e-government* melalui pembangunan strategi, koordinasi dan evaluasi pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi

b) Struktur Dinas

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Derah Kabupaten Madiun terdiri atas :

- a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Badan
- b. Unsur pembantu pimpinan, yaitu Sekretariat meliputi:
 - 1). Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 2). Subbagian Keuangan
 - 3). Subbagian Program dan Laporan
- c. Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah, meliputi:
 - 1). Subbidang Sumber Daya Air dan Keciptakaryaan
 - 2). Subbidang Perhubungan dan Penataan Ruang
- d. Bidang Ekonomi, meliputi:

- 1). Subbidang Pertanian
- 2). Subbidang Perekonomian
- e. Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur, meliputi:
 - 1). Subbidang Pemerintahan Umum
 - 2). Subbidang Kependudukan dan Aparatur BRAWIUAL
- f. Bidang Sosial Budaya, meliputi:
 - 1). Subbidang dan Kebudayaan
 - 2). Subbidang Sosial dan Tenaga Kerja
- g. Bidang Pendataan dan Statistik, meliputi:
 - 1). Subbidang Pendataan
 - 2). Subbidang Statistik
- h. UPTD



Gambar 5: Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Madiun

Sumber: Bappeda Kabupaten Madiun 2012

c) Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Madiun mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

1.Tugas Pokok

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Malang di bidang Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Perencanaan Pembangunan.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

2.Fungsi

- a) Pelaksanaan kewenangan dibidang Perencanaan Pembangunan
- b) Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta
 evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Perencanaan
 Pembangunan.
- c) Pelaksanaan pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
- d) Pelaksanaan, pengumpulan, pengelolaan, dan evaluasi serta data Perencanaan Pembangunan, penyusunan skala dan strategi dalam rangka pelaksanaan Perencanaan Pembangunan, Pengelolaan, pengolahan dan pengumpulan data dan informasi serta evaluasi Perencanaan Pembangunan.

- e) Pelaksanaan koordinasi antara instansi terkait, lembaga-lembaga dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
- f) Pengolahan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dan penyelenggaraan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang Perencanaan Pembangunan.

Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan serta penilaian atas kebijaksanaannya.

3. Gambaran Umum Kawasan Agropolitan GEDANGSARI Kabupaten Madiun

Kawasan Agropolitan GEDANGSARI merupakan kawasan agropolitan yang terdiri dari Kecamatan Geger, Kecamatan Dolopo, Kecamatan Dagangan, dan Kecamatan Kebonsari yang terletak pada bagian selatan Kabupaten Madiun. Luas total kawasan ini adalah sekitar 205,27 km² dan memiliki batas administrasi sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kota Madiun dan Kecamatan Wungu

Sebelah Timur : Kecamatan Kare dan Kecamatan Wungu

Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo

Sebelah Barat : Kabupaten Magetan

Secara administratif Kawasan Agropolitan terdiri dari 4 kecamatan dalam enam puluh dua (62) desa.

Topografi Kawasan Agropolitan GEDANGSARI relatif tidak rata, ketinggian tempat berkisar 100-1.500 mdpl. Berdasarkan ketinggian tempatnya, Kawasan Agropolitan Gedangsari dapat digolongkan menjadi 4 tipe dataran, yaitu:

- Ketinggian 101-500 m dpl, yang sebagian besar terletak pada Kecamatan Geger dan Kecamatan Kebonsari.
- Ketinggian 501-1.000 m dpl, yang terletak di bagian barat Kecamatan Dolopo dan Kecamatan Kecamatan Dagangan.
- 3) Ketinggian 1001-1500 m dpl, yang terletak di bagian tenggara kawasan (Kecamatan Dolopo dan Kecamatan Kecamatan Dagangan) dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Ponorogo.

Jenis Tanah yang ada di Kabupaten Madiun terdiri dari tanah Allvial Hidromorf, Alluvial Coklat Kekelabuan, Gley, Regesol, Andosol, Mediteran dan Latosol.

Kabupaten Madiun yang terletak pada ketinggian antara 20-1.500 m dpl, beriklim tropis dan mempunyai 2 musim yaitu:

- 1. Musim kemarau berkisar antara bulan April sampai dengan Oktober.
- Musim penghujan berkisar antara bulan Oktober sampai dengan Maret.

Rata-rata curah hujan sebesar 1.456,5 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 107 hari.

Kawasan Agropolitan GEDANGSARI terdapat kurang lebih 5 sungai dengan panjang 3 – 8,5 Km diantaranya adalah Sungai Glidik, Sungai Rejali,

Sungai Mujur, Sungai Pancing, Sungai Besuksemut, Sungai Asem, dan Sungai Bondoyudo. Semua sungai tersebut mengalir ke arah selatan dan bermuara di Samudra Indonesia.

Tabel 4 : Panjang dan Persebaran Sungai di Kawasan Agropolitan GEDANGSARI tahun 2013

No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	Dagangan	Kali Catur	5
2	Dolopo	Kali Asin	3,5
3	Geger	Kali Sareng	8,5
		Kali Catur	4,5
4	Kebonsari	Kali Asin	3

Sumber: Kabupaten Madiun dalam Angka 2013

Walaupun di Kabupaten Madiun banyak terdapat sungai, tidak berarti bahwa kebutuhan penduduk akan terpenuhi seluruhnya, karena pada musim kemarau sebagian sungai tidak berair. Di beberapa daerah pemberian air untuk sawah dilakukan secara bergiliran. Pada musim hujan, deras hujan dapat menimbulkan banjir. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan perlindungan terhadap mata air, melaksanakan proyek reboisasi dan penghijauan, serta pembagian air pada saat tertentu.

B. PENYAJIAN DATA FOKUS PENELITIAN

 Kondisi infrastruktur, sumberdaya manusia dan akses permodalan dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster di kabupaten Madiun

a. Kondisi infrastruktur

Insfrastruktur yang ada di kawasan agropolitan GEDANGSARI dari data wawancara oleh Jaka Susilo yang menjabat Sub Bidang Perekonomian, pada tanggal 3 April 2014 menayatakan bahwa:

"Untuk strategi dalam pengelolaan infrstruktur, dari pemerintah kabupaten sendiri memberi kebijakan tentang pengelolaan dan sistem transportasi terpadu yang nantinya akan diterapkan di kawasan GEDANGSARI. Untuk sistem moda transportasinya sendiri ada dua jenis yakni sistem transportasi regional dan transportasi lokal."

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sistem transportasi yang terdapat di Kawasan agropolitan GEDANGSARI ini dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu sistem transportasi regional dan transportasi lokal.

a). Sistem Transportasi Regional

Pada Kawasan GEDANGSARI, pola jaringan jalan utama telah mampu memberikan akses yang memadai kegiatan pemasaran komoditi menuju lokasi-lokasi pasar utama di Kabupaten Madiun maupun kabupaten lain di sekitarnya. Hal ini ditunjukan dengan keberadaan jalan utama Madiun-Ponorogo yang melintasi wilayah kawasan agropolitan ini. Waktu yang harus dicapai menuju ibukota kabupaten dari pusat kawasan yaitu Kecamatan Dolopo ke Kabupaten

Madiun melalaui jalan raya Madiun-Ponorogo memakan waktu kurang lebih 15 menit dengan jarak 15 Kilometer.

b). Sistem Transportasi Lokal

Sementara untuk pola pergerakan dari lokasi budidaya tani menuju lokasi pasar didalam kawasan agropolitan itu sendiri telah terwadahi oleh jalan-jalan lokal primer yang menghubungkan tiap kota tani menuju KSP-nya maupun menuju Kota Tani Utama. Jalan-jalan tersebut menjadi rute pergerakan antara komoditi mentah menuju lokasi pengolahan hingga ke lokasi pasar yang berada di luar kawasan. Sementara untuk kondisi prasarana jalan yang ada cukup beragam.

Jadi dapat disimpulkan kondisi infrastruktur di GEDANGSARI dibagi menajdi 2 yaitu sistem transportasi regional yaitu pada jalan utama ini dapat memberikan akses yang memadai dalam kegiatan pemasaran komoditi menuju lokasi pasar utama di Kabupaten Madiun maupun Kabupaten lainnya dan sistem transportasi lokal yaitu pergerakan dari lokasi budidaya menuju lokasi pasar di dalam kawasan agropolitan maupun di luar kawasan, kedua sistem transportasi tersebut sangat berperan penting dalam kegiatan agropolitan.

Selain itu juga di tambahkan wawancara oleh Agus Trisilo, Staf Bidang Ekonomi, pada tanggal 3 April 2014 mengungkapkan bahwa:

"Transportasi di KAG relatif cukup lancar, karena jalan-jalan utama yang menuju desa telah beraspal, kecuali kearah lahan usaha tani serta dusun-dusun. Moda transportasi yang ada adalah mikro bus, angkota, ojek sepeda motor, becak, sepeda dan delman. Pada jalan utama kondisi kualitas jalan telah dalam kondisi pengerasan dengan aspal dengan status sebagai jalan Negara dan Kabupaten yang pengelolaanya dibawah wewenang Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten. Jalan usaha tani, secara tradisional bukan merupakan prioritas, namun pada kondisi sekarang perlu mendapatkan prioritas karena akan berdampak pada kemudahan pencapaian (aksesibilitas) perdagangan."

Jadi dapat disimpulkan bahwa transportasi di KAG relatif cukup lancar sebagian jalan sudah beraspal dan sebagian masih makadam. Pada jalan utama pngelolaannya di bawah wewenang Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Sedangkan pada jalan menuju lokasi kota tani menuju KSP merupakan jalan Kabupaten dan jalan poros desa yang pemeliharaannya di bawah wewenang Pemerintah Kabupaten dan swadaya masyarakat.

Siti Nurul Hidajati bagian bidang ekonomi, pada tanggal 3 April juga menambahkan:

"Pertemuan jalan-jalan usaha tani (simpul jalan usaha tani) pada Kawasan Sentra Produksi belum terdapat sarana bangunan yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan awal hasil usaha tani."

Berdasarkan data sekunder yang berupa Rencana Program jangka Menengah Desa (RPJMD) kabupaten Madiun tahun 2013-2018 di KAG, dapat dikemukakan bahwa jalan usaha tani dan jalan lingkungan setiap tahun diusulkan oleh desa dengan pola pembiayaan "tripatriet" antara Pemerintah, Swadaya dan Swasta. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat KAG sangat sadar akan kepentingan aksesibilitas dalam rangka agribisnis maupun estetika dan kesehatan lingkungan.

Perlu dikemukakan bahwa, pada beberapa titik akses penting di KAG kecuali permasalahan jalan yang belum memadai juga moda transportasi yang belum cukup atau mendapatkan hambatan psikologis. Beberapa simpul akses dikuasai oleh moda tradisional dokar/andong, sedangkan perkembangan

BRAWIJAYA

perdagangan membutuhkan kecepatan dan waktu yang relatif semakin cepat.

Regulasi trayek moda transportasi perlu mendapatkan perhatian agar pembangunan jariangan jalan dapat berfungsi seperti seharusnya.

Dari hasil wawancara dan data sekunder dapat disimpulkan bahwa pembangunan, pengembangan, pemantapan dan peningkatan prasarana jalan di KAG masih terus perlu mendapatkan alokasi dalam pembangunan daerah. Alokasi anggaran dalam pembangunan jaringan jalan terutama diprioritaskan pada jalan usaha tani.

Prioritas peningkatan jalan dilakukan pada jalan-jalan usaha tani yang telah di makadam (benar-benar diprioritaskan oleh *stakeholder*). Regulasi trayek moda, jalan usaha tani dan pasar pengumpul komoditas merupakan satu satuan yang perlu dilakukan pengembangannya secara serentak agar diperoleh daya guna dan hasil guna yang tinggi.

Kondisi infrastruktur di KAG berdasarkan hasil penelitian dan yang tercantum dalam Masterplan KAG selain dari sistem transportasi juga terdiri atas:

1) Jaringan telepon dan sarana komunikasi

Jaringan sarana komunikasi yang ada di KAG saat ini telah berkembang mengikuti kemajuan teknologi informasi. Sarana telekomunikasi yang dimanfaatkan penduduk di KAG meliputi:

- a) Telepon seluler
- b) Telepon kabel
- c) Jaringan internet
- d) Pesawat televisi

e) Radio

2) Pengairan

Kawasan Agropolitan Gedangsari untuk penggunan lahan sawah menggunakan sistem pengairan secara pengairan teknis, pengairan setengah teknis, pengairan sederhana, dan tadah hujan dengan luas lotal 3.003,60 Ha. Pengairan dengan sistem teknis seluas 4.510,6 Ha dengan lokasi penggunan sistem pengairan teknis tertinggi terdapat di Desa Kebonsari seluas 359 Ha dan penggunaan lokasi terendah di Desa Segulung seluas 42 Ha. Sistem pengairan setengah teknis terdapat di Desa Bader seluas 78 Ha, Desa Dolopo seluas 53 Ha, Desa Suluk seluas 11 Ha da Desa Candi Mulyo seluas 9 Ha, Sistem pengaiaran sederhana di Kawasan Agropolitan Gedangsari seluas 258 Ha dengan lokasi pengggunaan tertinggi terdapat di Desa Dagangan seluas 90 Ha dan Desa Sareng seluas 80 Ha. Sistem pengairan tadah hujan seluas 75 Ha yang terdapat di Desa Bader dan SeguIung masing-masing seluas 25 Ha.

3) Jaringan Listrik

Saluran listrik di Kawasan Agropolitan Gedangsari pada tahun 2013 secara menyeluruh dengan total pelanggan sebesar 81.264 KK.

b. Kondisi Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk di Kawasan Agropolitan GEDANGSARI tahun 2013 sebesar 225.936 jiwa dengan pembagian berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebesar 112.125 jiwa dan perempuan 113.811 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Geger sebesar 63.296 jiwa dan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Dagangan sebesar 49.864 jiwa. Untuk lebih jelasnya

mengenai jumlah penduduk di Kawasan Agropolitan GEDANGSARI dapat lihat Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Jumlah Penduduk di Kawasan Agropolitan GEDANGSARI tahun 2013

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI (JIWA)	PEREMPUAN (JIWA)	JUMLAH (JIWA)	JUMLAH DESA/KEL
1.	KEBONSARI	28,383	29,195	57,578	14
2.	DOLOPO	27,507	27,691	55,198	12
3.	GEGER	31,300	31,996	63,296	19
4.	DAGANGAN	24,935	24,929	49,864	17
	JUMLAH	112,125	113,811	225,936	62

Sumber: Kabupaten Madiun dalam angka 2013

Dalam sektor mata pencaharian penduduk dikawasan KAG diklasifika sikan berdasarkan presentase masing-masing bidang dalam pengembangan KAG. Seperti hasil wawancara dengan Agus Trisilo yang menjabat staff Bidang Ekonomi, pada tanggal 3 April 2014 sebagai berikut:

"kriteria untuk mata pencaharian penduduk di kawasan KAG terdiri atas berbagai bidang pekerjaan dan bidang pengembangan kawasan KAG. Sedangkan untuk peningkatannya dapat dilihat berdasarkan hasil tingkatan presentase dari tahun ke tahun. Diharapkan setiap penduduk di kawasan KAG dapat semakin berkembang berdasarkan mata pencahariannya."

Penduduk Kabupaten Madiun berdasarkan bidang mata pencaharian tahun 2013, terdiri dari:

a. Bidang Pertanian : 59,66%

b. Bidang Perdagangan : 17,14%

c. Bidang Jasa : 13,86%

d. Bidang Industri : 9,34%

Kondisi sumber daya manusia yang ada dikawasan agropolitan GEDANGSARI menurut wawancara dengan Jaka Susilo yang menjabat Sub. Bidang Perekonomian, pada tanggal 3 April 2014 menyatakan bahwa:

"Kondisi sumber daya manusia dalam bidang pertanian sebelum ditetapkan menjadi kawasan agropolitan sebenarnya kondisinya sudah baik karena mayoritas mata pencaharian masyarakat di kawasan agropolitan GEDANGSARI adalah petani jadi para petani tidak kesulitan dalam bidang pertanian, tetapi kondisi sekarang para petani masih mengandalkan hasil pertanian yang langsung dijual tanpa mengolahnya menjadi produk-produk makanan yang baru dalam pemasaran para petani masih kurang maksimal."

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi sumber daya manusia yang ada pada kawasan pengembangan agropolitan perlu dikembangkan lagi karena sangat disayangkan apabila para petani masih belum mempunyai jiwa berkembang. Sangat dibutuhkan pelatihan untuk para petani mengenai bagaimana cara pengolahan hasil pertanian yang baik sampai dengan bagaimana pemasarannya.

c. Kondisi akses Permodalan

Kondisi permodalan dalam pengembangan kawasan agropolitan GEDANGSARI di Kabupaten Madiun menurut wawancara dengan bapak Agus Trisilo, Staf Bidang Ekonomi, pada tanggal 3 April 2014 mengungkapkan bahwa:

"Modal yang didapat para petani yaitu dari dinas-dinas terkait yaitu dinas pertanian memberikan modal berupa bantuan bibit tebu dan coklat, dinas peternakan dan perikanan memberikan bantuan bibit sapi dan ikan yang selanjutnya dikembangkan sendiri oleh para petani."

Secara umum kondisi akses permodalan masih sebatas kerjasama antara pengelola dari tiap-tiap kluster dengan pemerintah daerah Kabupaten Madiun. Hal

ini seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan Jaka Susilo yang menjabat Sub. Bidang Perekonomian, pada tanggal 3 April 2014 berikut ini:

"Pemerintah Kabupaten Madiun sangat mendukung dengan adanya program pengembangan di KAG. Wujud kepedulian dari pemerintah yaitu berupa pemberian akses permodalan. Namun untuk sistem permodalan dari pemerintah hanya diberikan pada awal pengelolaan masing-masing kluster, diharapkan kedepannya penduduk di KAG dapat mandiri untuk mengelola masalah permodalan dan keberlangsungan pengembangan dari KAG itu sendiri."

Wujud permodalan pada pengembangan KAG didapatkan berdasarkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Permodalan dari Bappeda
- b. Permodalan dari Dinas dan instansi terkait kluster di KAG
- c. Usaha mandiri dari tiap-tiap kluster

Dari wawancara dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa modal yang diberikan oleh para petani hanya berupa modal awal selanjutnya modal yang telah diberikan oleh dinas yang terkait akan dikembangkan sendiri oleh petani agar petani tersebut bisa mengembangkan sendiri usahanya pemerintah hanya sebagai fasilitator selanjutnya para petanilah yang akan mengembangkan agar mempunyai jiwa mandiri.

2. Proses dan pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster di Kabupaten Madiun

a. Pelaksanaan proses pengembangan kawasan agropolitan

Proses awal pembentukan kawasan agropolitan di Kabupaten Madiun menurut wawancara Agus Trisilo, staf Bidang Ekonomi, pada tanggal 3 April 2014 yaitu:

BRAWIJAYA

"Proses awal dalam penyusunan dan pengesahan master plan kawasan agropolitan Kabupaten Madiun, meliputi penetapan kawasan pertanian yang akan menjadi kawasan agropolitan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten madiun yang selanjutnya penetapan kelompok kerja (POKJA) PKA oleh pemerintah daerah Kabupaten Madiun selanjutnya pengajuan dukungan penetapan kawasan agroplitan kepada gubernur."

Dari hasil wawancara di atas peneliti menemukan prosedur dalam pengajuan dukungan penetapan kawasan agroplitan kepada gubernur dengan proses pelaksanaannya melampirkan beberapa persyaratan diantaranya:

- 1. Masterplan PKA
- 2. Surat keputusan penetapan lokasi kawasan dan,
- 3. Surat keputusan pokja PKA oleh kepala daerah Kabupaten Madiun

Ketiga dokumen tersebut disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dengan Keputusan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur masing-masing 4(empat) eksemplar, selanjutny Tim Pokja provinsi Jawa Timur melakukan verifikasi ke wilayah yang telah ditetapkan oleh bupati berdasarkn ciri dan syarat kawasan agropolitan. Apabila sudah memenuh persyaratan maka pemerintah akan mengajukan usulan kegiatan fasilitasi kepada pemerintah pusat, kementrian pertanian RI dengan tembusan kementrian permukiman dan prasarana wilayah RI dan instansi terkait.

Kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Madiun memiliki fungsi penting terkait fasilitasinya kepada masyarakat, hal ini senada dengan yang disampaikan Jaka Susilo yang menjabat Sub. Bidang Perekonomian, pada tanggal 3 April 2014 berikut ini:

BRAWIJAYA

"Fasilitasi untuk pelaksanaan program pengembangan kawasan agropolitan dari rencana yang disusun oleh masyarakat terutama menyangkut kegiatan dan *sharing* pembiayaan, program dibahas bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Madiun sudah berjalan secara optimal guna menunjang program pengembangan KAG."

Tindak lanjut dari proses koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Madiun yaitu menghasilkan program rencana pengembangan kawasan agropolitan menurut data dari review master plan kawasan agropolitan kabupaten Madiun yaitu dibagi menjadi beberapa kluster yaitu :

Kluster Pertanian

Pengembangan kluster pertanian ini untuk mempermudah pengorganisasian dalam pengembangan sektor pertanian, di GEDANGSARI Kabupaten Madiun terbagi menjadi 4 kluster pertanian. Rencana pembagian kluster pertanian GEDANGSARI dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6
Pembagian Kluster Pertanian

No.	Kluster	Komoditi	Pembagian Wilayah
1.	Tanaman Buah-	Durian, Mangga,	Kecamatan Dolopo
7. 1	buahan	Manggis	
2	Perkebunan	Tebu	Kecamatan Kebonsari
	Tanaman	Cokelat (kakao)	Kecamatan Dagangan
	Tahunan		
3.	Perikanan	Ikan lele, mujair,	Kecamatan Dolopo
		Nila, gurame	ESCITAL X C B
4.	Peternakan	Sapi Potong	Kecamatan Geger

Sumber: Program Pengembangan Kluster Pertanian, 2011 (review master plan kawasan agropolitan GEDANGSARI Kabupaten Madiun)

Di Kawasan Agropolitan GEDANGSARI Kabupaten Madiun, beberapa desa diarahkan sebagai pusat hinterland pertanian, antara lain di Desa Pagotan, Desa Segulung, Desa Doho, Desa Milir, Desa Lembah, Desa Tambakmas, dan Desa Tanjungrejo.

Tabel 7 Pembagian Hierarki Wilayah di Kawasan Agropolitan **GEDANGSARI**

No.	Kota Orde II	Wilayah	Sistem Kegiatan
1.	Agropolitan	Perkotaan Dolopo	Sektor perikanan,
4	Center (Kota Tani		hortikultura dan
	Utama)	\sim	agroindustry
2.	Sub Agropolitan	Perkotaan Geger	Sektor Peternakan
	Center (Kota	Perkotaan Dagangan	Sektor tanaman
	Tani)		tahunan perkebunan
	1		kakao
		Perkotaan Kebonsari	Perkebunan Tanaman
		4次	Tahunan, khususnya
		のはは	tebu

Sumber: Program Pengembangan Agropolitan 2011 (review kawasan agropolitan GEDANGSARI Kabupaten Madiun)

Program pengembangan berdasarkan masing-masing kluster menurut data yang diambil dari review masterplan KAG tahun 2011 antara lain:

1. Pengembangan Komoditas Kakao

Pengembangan kakao diarahkan memiliki varietas unggul dengan lokasi budidaya di Desa Segulung, Padas dan Mendak Kecamatan Dagangan. Dengan demikian, lokasi agroindustri skala rumah tangga lebih diarahkan mendekati kawasan produksi kakao. Namun apabila penggembangan agroindustri kakao hingga skala menengah hingga besar, diarahkan pada Kota Tani Dagangan. Prioritas kegiatan pengembangan komooditas kakao selain meningkatkan kualitas bibit, adalah penanganan proses pasca panen.

Pengembangan Kakao di Kecamatan Dagangan dapat disampaikan dari hasil wawancara dengan Taryono selaku ketua Gapoktan di Desa Segulung Kecamatan Dagangan, pada tanggal 26 November 2014 sebagai berikut:

"Dalam pengembangan varietas/komoditas kakao di kecamatan Dagangan selama ini telah dilakukan berbagai langkah dan upaya. Diantaranya yaitu permodalan secara swadaya dan dari pemerintah, pelatihan kepada para anggota gapoktan, bantuan pemberian bibit kakao unggul serta pemenuhan dalam pembangunan sarana prasarana."

Peran serta masyarakat yang diharapkan saat ini adalah terutama dari petani kakao melalui wadah kelembagaan masyarakat. Lembaga itulah yang nantinya akan memberikan posisi tawar yang bagus di pasar lokal, bahkan regional.

2. Pengembangan Komoditas Sapi Potong

Rencana lokasi pengembangan sapi potong terdapat di desa-desa hinterland Kawasan Agropolitan GEDANGSARI seperti Desa Bader, Banaran, Mendak, kapet, Bangunsari, Candimulyo, Ketawang dan Jogodayuh. Agroindustri yang diupayakan berkembang pada kawasan agropolitan ini adalah daging sapi, abon daging sapi, dendeng sapi, darah sapi, tulang sapi dalam kemasan, tepung tulang, serta penyamakan kulit dan industri kerajinan kulit sapi. Lokasi agroindustri diarahkan di desa Banaran.

Rencana prioritas 5 tahun ke depan difokuskan dalam penigkatan kulitas dan kuantitas produksi sapi, sehingga memiliki produk olahan yang berkualitas pula. Penyediaan luasan hijau sebagai pakan ternak sangat diperlukan apabila produksi sapi harus terus ditingkatkan.

Seperti pengembangan komoditas sapi potong di desa Jogodayuh dalam wawancara dengan Wahid Hasim selaku ketua gapoktan, pada tanggal 26 November 2014 dalam wawancara berikut mengungkapkan bahwa:

"Pengembangan komoditas sapi potong khususnya yang diutamakan di desa Jogodayuh sudah berkembang dengan baik. Ini tidak terlepas dari peran serta pemerintah serta andil besar masyarakat dan pemerintah. Upaya yg dilakukan antara lain dengan pengembangan teknik budidaya ternak dan penyediaan pakan alternative. Untuk permodalan kami dari gapoktan selain swadaya juga mendapat bantuan dari pemerintah kabupaten."

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentu pembentukan kelembagaan masyarakat dalam mengembangkan peternakan sapi. Selain itu, diharapkan Kawasan agropolitan GEDANGSARI memiliki wilayah peternakan tersendiri, sehingga memerlukan luasan lahan untuk kandang ternak bersama yang sekaligus dibina oleh para penyuluh.

3. Pengembangan Komoditas Perikanan

Agroindustri yang dikembangkan adalah produksi ikan segar, ikan presto, dan ikan asap. Potensi lain adalah munculnya agroindustri ikan dalam kemasan. Dengan demikian, pada kawasan pengolahan diperlukan cold storage yang dapat membantu dalam menjaga

kesegaran ikan agar lebih tahan lama. Pengembangan komoditas perikanan difokuskan di desa Doho dan Candimulyo.

Upaya pengembangan komoditas perikanan seperti yang disampaikan Mulyono selaku ketua Gapoktan di desa Candimulyo, pada tanggal 26 November 2014 yang mengungkapkan sebagai berikut.

"Jenis atau spesies ikan yang dibudidayakan disini lebih diutamakan pada jenis lele, nila dan gurami. Wujud upaya pengembangannya berupa bantuan alat, bibit, bantuan pembuatan kolam serta modal awal dari pemerintah. Selain itu banyak jg petani yang mengembangkan komoditi perikanan secara swadaya."

Peran serta masyarakat dilakukan dalam sebuah wadah kelembagaan yang dapat memberikan kekuatan, baik hukum maupun ekonomi bagi para anggotanya dalam memproduksi, mengolah, hingga mmemasarkan komoditas unggulan.

Rencana persebaran sarana agribisnis ikan masih tetap menggunakan arahan yang sama, yaitu diarahkan pada Kota Tani Utama Dolopo yang sudah memiliiki sarana pasar dan balai benih ikan.

4. Pengembangan Komoditas Tebu

Rencana proritas pengembangan komoditas tebu untuk lima tahun ke depan adalah perluasan kawasan produksi di seluruh wilayah desa hinterland Kota Tani Kebonsari, diantranya yaitu terdapat di desa Tambak mas, Rejosari dan Palur. Pengembangan usaha gula mangkok, serta pengembangan industry pembuatan sirup.

Dalam wawancara dengan Mulyadi selaku ketua gapoktan di desa Tambakmas, pada tanggal 26 November 2014 mengungkapkan sebagai berikut:

"Dalam pengembangan komoditas tebu di kawasan ini dilihat dari segi permodalan. Kami selaku petani selain mendapat bantuan, upaya yang kami lakukan berupa usaha swadaya dari para petani dan pemerintah untuk memenuhi produksi tebu di wilayah ini."

Peran serta masyarakat diarahkan dalam bentuk keterlibatan masyarakat secara langsung dalam kegiatan produksi (petani), pengolah (petani atau keluarga kecil), hingga pemasaran melalui pembentukan koperasi atau lembaga kerja.

5. Pengembangan Komoditas Buah-buahan (Durian, Mangga, dan Manggis)

Pengembangan komoditas saat ini difokuskan pada buah durian, mangga, dan manggis. Karena selain memiliki jumlah produksi yang melimpah tiap tahunnya di hampir seluruh wilayah hinterland, buah-buah tersebut memilikii daya saing dari kooditas luar daerah, agroindustri yang direncanakan adalah pembuatan sirup atau jus buah segar, manisan buah, hingga selai buah. Lokasi pengembangannya sendiri adalah di Kota Tani Utama Dolopo khususnya di desa Suluk.

Prioritas pengembangannya adalah dengan menjadikan buah sebagai bahan baku produk sekunder, sehingga memiliki nilai tambah.

Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui kelmbagaan yang terbentuk untuk pengembanagn agribisni tanaman buah-buahan.

b. Hasil dari pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster di Kabupaten Madiun

Tujuan dari pengembangan kawasan kawasan agropolitan di Kabupaten Madiun adalah untuk meningkatkan komoditas unggulan di Kabupaten Madiun agar lebih baik lagi menurut wawancara yang telah saya lakukan, Jaka Susilo bagian bidang ekonomi pada tanggal 2 Juni 2014 mengungkapkan bahwa:

"Pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten Madiun sampai saat ini sudah cukup baik. Sebagian besar produktivitasnya meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi masih perlu dilakukan upaya peningkatan kuantitas serta kualitas produksi setiap komoditas agar dapat meningkatkan daya saing produk dengan daerah lain. Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan produktivitas, perlu dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Selain itu, kebijakan yang diberlakukan pemerintah sangat berpengaruh terhadap pengembangan tiap komoditasnya."

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa hasil dari pengembangan KAG sudah cukup baik tapi masih perlu adanya perbaikan di beberapa sektor. Berikut peneliti sampaikan rincian dari hasil pengembangan dilihat dari berbagai komoditas.

1. Hasil pengembangan komoditas kakao

Hasil pengembangan komoditas kakao di kawasan agropolitan GEDANGSARI adalah sebagaimana dikemukakan oleh Siti Nurul Hidajati selaku subbidang pertanian Bappeda Kabupaten Madiun pada tanggal 2 Juni 2014 sebagai berikut:

"Pengembangan produk kakao di Kawasan Agropolitan GEDANGSARI masih dilakukan dalam skala kecil dan hasilnya langsung disetorkan pada pabrik pengolahan kakao dari luar kawasan agropolitan (Yogyakarta). Hal ini menyebabkan tidak berkembangnya komoditas kakao serta produk divesifikasinya akibat kekurangan produksi di kawasan

BRAWIJAYA

perencanaan. Dengan demikian, diperlukan sebuah lembaga dan kerjasama antara pemerintah, petani, dan investor dalam memberikan nilai tambah pada komoditas kakao. Melihat potensi dan kualitas produk yang cukup baik, pengembangan kakao serta agribisnis kakao sangat dimungkinkan untuk dikembangkan hingga skala regional. "

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa kelompok petani kakao masih belum mempunyai inovasi terharap hasil kakao karena hasilnya langsung disetorkan pada pabrik pengolaha kakao di luar kawasan agropolitan sendiri akibatnya adalah belum ada nilai tambah, apabila para petani tidak ada inovasi terus-menurus hanya menyetorkan hasil paennya akan tidak ada perubahan yang baik pada komoditas kakao.

2. Hasil pengembangan komoditas ternak sapi

Hasil pengembangan komoditas ternak sapi menurut Agus Trisilo selaku seksi Bidang Ekonomi, pada tanggal 2 Juni 2014 menyatakan bahwa:

"Ternak sapi yang dikembangkan di desa Banaran Kecamatan Geger sudah sangat baik pemasarannya masih dalam konteks lokal saja dan yang dijual berupa daging dan abon dan untuk saat ini mulai mengembangkan jenis sapi perah, petani sudah berusaha merintis susu bubuk hasilnya masih ada blendedblended maksudnya blended itu tidak bias larut dan hasilnya sudah dipasarkan namun belum ada yang berminat."

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hasil komoditas ternak sapi sudah lumayan sesuai dengan rencana pengembangan meskipun belum sempurna peternak sapi sudah mempunyai jiwa mengembangkan dan mengolah susu menjadi susu bubuk.

3. Hasil pengembangan komoditas perikanan

Hasil pengembangan komoditas budidaya ikan tawar menurut hasil wawancara saya dengan Jaka Susilo selaku subbidang prekonomian,pada tanggal 2 Juni 2014 menyatakan bahwa:

"Pada kondisi sekarang, perikanan belum merupakan kegiatan penting di Kawasan Agropolitan GEDANGSARI. Karena hasil pengolahan ikan lebih dilakukan di luar Kawasan Agropolitan GEDANGSARI, jadi sistem kegiatan agribis perikanan di Kawasan Agropolitan GEDANGSARI ini hanya sebagai batu loncatan sebelum didistribusikan hasilnya, untuk itu perlu "push faktor" untuk lebih digiatkan kegiatan perikanan di Kawasan Agropolitan GEDANGSARI. Budidaya ikan yang sudah berjalan yaitu hanya lele dan gurame saja dan direncanakan budidaya ikan gabus pada tahun ini. "

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan komoditas ikan tawar hanya sebai batu loncatan karena hasil pengolahan ikan dilakukan di luar kawasan agropolitan dan ikan yang dikembambangkan tidak sebanyak yang direncakan yaitu hanya jenis ikan lele dan gurame saja dan pemasarannya hanya dilakukan dalam lokal Madiun.

4. Hasil dari pengembangan Komoditas Tebu

Hasil dari pengembangan komoditas tebu menurut wawancara dengan Siti Nurul Hidajati selaku subbidang pertanian Bappeda Kabupaten Madiun pada tanggal 2 Juni 2014 menyatakan bahwa:

"Setiap tahun hasil dari pengembangan komoditas tebu selalu baik, tebu memiliki rendemen tinggi dan sesuai dengan permintaan pasar. Tebu di kawasan agropolitan Kabupaten Madiun merupakan salah satu produk unggulan yang baik untuk dikembngkan mengingat tebu merupakan bahan dasar gula yang dapat dijadikan berbagai macam olahan gula seperti gula pasir dan gula mangkok."

Dari hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari pengembangan komoditas tebu sudah cukup maksimal dilihat dari target yang dicapai mulai dari jumlah dan hasil olahan yang dihasilkan dari komoditas tebu.

 Hasil dari pengembangan Komoditas buah-buahan (Durian, Mangga, dan Manggis)

Hasil dari pengembangan komoditas buah-buahan terutama durian, mangga dan manggis, dapat dilihat dalam 8 berikut ini:

Tabel 8.

Hasil komoditas buah-buahan (mangga, manggis dan durian) tahun 2013 dalam satuan ton

No.	Kecamatan	Mangga	Manggis	Durian
1.	Kebonsari	1.310,42		-
2.	Geger	AL SERVICE	分分	-
3.	Dolopo	9.040,75	65,30	2.459
4.	Dagangan	520,40	102,27	1.583

Sumber: Kabupaten Madiun dalam angka 2013

Berdasarkan penjabaran dari tabel 8 maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah untuk komoditas buah-buahan terutama mangga, manggis dan durian belum semua dapat diproduksi secara maksimal dari tiap-tiap kecamatan yang ada dalam KAG. Diperlukan adanya tindak lanjut dari pengelola untuk bisa memaksimalkan area lahan pertanian dari tiap-tiap kawasan di kecamatan untuk memaksimalkan produktivitas dari komoditi buah-buahan.

3. Strategi pemerintah dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster di Kabupaten Madiun dapat dilihat dengan bebarapa hal

Keragaman diversifikas komoditas dapat memberikan nilai tambah tersendiri pada komoditas, sehingga komoditas unggulan di Kabupaten Madiun dapat mengahasilkan produk sekunder dan tersier yang juga berpotensi menjadi produk unggulan. Berdasarkan hasil analisa, maka jenis diversifikasi tiap komoditas lebih diarahkan seperti yang pernah ada di Masterplan Kawasan Agropolitan Gedangsari Kabupaten Madiun Tahun 2005-2010, yaitu :

- 1) Komoditas Tebu, dengan produk diversifikatif gula mangkok, sirup berbahan dasar gula mangkok
- 2) Komoditas Kakao, dengan produk diversifikatif bubuk kakao, permen kakao, dan dapat juga dikembangkan sebagai selai dan meises cokelat.
- 3) Komoditas Buah-buahan (durian, mangga, dan manggis), dengan produk diversifikatif manisan buah, selai buah, buah dalam kemasan, serta dapat dikembangkan juga sebagai dodol dan sirup buah.
- 4) Komoditas sapi potong, dengan produk diversifikatif daging olahan menjadi dendeng, abon sapi, nugget, dan daging dalam kemasan (kaleng).
- 5) Komoditas perikanan (mujair, nila, gurame), dengan produk diversifikatif daging ikan presto, daging ikan asap, serta daging ikan segar dalam kemasan.

Arahan tersebut tetap digunakan karena masih relevan dan banyaknya kendala yang ditemukan dalam implementasi di lapangan. Dari berbagai jenis

produk diversifikatif komoditas unggulan yang ada, hanya ada satu produk saja yang sudah dapat dikembangkan/ diimplementasikan, yaitu produk gula mangkok yang berbahan dasar dari komoditas tebu. Pengolahan komoditas ini hanya dalam skala kecil/rumah tangga yang terletak di Desa Tambakmas dan Desa Palur Kecamatan Kebonsari.

Rencana diversifikasi yang belum dapat terealisasi disebabkan karena adanya beberapa hambatan. Seperti belum mampunya masyarakat dalam mengolah komoditas unggulan, belum adanya industri pengolahan yang didukung dengan teknologi yang tepat guna dalam mengolah komoditas, serta tidak adanya investor yang tertarik denga potensi pengembangan dan pengolahan komoditas-komoditas tersebut. Selain itu, tidak adanya intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga dan pasokan komoditas melalui lembaga kemasyarakatan atau kelompok tani, sehingga komoditas, khususnya untuk kakao dijual langsung oleh petani pada pabrik dari luar Kawasan Agropolitan GEDANGSARI Kabupaten Madiun, menjadi salah satu kendala pula dalam pengembangan produk diversifikatif komoditas unggulan.

Kendala tersebut dapat diminimalisasi melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian, baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan kelembagaan atau kelompok tani yang berfungsi sebagai kader pertanian dan meningkatkan hasil pertanian melalui pelatihan-pelatihan serta pendampingan-pendampingan pada masyarakat. Keberadaan penyuluh juga sangat berperan dalam meningkatkan kualitas produksi komoditas. Dengan adanya

kekuatan internal wilayah Kawasan Agropolitan GEDANGSARI, maka diharapkan dapat menjadi daya tarik para investor untuk mengembangkan kegiatan agroindustri dalam skala yang lebih besar lagi.

a. Peningkatan sumber daya manusia sebagai pelaku kegiatan dalam mendukung kelembagaan guna pengembangan kawasan agropolitan

Menurut wawancara yang saya lakukan dengan bapak Jaka Susilo selaku Subbidang Pertanian, pada tanggal 2 Juni 2014 menyatakan bahwa:

"Salah satu langkah yang diambil dalam pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan peningkatan ketrampilan sesuai masing-masing kluster di balai desa setempat. Kegiatan seperti ini kita rencanakan agar ini rutin dilaksanakan agar penduduk bisa mendapatkan manfaat dari pelatihan tersebut,"

Bentuk dari pelatihan peningkatan ketrampilan sesuai dari masing-masing kluster yaitu:

- 1. kluster budidaya kakao: 20 anggota kelompok tani argo mulyo di desa padas kecamatan dagangan: disini kelompok tani kakao diberi pelatihan tentang bagaimana membudidaya kakao dari proses penanaman sampai proses panen. Para petani di beri pelatihan tidak cukup sampe proses panen saja tetapi juga diajarkan bagaimana mengolah kakao menjadi berbagai macam varian makanan agar petani memiliki inovasi karena kakao dapat diolah menjadi beberapa jenis makanan.
- 2. Kluster ternak sapi: 20 anggota kelompok tani mardi mulyo di desa banaran kecamatan geger: kelompok anggota tani disini diberi pelatihan bagaimana ternak sapi yang baik dan diberi pendidikan manajemen pengolahan limbah sapi agar tidak menjadi limbah yang mengganggu.

Di dalam kluster ternak sapi ini prioritas utamanya adalah kualitas daging saja. Para anggota kelompok tani juga diberi pelatihan cara mengolah daging sapi menjadi abon.

- 3. Kluster budidaya ikan tawar: 20 anggota kelompok tani mina makmur di desa candimulyo kecamatan dolopo: pada kluster ini kelompok tani diberikan pembekalan mengenai pemeliharaan ikan dan pembibitan karena ikan yang di budidaya adalah jenis ikan kolam maka pelatihan yang diberikan juga mengenai bagaimana cara peneolahan dan menjaga kolam agar ikan berkembang biak dengan baik
- 4. Kluster budidaya gula mangkok: 20 anggota kelompok tani sumber manis di desa tambakmas kecamatan kebonsari: pada kelompok kluster ini para petani sama hal nya dengan kluster yang lainnya juga diberi pelatihan terlebih dahulu mengenai cara mengolah gula mangkok menjadi bahan makan dan kecap.

Langkah strategi lain dalam peningkatan SDM menurut Siti Nurul Hidajati selaku subbidang pertanian, pada tanggal 2 Juni 2014 juga menambahkan dalam wawancara sebagai berikut:

"Selain kelompok tani yang diberikan pengarahan tentang pendidikan dan pelatihan pemerintah selaku fasilitator juga melaksanakan study banding keluar daerah agar agropolitan kabupaten madiun baik lagi seperti Lumajang yang saat ini agropolitannya sudah sangat bagus".

Hal tersebut dilakukan agar agropolitan di Kabupaten Madiun menjadi lebih baik lagi karena dengan diberikan pendidikan dan pelatihan akan menciptakan petani yang lebih mandiri dan mampu menciptakan sesuatu yang baru dan selain kelompok tani yang diberikan pengarahan dan pelatihan pmerintah

selaku fasilitator dan motivator juga melaksanakan study banding ke luar daerah agar Kabupaten Madiun dapat menjadi kawasan agropolitan yang lebih baik lagi.

b. Pengembangan agribisnis

Agar pengembangan agribisnis tetap utuh dan bertahan di Kabupaten Madiun diperlukan pendekatan yang berbeda untuk setiap kawasan agropolitan begitu juga di kawasan agropolitan Kabupaten Madiun. Ketika ditanya strategi Pemerintah Kabupaten Madiun dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster di Kabupaten Madiun melalui pengembangan agribisnis yaitu oleh Agus Trisilo selaku Staf Bidang Ekonomi, pada tangal 2 Juni 2014 menyatakan bahwa:

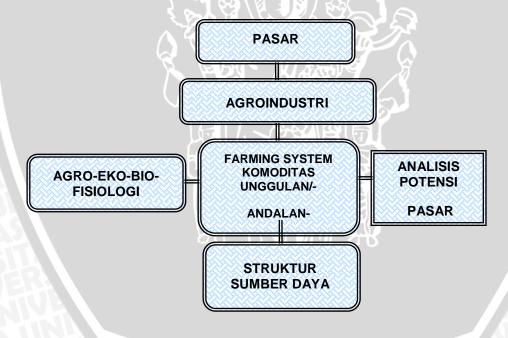
"Para petani harus mampu memiliki jiwa daya saing agar petani lebih mempunyai jiwa untuk berkembang dan petani harus mempunyai jiwa mandiri tidak tergntung pada pemerintah saja karena pemerintah hanya bertugas sebagai motivator dan fasilitator sementara selanjutnya petanilah yang harus mengembangankannya sendiri. Sistem agribisis ini mengikuti pola sistem pasar yaitu dengan cara mengikut sertakan promosi di luar Kabupaten Madiun agar daerah lain mengenal potensi yang dikembangkan dan dihasilkan di Kabupaten Madiun, pameran tentang hasil agropolitan di Kabupaten Madiun, bekerja sama dengan perusahan yang lebih besar."

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sistem agribisnis mengikuti pola sistem pasar, yaitu dengan cara mempromosikan hasil agropolitan di Kabupaten Madiun, mengikutsertakan pameran hasil agropolitan di Kabupaten Madiun dan bekerja sama dengan perusahaan yang lebih besar. Hal ini dilakukan agar potensi agropolitan di Kabupaten Madiun dapat diketahui oleh daerah lain.

Konsep keterpaduan agribisnis Kawasan Agropolitan GEDANGSARI pada hakekatnya sejalan dengan konsep trimatra pembangunan pertanian. Kegiatan agribisnis di Kawasan Agropolitan GEDANGSARI diharapkan akan

meningkatkan eksploatasi sumber daya alam tanpa merusak daya dukung lingkungan. Konsep Agribisnis Kawasan Agropolitan GEDANGSARI berpedoman pada sistem budidaya yang mengindahkan/memperhatikan sumber daya agro-eko-bio-fisiologinya, potensi pasar, struktur sumberdaya agroindustri dan permintaan pasar.

Dengan pertimbangan daya dukung sumber daya Kawasan Agropolitan GEDANGSARI, di kemudian hari diharapkan dihasilkan suatu bentuk kegiatan pengembangan produk yang secara teknis implementatif, ekonomis, menarik minat investor serta secara sosial dapat diterima oleh masyarakat seperti yang tertera dalam gambar 6 tentang Konsep Keterpaduan Agribisnis.



Gambar 6: Konsep Keterpaduan Agribisnis

Sumber: Review Masterplan KAG 2011

c. Peningkatan investasi dan permodalan dalam mendukung pengembangan kawasan agropolitan

Ketika ditanya mengenai bagaimana strategi melalui peningkatan investasi dan permodalan dalam mendukung pengembangan kawasan agropolitan Agus Trisilo selaku Staf Bidang Ekonomi, pada tanggal 2 Juni 2014 mengatakan bahwa:

Setiap kluster/produk petani akan difasilitasi dengan bantuan modal kredit ringan SKPD. Bantuan pinjaman ini dengan bunga ringan, agar petani tidak keberatan apabila meminjam modal.

Jadi dapat disimpukan bahwa dengan pinjaman modal kredit oleh SKPD terkait akan meringankan para kelompok tani yang akan mengembangkan agropolitannya sesuai dengan kluster masing-masing.

Strategi pengembangan kelembagaan keuangan termasuk Lembaga Keuangan Mikro pada Kawasan Agropolitan GEDANGSARI berorientasi pada kemitraan petani dengan lembaga keuangan tersebut dalam hal pembiayaan, kredit, dan pemenuhan kebutuhan petani dalam hal finansial, dalam proses produksi pertanian, pengolahan, sampai dengan pemasaran produk pertaniannya. Kebijaksanaan-kebijaksanaan penunjang. Seluruh keuntungan dari pembangunan usaha tani kecil tidak akan bisa dicapai jika pemerintah tidak menciptakan kebijaksanaan atau sistem kelembagaan yang menunjang, misalnya berupa insentif-insentif yang diperlukan, kesempatan-kesempatan berusaha dalam kegiatan ekonomi, dan kemudahan untuk memperoleh input yang diperlukan memungkinkan para petani kecil bisa meningkatkan *output* mereka sekaligus meningkatkan produktivitas mereka. Pengembangan kelembagaan ekonomi

penduduk direncanakan melalui pengembangan usaha skala rumah tangga, kelompok, gabungan kelompok asosiasi, dan koperasi. Rencana pngembangan permodalan melalui bantuan bergulir, kredit subsidi, kredit komersial secara khusus dan kredit komersial penuh, berbentuk:

- a. Rencana pemberian kredit dengan bunga rendah untuk meningkatkan usaha budidaya, usaha produksi dan pengolahan hasil pertanian; di semua klaster pertanian
- b. Rencana Internalisasi kredit keuangan mikro dengan *collateral* tanggung renteng di rencanakan pada semua klaster pertanian
- c. Rencana penampungan produk usaha tani kedalam lumbung desa modern dengan sistem penerbitan warehouse reciept (girik bantuan keuangan sebesar 70% dari nilai hasil panen yang dimasukan ke lumbung modern) direncanakan di Desa Dolopo
- d. Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan agropolitan

Ketersediaan akan sarana dan prasarana akan sangat menunjang keberhasil dari rencana dan proses pengembangan kawasan agropolitan. Selain dari sarana dan prasarana yang sudah ada, masih diperlukan adanya peningkatan mulai dari segi kualitas dan kuantitas. Dari hasil wawancara dengan Agus Trisilo selaku Staf Bidang Ekonomi, pada tanggal 2 Juni 2014 mengatakan bahwa:

"Upaya dalam hal strategi dan rencana merupakan tugas dari semua pihak yang terkait. Tentunya kalau sarana dan prasarana itu tersedia maka hal itu akan sangat mendukung terhadap peningkatan di berbagai sektor agropolitan, dan juga mendukung strategi pengembangan kawasan agropolitan. Untuk itu ada 3 hal yang kami utamakan dari bidang sarana dan

prasarana mulai dari rencana penyediaan sarana produksi pertanian, rencana penyediaan bibit, dan rencana penyediaan alat pertanian."

Berikut peneliti sampaikan mengenai 3 hal utama dari peningkatan sarana dan prasarana dalam pengembangan kawasan agropolitan berdasarkan temuan di lapangan dan hasil wawancara.

1) Rencana Penyediaan sarana produksi pertanian (SAPOTRAN)

Penyediaan Saprotan sebagai pendukung pengembangan kegiatan agribisnis dibedakan menjadi dua, yaitu Saprotan yang bersifat organik (berbahan baku dari bahan-bahan atau sisa-sisa organ hidup) dan anorganik (berbahan baku bukan dari bahan-bahan yang tidak hidup. Saprotan yang berupa bahan An-organik disediakan di agen/ distributor yang terletak di Agropolitan Center dan di toko-toko (ruko) yang tersedia di Agropolitan Center dan Sub Agropolitan Center. Sedangkan Saprotan yang bersifat organik, disediakan atau dikelola disekitar sumber bahan bakunya. Untuk mendukung kegiatan ini juga perlu penyadaran kepada masyarakat untuk berperan aktif, kaitannya dengan pemisahan jenis sampah organik dan anorganik pada saat mereka membuang sampah, sehingga memudahkan proses recycling sampah. Di Agropolitan Center (Kota Tani Utama) tepatnya di Perkotaan Dolopo didirikan Lembaga Pengkajian dan Penerapan Teknologi Farming, dimana dilakukan pengkajian Sarana Produksi Pertanian, sehingga dapat diketahui Saprotan yang tepat guna bagi Kawasan Agropolitan. Hasil pengkajian disosialisasikan melalui penyuluhan dan pelatihan di Kawasan Produksi (hinterland).

2) Rencana Penyediaan Bibit

Di Kawasan Agropolitan GEDANGSARI didirikan kebun bibit Kawasan Agropolitan sehingga pada waktunya Kawasan Agropolitan akan mandiri dalam kebutuhan bibit unggul. Kebun bibit masing-masing sektor pertanian perlu dibangun dengan bekerjasama dengan sumber-sumber bibit misalnya PGI, Balai Horti dan Tanaman Obat (BIOTROP) Bogor dan Perguruan Tinggi Nasional yang kompeten. Usaha pembibitan komoditas yang secara eksisting sudah berjalan perlu ditingkatkan dalam segala aspeknya. Berikut peneliti cantumkam mengenai rencana lokasi penyediaan bibit seperti yang terdapat pada tabel 9 berikut ini.

Tabel 9. Rencana Lokasi Penyediaan Bibit

No.	Kluster	Komoditi	Lokasi Penyediaan Bibit
1.	Tanaman Buah- buahan	Durian, mangga, dan manggis	Desa Mendak
2.	Perkebunan	Tebu	Desa Kebonsari
3.	Perikanan	Lele	Desa Doho
4.	Peternakan	Sapi Potong	Desa Bader

Sumber: Review Masterplan KAG 2011

3) Penyediaan alat mesin pertanian

Berdasarkan reviem masterplan KAG 2011 tentang analisis agribisnis komoditas unggulan-andalan-potensial, maka dibutuhkan pengadaan alatmesin pertanian, antara lain adalah :

- a. alat-mesin pengolahan glondong kakao menjadi bubuk kakao
- b. alat-mesin pengolahan bubuk kakao menjadi permen
- c. alat-mesin pengolahan batang tebu menjadi gula mangkok
- d. alat-mesin pengolahan gula mangkok berbentuk kotak
- e. alat-mesin pembuatan juice/sirup/air tebu
- f. alat-mesin pembuatan alkohol berbahan baku air tebu
- g. alat-mesin terkait dengan pengolahan daging sapi menjadi abon/dendeng
- h. alat-mesin pengolahan manisan/coctail buah
- i. alat-mesin perajang criping
- j. alat-mesin pengemasan plastik/kaleng untuk produk padat dan cair
- k. alat-mesin mekanisasi pengolahan tanah (hand tracktor dan lain sebagainya)
- 1. alat mesin mekanisasi pemanenan komoditas
- m. alat-mesin yang terkait dengan inseminasi buatan
- n. alat-mesin yang terkait dengan peningkatan oksigen kolam
- o. alat mesin yang terkait dengan penyamakan kulit
- p. alat mesin yang terkait dengan industri berbahan baku kulit
- q. alat mesin untuk mengangkat air baik dari sumber air permukaan/air tanah
- r. dan lain sebagainya

Dari hasil penelitian di lapangan yaitu di desa Rejosari, Tambakmas dan Palur, yang sudah tersedia saat ini adalah alat-mesin pengolahan batang tebu menjadi gula mangkok dan alat-mesin pengolahan gula mangkok berbentuk kotak, sehingga 15 alat lainnya belum tersedia dalam mendukung kegiatan agribisnis di kawasan Agropolitan GEDANGSARI. Rencana 5 tahun ke depan, lebih diprioritaskan pada pengembangan alat mesin dalam mendukung industri gula mangkok, serta industri lain yang strategis.

C. PEMBAHASAN

1. Aspek kondisi infrastruktur, sumberdaya manusia dan akses permodalan dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster di Kabupaten Madiun

Kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) merupakan kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada disekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi kawasan yang ada. Soemarno (2008:4).

Pengelolaan ruang dimaknakan sebagai kegiatan pengaturan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, penertiban dan peninjauan kembali atas

pemanfaatan ruang kawasan sentra produksi pangan (agropolitan). Kawasan pedesaan harus dikembangkan sebagai satu kesatuan pengembangan wilayah berdasarkan keterkaitan ekonomi antara desa-kota (*urban-rural linkages*), dan menyeluruh hubungan yang bersifat interpendensi/timbal balik yang dinamis.

Sebagai upaya penguatan struktur ekonomi di Kabupaten Madiun yang berbasis agro, maka perlu pengembangan sistem pembangunan yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan. Pengembangan sistem agribisnis di Kabupaten Madiun direncanakan melalui proses pemberdayaan masyarakat, permberdayaan institusi Pemerintah dan peningkatan investasi. Di Perdesaan strategi pengembangan sistem agribisnis tersebut dilaksanakan dengan pola Agropolitan.

Suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi suatu kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) menurut Soemarno (2008:6) harus dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 5) Memiliki sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian khususnya pangan, yang dapat dipasarkan atau telah mempunyai pasar (selanjutnya disebut komoditi unggulan)
- 6) Memiliki prasarana dam infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis khususnya pangan, seperti misalnya: jalan, sarana irigasi/pengairan, sumber airbaku, pasar, terminal, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, pusat informasi pengembangan agribisnis, sarana produksi pengolahan hasil pertanian, dan fasilitas umum serta fasilitas sosial lainnya.

BRAWIJAYA

- 7) Memiliki sumber daya manusia yang mau dan berpotensi untuk mengembangkan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan).
- 8) Konservasi alam dan kelestarian lingkungan hidup bagi kelestarian sumberdaya alam, kelestarian sosial budaya maupun ekosistem secara keseluruhan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan kawasan agropolitan harus memenuhi persyaratan yaitu lahan yang memadahi, infrastruktur yang mendukung, sumberdaya manusia yang berkompeten, dan dalam pengembangan kawasan agropolitan harus tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Pengembangan kawasan agropolitan GEDANGSARI ditinjau berdasarkan gambaran umum di kawasan tersebut yang meliputi beberapa poin berikut dalam pembahasan di bawah ini.

a. Kondisi Infrastruktur

Menurut Suryanto (2009), Infrastruktur merupakan suatu rangkaian yang terdiri dari beberapa bangunan fisik yang masing-masing saling mengkait dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Misalnya jaringan jalan, dimana jalan adalah merupakan sarana yang salah satu fungsinya dapat dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa sektor lainnya seperti permukiman, perdagangan, kawasan industri, wilayah pusat pemerintahan dan lain sebagainnya. Sehingga setiap kali terjadi pembangunan infrastruktur seyogyanya diperlukan koordinasi secara mendalam dan antisipatif antar institusi terkait agar kemanfaatannya dapat berfungsi secara maksimal dan berdayaguna tinggi serta nyaman bagi masyarakat pengguna.

Adapun kondisi infrastruktur berdasarkan hasil wawancara yaitu sistem transportasi yang terdapat di Kawasan GEDANGSARI ini dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu sistem transportasi regional dan transportasi lokal.

a). Sistem Transportasi Regional

Pada Kawasan GEDANGSARI, pola jaringan jalan utama telah mampu memberikan akses yang memadai kegiatan pemasaran komoditi menuju lokasi-lokasi pasar utama di Kabupaten Madiun maupun kabupaten lain di sekitarnya. Hal ini ditunjukan dengan keberadaan jalan utama Madiun-Ponorogo yang melintasi wilayah kawasan agropolitan ini. Waktu yang harus dicapai menuju ibukota kabupaten dari pusat kawasan yaitu Kota Dolopo ke Kota Madiun melalaui jalan raya Madiun-Ponorogo memakan waktu kurang lebih 15 menit dengan jarak 15 Kilometer.

b). Sistem Transportasi Lokal

Sementara untuk pola pergerakan dari lokasi budidaya tani menuju lokasi pasar didalam kawasan agropolitan itu sendiri telah terwadahi oleh jalan-jalan lokal primer yang menghubungkan tiap kota tani menuju KSP-nya maupun menuju Kota Tani Utama. Jalan-jalan tersebut menjadi rute pergerakan antara komoditi mentah menuju lokasi pengolahan hingga ke lokasi pasar yang berada di luar kawasan. Sementara untuk kondisi prasarana jalan yang ada cukup beragam.

c). Jaringan telepon dan sarana komunikasi

Jaringan sarana komunikasi yang ada di KAG saat ini telah berkembang mengikuti kemajuan teknologi informasi. Sarana telekomunikasi yang dimanfaatkan penduduk di KAG meliputi:

SBRAWIUAL

- 1) Telepon seluler
- 2) Telepon kabel
- 3) Jaringan internet
- 4) Pesawat televisi
- 5) Radio

d). Pengairan

Kawasan Agropolitan Gedangsari untuk penggunan lahan sawah menggunakan sistem pengairan secara pengairan teknis, pengairan setengah teknis, pengairan sederhana, dan tadah hujan dengan luas lotal 3.003,60 Ha. Pengairan dengan sistem teknis seluas 4.510,6 Ha dengan lokasi penggunan sistem pengairan teknis tertinggi terdapat di Desa Kebonsari seluas 359 Ha dan penggunaan lokasi terendah di Desa Segulung seluas 42 Ha. Sistem pengairan setengah teknis terdapat di Desa Bader seluas 78 Ha, Desa Dolopo seluas 53 Ha, Desa Suluk seluas 11 Ha da Desa Candi Mulyo seluas 9 Ha, Sistem pengaiaran sederhana di Kawasan Agropolitan Gedangsari seluas 258 Ha dengan lokasi pengggunaan tertinggi terdapat di Desa Dagangan seluas 90 Ha dan Desa Sareng seluas 80 Ha. Sistem pengairan tadah hujan seluas 75 Ha yang terdapat di Desa Bader dan Segulung masing-masing seluas 25 Ha.

e). Jaringan Listrik

Saluran listrik di Kawasan Agropolitan Gedangsari pada tahun 2013 secara menyeluruh dengan total pelanggan sebesar 81.264 KK.

b. Kondisi Sumberdaya Manusia

Konsep pengembangan sumber daya manusia, selama ini terdapat perbedaan dan ketidaksamaan pengertian pengembangan sumber daya manusia diantara para pakar. Ketidaksamaan pengertian ini muncul sebagai akibat setiap negara mempunyai pengertian yang disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan masing-masing negara.

Manusia merupakan subyek dan obyek pembangunan, karenannya pendidikan dan pelatihan merupakan aspek yang cukup penting dilakukan dalam jangka pendek untuk memenuhi tenaga kerja terampil, berwawasan serta punya visi ke depan. Kondisi sumber daya manusia yang ada dikawasan agropolitan GEDANGSARI perlu dikembangkan lagi karena sangat disayangkan apabila para petani masih belum mempunyai jiwa berkembang. Sangat dibutuhkan pelatihan untuk para petani mengenai bagaimana cara pengolahan hasil pertanian yang baik sampai dengan bagaimana pemasarannya.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia diupayakan agar mampu mendukung pengelolaan pembangunan daerah, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang semakin merata dan bermutu, yang diimbangi dengan peningkatan dan perluasan pendidikan keahlian yang dibutuhkan oleh berbagai bidang pembangunan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek/Imtek).

Manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan, karenanya pendidikan dan pelatihan merupakan aspek yang cukup penting dilakukan dalam jangka pendek untuk memenuhi tenaga kerja terampil, berwawasan luas serta punya visi ke depan. Disisi lain, Louis Emmerij (dalam Tadjudin, 1993) merumuskan pengembangan sumber daya aparatur merupakan tindakan: a) kreasi sumber daya manusia, b) pengembangannnya, c) menyusun struktur insentif/upah sesuai dengan peluang kerja yang ada. Ketiga pengertian ini mengandung upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan formal dan pelatihan serta pemanfaatan sumber daya tersebut.

c. Kondisi Akses Permodalan

Pengembangan kawasan agropolitan tidak dapat dilepaskan dari aspek permodalan, menyangkut anggaran, sarana material, peralatan, bahan-bahan yang diperlukan dan ruang atau gedung.

Teori Kutub Pertumbuhan didasarkan pada kepercayaan bahwa pemerintahan pada negara berkembang, dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dengan jalan melakukan investasi besar-besaran pada industri yang memerlukan modal besar dalam kota-kota besar atau daerah tertentu. Pertumbuhan ini ditujukan untuk menciptakan *spread effect* kepada daerah pedesaan dalam rangka pembangunan regional (Rondinelli, 2001; 89).

Pengembangan kawasan agropolitan tidak dapat lepas dari aspek permodalan, menyangkut anggaran, sarana material, peralatan, bahan-bahan dan lain-lain.

Wujud permodalan pada pengembangan KAG didapatkan berdasarkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Permodalan dari Bappeda
- b. Permodalan dari Dinas dan instansi terkait kluster di KAG
- c. Usaha mandiri dari tiap-tiap kluster

Dari wawancara dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa modal yang diberikan oleh para petani hanya berupa modal awal selanjutnya modal yang telah diberikan oleh dinas yang terkait, seperti contoh modal yang didapat para petani yaitu dari dinas-dinas terkait yaitu dinas pertanian memberikan modal berupa bantuan bibit tebu dan coklat, dinas peternakan dan perikanan memberikan bantuan bibit sapi dan ikan yang selanjutnya dikembangkan sendiri oleh para petani akan dikembangkan sendiri oleh petani agar petani tersebut bisa mengembangkan sendiri usahanya pemerintah hanya sebagai fasilitator selanjutnya para petanilah yang akan mengembangkan agar mempunyai jiwa mandiri.

2. Proses dan pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster di Kabupaten Madiun

a. Pelaksanaan proses pengembangan kawasan agropolitan

Perencanaan pembangunan kawasan agropolitan kawasan agropolitan yang dilakukan haruslah memperhatikan seluruh potensi yang dimiliki, sehingga fungsi dan peranan dapat dimaksimalkan. Perencanaan pembangunan kawasan agropolitan kawasan agropolitan tersebut harus perlu memperhatikan keseimbangan lingkungan, karena hal itu berguna untuk tetap menjaga dan memelihara Kabupaten Madiun yang dingin dan sejuk berudara segar, sebagai daerah wisata.

Perencanaan pembangunan kawasan agropolitan kawasan agropolitan merupakan dasar untuk mencapai tujuan visi dan misi Kabupaten Madiun. Karena dalam rencana pembangunan kawasan agropolitan kawasan agropolitan terdapat

beberapa wilayah dimaksudkan agar fungsi dari masing-masing wilayah dapat dicapai secara maksimal. Perencanaan sebagai alat pembangunan kawasan agropolitan kawasan agropolitan dimaksudkan sebagai alat yang strategis dalam melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan kawasan agropolitan kawasan agropolitan di Kabupaten Madiun . Perencanaan berkaitan dengan keinginan atau kehendak untuk merubah sesuatu menjadi apa yang ingin dituju. Perencanaan Pembangunan kawasan agropolitan harus dilakukan secara sistematis dan prosedural untuk mencapai keinginan dan kehendak pembuat rencana sesuai dengan tujuan pembangunan kawasan agropolitan. Perencanaan pembangunan kawasan agropolitan memiliki manfaat yang besar dalam berbagai kegiatan.

Perencanaan pembangunan kawasan agropolitan memegang peran yang sangat penting dalam mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan guna mencapai tujuan. Mengingat kemampuan manusia terbatas, maka dalam perencanaan harus dipertimbangkan daya jangkau berdasarkan waktu serta usaha-usaha untuk mengurangi berbagai resiko, serta mampu menunjang efektiftas proyek pembangunan kawasan agropolitan yang telah disusun.

Dalam perencanaan pembangunan kawasan agropolitan Kabupaten Madiun maka perlu dilakukan penetapan alternatif-alternatif. Alternatif terpilih akan digunakan untuk implementasi perencanaan. Dengan demikian perencanaan harus melakukan serangkaian pengambilan keputusan yang di dalamnya terkandung penilaian-penilaian terhadap alternatif-alternatif. Perencanaan harus realistis dan ekonomis, ini berarti perencanaan harus benar-benar dapat dilaksanakan serta tetap memperhatikan efisiensi biaya. Harus dilakukan dengan

koordinasi, karena tanpa adanya koordinasi maka perencanaan tidak akan dapat dilakukan karena perencanaan membutuhkan sumbangan pemikiran dari bagianbagian lain dalam suatu organsasi.

Harus didasarkan pengalaman, pengetahuan, dan intuisi, sebab dapat membantu organisasi untuk memperoleh keberhasilan yang pernah dicapainya atau menghindari kegagalan yang pernah dihadapinya. Pengetahuan merupakan landasan rasional yang diperoleh dari penelitian dan pembelajaran. Sedangkan intuisi adalah kemampuan subyektif dari perencana yang didasarkan pada naluri berencana yang baik dan dipercaya organisasi. Dilandasi partisipasi, karena dalam perencanaan dapat melengkapi alternatif keputusan sekaligus juga meningkatkan rasa tanggung jawab perencana dalam melaksanakan tugas perencanaan. Memperhitungkan segala kemungkinan, ini berarti perencanaan harus melihat resiko dari semua alternatif yang ada. Resiko ini sejak awal telah diperkirakan sehingga dapat diketahui langkah-langkah selanjutnya.

b. Hasil dari pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster di Kabupaten Madiun

Pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten Madiun lima tahun ini cukup baik. Sebagian besar produktivitasnya meningkat dari tahun ke tahun. Namun masih perlu dilakukan upayan peningkatan kuantitas serta kualitas produksi setiap komoditas agar dapat meningkatkan daya saing produk dengan daerah lain. Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan produktivitas, perlu dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Selain itu, kebijakan

yang diberlakukan pemerintah sangat berpengaruh terhadap pengembangan tiap komoditasnya.

Keragaman diversifikas komoditas dapat memberikan nilai tambah tersendiri pada komoditas, sehingga komoditas unggulan di Kabupaten Madiun dapat mengahasilkan produk sekunder dan tersier yang juga berpottensi menjadi produk unggulan. Berdasarkan hasil analisa, maka jenis diversifikasi tiap komoditas lebih diarahkan seperti yang pernah ada, yaitu:

- 1) Komoditas Tebu, dengan produk diversifikatif gula mangkok, sirup berbahan dasar gula mangkok
- 2) Komoditas Kakao, dengan produk diversifikatif bubuk kakao, permen kakao, dan dapat juga dikembangkan sebagai selai dan meises cokelat.
- 3) Komoditas Buah-buahan (durian, mangga, dan manggis), dengan produk diversifikatif manisan buah, selai buah, buah dalam kemasan, serta dapat dikembangkan juga sebagai dodol dan sirup buah.

Arahan tersebut tetap digunakan karena masih relevan dan banyaknya kendala yang ditemukan dalam implementasi di lapangan. Dari berbagai jenis produk diversifikatif komoditas unggulan yang ada, hanya ada satu produk saja yang sudah dapat dikembangkan/ diimplementasikan, yaitu produk gula mangkok yang berbahan dasar dari komoditas tebu. Pengolahan komoditas ini hanya dalam skala kecil/rumah tangga yang terletak di Desa Tambakmas dan Desa Palur Kecamatan Kebonsari.

Rencana diversifikasi yang belum dapat terealisasi disebabkan karena adanya beberapa hambatan. Seperti belum mampunya masyarakat dalam

mengolah komoditas unggulan, belum adanya industri pengolahan yang didukung dengan teknologi yang tepat guna dalam mengolah komoditas, serta tidak adanya investor yang tertarik denga potensi pengembangan dan pengolahan komoditas-komoditas tersebut. Selain itu, tidak adanya intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga dan pasokan komoditas melalui lembaga kemasyarakatan atau kelompok tani, sehingga komoditas, khususnya untuk kakao dijual langsung oleh petani pada pabrik dari luar Kawasan Agropolitan GEDANGSARI Kabupaten Madiun, menjadi salah satu kendala pula dalam pengembangan produk diversifikatif komoditas unggulan.

Kendala tersebut dapat diminimalisasi melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian, baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan kelembagaan atau kelompok tani yang berfungsi sebagai kader pertanian dan meningkatkan hasil pertanian melalui pelatihan-pelatihan serta pendampingan-pendampingan pada masyarakat. Keberadaan penyuluh juga sangat berperan dalam meningkatkan kualitas produksi komoditas. Dengan adanya kekuatan internal wilayah Kawasan Agropolitan GEDANGSARI, maka diharapkan dapat menjadi daya tarik para investor untuk mengembangkan kegiatan agroindustri dalam skala yang lebih besar lagi.

3. Strategi pemerintah dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster di Kabupaten Madiun

Menurut Mulianggun (2002) terdapat 4 (empat) strategi/upaya pokok kunci keberhasilan dalam membangun agropolitan, yaitu :

- 5. Sumber daya manusia unggul;
- 6. Terbangunnnya sistem dan usaha agribisnis yang kuat;
- 7. Berkembangnya investasi dan permodalan agribisnis; dan
- 8. Terbangunnya sarana dan prasarana yang memadai dan mendukung kegiatan agribisnis.

Oleh karena itu pengembangan kawasan agropolitan haruslah mampu melihat kedepan dan melakukan pembangunan berkelanjutan melalui :

a. Peningkatan sumber daya manusia sebagai pelaku kegiatan dalam mendukung kelembagaan guna pengembangan kawasan agropolitan

Faktor pertama yaitu manusia pelaksanaannya harus baik dan merupakan faktor yang esensial dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan kawasan agropolitan di Kabupaten Madiun. Karena manusia merupakan subyek dalam setiap aktivitas, pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan dan pembangunan kawasan agropolitan. Oleh sebab itu agar mekanisme tersebut berjalan dengan baik, yakni sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka manusia atau subyek atau pelakunya harus pula baik.

Keberhasilan perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan kawasan agropolitan daerah tidak terlepas dari partisipasi aktif anggota masyarakat Kabupaten Madiun sebagai suatu kesatuan yang integral. Karena secara prinsip penyelenggaraan pembangunan kawasan agropolitan ditunjukkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, partisipasi masyarakat tersebut meliputi :

- 1) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan
- 3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil
- 4) Partisipasi dalam evaluasi.

Organisasi dan manajemen yang baik adalah faktor yang tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan kawasan agropolitan, adalah organisasi yang dapat menerapkan beberapa azas atau prinsip-prinsip organisasi, sehat, efektif, efisien yang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya mendasari diri dengan azas-azas organisasi. Faktor berikutnya adalah manajemen, mencakup seni, keahlian, proses dalam mendaya gunakan orang-orang serta sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki guna mencapai tujuan pembangunan kawasan agropolitan , melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang dalam strategi, koordinasi dan evaluasi evalusai proyek pembangunan kawasan agropolitan tersebut.

b. Pengembangan agribisnis

Untuk meningkatkan efektifitas strategi, koordinasi dan pengembangan agribisnis pembangunan kawasan agropolitan maka perlu meningkatkan sistem menyeleksi data usulan proyek. Cara ini untuk mengatasi kesalahan pada tingkatan pengambilan keputusan pertama. Ketegasan sistem ini terdapat pada awal ketika prosedur mulai dijalankan, sehingga kesalahan data akan terdeteksi lebih awal. Ketegasan sistem ini akan lebih efektif apabila pihak yang telah membuat kesalahan berusaha

menyadari kesalahannya dan memperbaikinya sendiri, maka hal tersebut diusahakan dengan menambah *loop-connector* yang berhubungan langsung dengan unit fungsional yang telah membuat kesalahan penulisan dan penyusunan usulan proyek, sehingga unit fungsional dapat langsung mengirimkan hasil perbaikannya sendiri.

Kendala yang dihadapi saat ini terjadi pada *system* agribisnins, dimana hampir semua rencana belum terealiasi akibat kurang siapnya masyarakat dan pemerintah dalam menjawab tantangan pengembangan kawasan agropolitan. Pengembangan kawasan agropolitan yang melibatkan banyak sektor dan lintas dinas, menyebabkan kurang terintegrasinya perencanaan. Selain itu, pendampingan yang dilakukan selama ini masih kurang optimal karena respon dari masyarakat sendiri masih lemah. Dengan demikian, yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendampingan yang lebih menekankan perubahan *mind set* para petani.

Pengembangan kluster agribisnis Kawasan Agropolitan yang terbentuk secara umum sudah terealisasi. Hanya saja, diperlukan perluasan kawasan produksi di masing-masing kluster serta peningkatan skala kegiatan. Sehingga komoditas unggulan, tidak hanya dapat diproduksi di beberapa desa dalam satu kecamatan saja, tetapi di seluruh desa dalam kecamatan tersebut. Dengan peningkatan skala produksi, diharapkan dapat meningkatkan skala agroindustri yang akan dikembangkan di masing-masing wilayah yang direncanakan.

c. Peningkatan investasi dan permodalan dalam mendukung pengembangan kawasan agropolitan

Pengembangan investasi dan permodalan dapat diterapkan dengan bantuan modal dan kredit yang dilakukan dengan prinsip mendidik terstruktur, dan sistematis. Bantuan langsung dalam bentuk bergulir atau cuma-cuma dalam bentuk uang atau modal kerja yang diberikan haruslah berdasarkan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat kawasan agropolitan dan mengarah kepada masyarakat. Untuk itu, sebelumnya harus dilakukan identifikasi dan analisis kebutuhan masyarakat kawasan. Kredit ini hendaknya tidak dibatasi untuk usaha budidaya saja, tetapi bisa digunakan untuk segala macam usaha baik *on farm* maupun *off fram*.

Pengembangan manajemen dan pengusaan kawasan agropolitan yang meliputi rencana pengembangan teknologi, rencana manajemen permodalan, serta rencana manajemen pemasaran yang dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat, saat ini belum terlaksana sepenuhnya. Kelembagaan pemerintah dan masyarakat belum mampu dan mendudkun terwujudnya pemenuhan kebutuhan terkait dengan aspek hukum, agrarian, permodalan, pemasaran, dan manajemen agribisnis menjadi suatu sistem. Selain itu, pengembangan iklim investasi belum kondusif untuk para investor menanamkan modalnya dalam agribisnis Kawasan Agropolitan GEDANGSARI. Dengan demikian, permodalan, manajemen, dan pemasaran masih memiliki permasalahan yang sama dalam pengembangan komoditas unggulan.

Hal ini dapat diminimalisasi dengan adanya pendampingan serta pelibatan masyarakat secara aktif dan intensif agar masyarakat dapat mengetahui dan merasakan secara langsung perubahan yang terjadi dalam setiap pengembangan di Kawasan Agropolitan GEDANGSARI.

d. Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan agropolitan

Memperhatikan kecenderungan perkembangan saat ini, kawasan terbangun terutama yang berlokasi di sepanjang jalur jalan regional dan jalur jalan perlu mendapat perhatian untuk diarahkan perkembangannya. Pola pemukiman yang menyebar akan dapat menguntungkan dalam penempatan sarana dan prasarana perkotaan. Untuk menghadapi desakan perkembangan yang terjadi (ekspansi) terhadap perkembangan, pemukiman penduduk diarahkan secara teratur ke arah lahan yang masih kosong.

Kaitannya dengan perencanaan pembangunan kawasan agropolitan maka jika melihat geografis Kabupaten Madiun, kondisi ini tidak memungkinkan seluruh kawasan dapat dimanfaatkan untuk dijadikan lahan yang efektif untuk pengembangan fisik. Namun demikian untuk pengembangan di masa yang akan datang, ketersediaan lahan diperkirakan cukup luas untuk menampung perkembangan yang terjadi.

Sejalan dengan perkembangan penduduk yang akan terjadi, penyediaan terhadap kebutuhan lahan akan semakin meningkat, baik untuk penempatan perumahan maupun untuk kegiatan usaha. Untuk mengarahkan perkembangan, terlebih dahulu dilakukan pengkajian lebih mendalam terhadap kelayakan wilayah tersebut dalam menampung kebutuhan pembangunan kawasan agropolitan . Wilayah potensial yang masih terdapat di Kabupaten Madiun yang merupakan wadah untuk menampung perkembangan dapat dirinci sebagai berikut :

- 1. Wilayah yang mempunyai potensi fisik dasar yang dapat menampung luas kebutuhan kualitatif dan kuantitatif yang diperlukan sesuai dengan perencanaan pertumbuhan masyarakat.
- 2. Wilayah yang mempunyai perkembangan kawasan terbangun cukup tinggi, dalam arti terdapatnya kegiatan-kegiatan fungsional.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian tentang Strategi Pemerintah Kabupaten Madiun Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kluster (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kawasan Agropolitan GEDANGSARI Kabupaten Madiun), menyimpulkan bahwa :

- 1. Dalam pengembangan kawasan agropolitan harus memenuhi persyaratan yaitu lahan yang memadahi, infrastruktur yang mendukung, sumberdaya manusia yang berkompeten, dan dalam pengembangan kawasan agropolitan harus tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar.
- 2. Kawasan Agropolitan, Kondisi infrastruktur, sumberdaya manusia dan akses permodalan dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster di Kabupaten Madiun sudah cukup baik, berpengaruh terhadap pengembangan tiap komoditasnya. Keragaman diversifikas komoditas dapat memberikan nilai tambah tersendiri pada komoditas, sehingga komoditas unggulan di Kabupaten Madiun dapat menghasilkan produk sekunder dan tersier yang juga berpotensi menjadi produk unggulan.
- 3. Proses dan pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster di Kabupaten Madiun diawali dengan penyusunan dan pengesahan master plan kawasan agropolitan Kabupaten Madiun, selanjutnya penetapan kawasan pertanian yang akan menjadi kawasan agropolitan yang ditetapkan oleh

pemerintah daerah kabupaten madiun melalui pengajuan dukungan penetapan kawasan agroplitan. Proses dan pelaksanaan tersebut didukung oleh struktur ruang kawasan agropolitan yang masih relevan digunakan karena pengembangan Kawasan Agropolitan mengacu pada masterplan tersebut.

- 4. Keberhasilan perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan kawasan agropolitan daerah tidak terlepas dari partisipasi aktif anggota masyarakat Kabupaten Madiun sebagai suatu kesatuan yang integral. Karena secara prinsip penyelenggaraan pembangunan kawasan agropolitan ditunjukkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
- 5. Pengembangan kluster agribisnis Kawasan Agropolitan yang terbentuk secara umum sudah terealisasi. Hanya saja, diperlukan perluasan kawasan produksi di masing-masing kluster serta peningkatan skala kegiatan. Sehingga komoditas unggulan, tidak hanya dapat diproduksi di beberapa desa dalam satu kecamatan saja, tetapi di seluruh desa dalam kecamatan tersebut. Dengan peningkatan skala produksi, diharapkan dapat meningkatkan skala agroindustri yang akan dikembangkan di masing-masing wilayah yang direncanakan.
- 6. Pengembangan manajemen dan pengusaan kawasan agropolitan yang meliputi rencana pengembangan teknologi, rencana manajemen permodalan, serta rencana manajemen pemasaran yang dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat, saat ini belum terlaksana sepenuhnya. Kelembagaan pemerintah dan masyarakat belum mampu dan mendudkun terwujudnya pemenuhan kebutuhan terkait dengan aspek hukum, agrarian, permodalan, pemasaran, dan manajemen agribisnis menjadi suatu system. Selain itu, pengembangan iklim

investasi belum kondusif untuk para investor menanamkan modalnya dalam agribisnis Kawasan Agropolitan GEDANGSARI.

B. SARAN

- 1. Pembangunan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Madiun harus lebih memperhatikan kondisi riil suatu kawasan agar dapat mengatasi ketidaksesuaian antara kondisi riil dengan kondiasi rencana dengan prospek kedepan, sebagai jalur lalu lintas regional dan jalur lalu lintas internasional Kabupaten pendidikan dan Kabupaten wisata yang sejuk dan indah dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan.
- 2. Guna meningkatkan proses dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Madiun maka perlu dilakukan upaya mandiri serta usaha swadaya masyarakat dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian, baik secara kuantitas maupun kualitasnya.
- 3. Strategi Pembangunan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Madiun perlu ditingkatkan Evaluasi Pembangunan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Madiun. Dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan secara terintegrasi, perlu disusun *Review Master Plan* Pengembangan Kawasan Agropolitan yang akan menjadi acuan penyusunan program pengembangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief. 2013. *Pembangunan Sektor Perikanan Berbasis Kluster*, http://www.trobos.com/show_article.php?rid=22&aid=2141. di akses pada tanggal 6 Desember 2013.
- BPS Kab. Madiun. 2013. *Kabupaten Madiun Dalam Angka 2013*. Madiun: Katalog BPS.
- Daryanto. 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap, Penerbit, Apollo. Surabaya.
- Djamin, Awaloedin. 1974. *Masalah Organisasi dalam Administrasi Pembangunan*. Prisma. Jakarta.
- Fatimah, Nunung. 2006. Analisis Deskriptif Model Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Cluster. Skripsi: Malang.
- Friedman, John and Mike Douglass, 1974. Pengembangan Agropolitan: Menuju Siasat Baru Perencanaan Regional di Asia Lembaga. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hardjanto, Imam. 2008: Berbagai Dimensi Administrasi Pembangunan. Malang: Universitas Brawijaya.
- Haryanto. 2008. Membangun Kembali Kepercayaan Publik Kepada Pemerintah.
 Program Doktor Ilmu Administrasi Sarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Kab. Madiun. 2005. Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan 2005. Kabupaten Madiun.
- Keban, Yaremis T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta: Gava Media.
- Khairuddin. 1992. *Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Aspek*: Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan, Liberty: Yogyakarta.
- Kodoatie, Robert 2003. Manajemen Dan Rekayasa Infrastruktur. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Lembaga Administrasi Negara. 2007. Kajian Paradigma Pembanguan, Paradigma Administrasi Publik, Paradigma Sosial Ekonomi Politik. LAN. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Moeljarto, T 2002. Birokrasi Dalam Polemik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- Mubyarto. 2003. *Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan*. Edisi Revisi II. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muliaanggun, Asianidharma. 2002. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Ruang Kawasan Sentra Produksi Pangan Nasional dan Daerah (Agropolitan). Dirjen Penataan Ruang. Jakarta.
- Nugroho. 2007. Suatu Kerangka Berpikir Baru dalam Strategi Pembangunan Nasional. Fakultas Ekonomi Universitas Widyagama. Malang.
- Pemprov Jawa Timur. 2005. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur.
- Review Masterplan Kawasan Agropolitan GEDANGSARI. 2011. Kabupaten Madiun
- Riggs, Fred W. 1996. Administrasi Pembangunan, Batas-Batas, Strategi Pembangunan dan Pembaharuan Administrasi. Rajawali Press. Jakarta.
- Rondinelli. 2001. Decentralization and development: Policy and Implementation In Developing Countries. First Edition. Sage Publications, Beverly Hills. California.
- Rudy, A. Tarigan. 2002. *Membangun Komunitas Kebijakan*. Forum Inovasi FISIP. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Rustiadi & Sugimin Pranoto. 2007. Agropolitan: Membangun Ekonomi Pedesaan. Crestpent Press. Bogor.
- Salusu M.A.J. 2002. Pengambilan Keputusan Stratejik untuk organisasi public dan organisasi non profit. PT Grasindo. Jakarta.
- Sa'id, G dan Intan, A.H. 2001. Manajemen Agribisnis. Ghalia Indonesia.
- Siagian, Sondang. 2002. Manajemen Strategi. Jakarta: Bumi Aksara.
- ------ 2008. Filsafat administrasi (Edisi Revisi). Bumi Aksara. Jakarta.
- Soemarmo. 2008. Komoditas Unggulan Holtikultura Agropolitan Poncokusumo. PPSUB. Malang.
- Soeprapto, Riyadi. 2003. Etika Birokrasi Pemerintahan dan Akuntabilitas Sektor Publik. Riyadi Press, Malang.
- Sugiyono, DR, Prof.2010. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung.
- -----Prof.2011. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung.
- Suryono, Agus, 2004, Teori dan Isu Pembangunan. UM PRESS. Malang.

- Suryanto, 2009. *Pembangunan Infrastruktur dalam Ketahanan Nasional* http://buletinlitbang.dephan.go.id diakses pada tanggal 2 September 2014.
- Surdia, Reza 2008. *Definisi Infrastruktur*. <u>www.tanimart.wordpress.com</u> diakses pada tanggal 2 september 2014.
- Suwandi. 2005. *Agropolitan Merentas Jalan Meniti Harapan*. Duta Karya Swasta. Jakarta.
- Tadjudin. 1993. Perencanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Prenada Media Grup. Jakarta.
- ----- 2011. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Tiara, Virsa. 2004. Analisis Deskriptif Pola Pengembangan Ekonomi Daerah Dengan Pendekatan Kluster. Skripsi. Malang.
- Tjiptoherijanto dan Manarung. 2010. Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya. Universitas Indonesia. Jakarta.
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.



PEDOMAN WAWANCARA

A. BAPPEDA KABUPATEN MADIUN

- 1. Bagaimana potensi pertanian Kabupaten Madiun dibanding dengan daerah lain?
- 2. Apa saja kawasan agropolitan yang ada di Kabupaten Madiun?
- 3. Bagaimana sejarah pemilihan agropolitan GEDANGSARI hingga ditentukan agropolitan berbasis kluster?
- 4. Bagaimana gambaran umum Kabupaten Madiun?
- 5. Bagaimana gambaran umum Bappeda Kabupaten Madiun?
- 6. Bagaiman gambaran umum GEDANGSARI?
- 7. Bagaimana kondisi infrastruktur, sumber daya manusia, dan akses permodalan dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster di Kabupaten Madiun?
- 8. Bagaimana proses dan pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster di Kabupaten Madiun?
- a. Pelaksanaan proses pengembangan kawasan agropolitan
- Hasil dari pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster di Kabupaten Madiun
- 9. Bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Madiun dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis kluster di Kabupaten Madiun?
 - a. Peningkatan sumber daya manusia sebagai pelaku kegiatan dalam mendukung kelembagaan guna pengembangan kawasan agropolitan

- b. Pengembangan agribisnis
- c. Peningkatan investasi dan permodalan dalam mendukung pengembangan kawasan agropolitan
- d. Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan agropolitan

B. MASYARAKAT KAWASAN AGROPOLITAN GEDANGSARI

- 1. Apakah program pengembangan kawasan agropolitan ini benar real dirasakan manfaatnya?
- 2. Apakah bisa membantu produk unggulan bagaimana dan apakah produk unggulan memberikan dampak?
- 3. Apakah pemerintah terjun langsung ke lapangan?
- 4. Apakah pembinaan dari masyarakat ada?
- 5. Fasilitas yang diberikan dalam bentuk apa?
- 6. Bagaimana bentuk pendanaanya?
- 7. Bagaimana bentuk kordinasi dan monitoring?

CURRICULUM VITAE

: Siska Ayu Fitria Nama

: 105030103111022 NIM

Tempat Tanggal Lahir: Madiun 12 April 1991

: 1. TK Dharma Wanita Madiun Tamat Tahun 1998 Pendidikan

> 2. SDN 02 Madiun Lor Tamat Tahun 2004

> 3. SMPN 13 Madiun Tamat Tahun 2007

> 4. SMAN 4 Madiun Tamat Tahun 2010

> 5. Universitas Brawijaya Tamat Tahun 2014







PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Jalan Alun – Alun Utara No. 4 2 (0351) 451295 M A D I U N (63121)

Madiun, 02 April 2014

Di -

Nomor : 072 / 236 / 402.205 / 2014 Kepada

Sifat : Biasa Yth. Sdr. Ka. B A P P E D A

Lampiran : 1 (satu) berkas Kabupaten Madiun

Perihal : Rekomendasi Ijin Survey

MADIUN

Menunjuk surat dari Ketua Prodi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang tanggal 24 Maret 2014 Nomor : 4109/UN10.3/PG/2014 perihal Permohonan Ijin Riset/Survey, bersama ini terlampir disampaikan dengan hormat Rekomendasi Ijin Riset/Survey dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun atas nama SISKA AYU FITRIA dengan judul survey : "Strategi Pemerintah Kabupaten Madiun Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kluster".

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KABUPATEN MADIUN

> KURNIA AMINULLOH Pembina Tingkat I NIP. 19700702 199003 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Bp. Bupati Madiun (Sebagai laporan)

2 Arsip (yang bersangkutan)



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Jalan Alun – Alun Utara No. 4 🖀 (0351) 451295 MADIUN (63121)

REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEY Nomor: 072 / 236 / 402.205 / 2014

Dasar

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 - 5. Peraturan Bupati Madiun tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
- b. bahwa sesuai surat dari Ketua Prodi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang tanggal 24 Maret 2014 Nomor : 4109/UN10.3/PG/2014 perihal Permohonan Ijin Riset/Survey atas nama SISKA AYU FITRIA telah mengajukan rekomendasi Riset/Survey:
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta hasil ferivikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian/Survey.

Bupati Madiun, memberikan rekomendasi kepada:

a. Nama SISKA AYU FITRIA

Alamat Jl. Pilang Madya No. 31 Madiun

Pekerjaan/Jabatan Mahasiswa

Instansi/Civitas/Organisasi: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang





Untuk mengadakan penelitian/survey/research dengan:

a. Judul : Strategi Pemerintah Kabupaten Madiun Dalam

Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kluster

b. Bidang Penelitian : Administrasi Publik

c. Status Penelitian : Skripsi
d. Pembimbing : -

e. Anggota : 1 (satu) orang f. Tanggal (Waktu) : 2 (dua) bulan

g. Tempat/Lokasi : BAPPEDA Kabupaten Madiun

Dengan Ketentuan

 Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian;

 Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/lokasi penelitian;

 Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Madiun melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 02 April 2014

a.n. BUPATI MADIUN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KABUPATEN MADIUN

> KURNIA AMINULLOH Pembina Tingkat I NIP. 19700702 199003 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Bp. Bupati Madiun (Sebagai laporan)

2. Arsip (yang bersangkutan)



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Jalan Alun - Alun Utara No. 4 🕿 (0351) 451295 MADIUN (63121)

Madiun, 26 Nopember 2014

Nomor

072 / 6044/ 402.205 / 2014

Kepada

Sifat

Biasa

Yth. Sdr. Camat Dagangan

Lampiran 1 (satu) berkas Kabupaten Madiun

Perihal

Rekomendasi Ijin Riset/Survey

Di -

GEGER

Menunjuk surat dari Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 21 Nopember 2014 Nomor : perihal Permohonan Ijin Riset/Survey, bersama ini 15147/UN.10.3/PG/2014 terlampir disampaikan dengan hormat Rekomendasi Ijin Riset/Survey dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun atas nama SISKA AYU FITRIA dengan tema " Strategi Pemerintah Kabupaten Madiun Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kluster (Studi pada Kawasan Agropolitan GEDANGSARI di BAPPEDA Kabupaten Madiun)".

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KABUPATEN MADIUN

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Bp. Bupati Madiun (Sebagai laporan)

2. Arsip (yang bersangkutan)

Drs. AGUS BUDI WAHYONO, M.Si

Pembina Tingkat I NIP. 19620801 198203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Jalan Alun – Alun Utara No. 4 🕿 (0351) 451295 MADIUN (63121)

REKOMENDASI KEGIATAN RISET/SURVEY Nomor: 072 / 1044 / 402.205 / 2014

Dasar

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- 5. Peraturan Bupati Madiun tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
- bahwa sesuai surat dari Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 21 Nopember 2014 Nomor: 15147/UN.10.3/PG/2014 perihal Permohonan Ijin Riset/Survey, atas nama : SISKA AYU FITRIA telah mengajukan rekomendasi survey;
- Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta hasil ferivikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian/Survey.

Bupati Madiun, memberikan rekomendasi kepada:

Nama SISKA AYU FITRIA

b. Alamat

Pekerjaan/Jabatan Mahasiswa

Instansi/Civitas/Organisasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang



Untuk mengadakan Riset/Survey dengan:

a. Judul : Strategi Pemerintah Kabupaten Madiun Dalam

Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kluster (Studi pada Kawasan Agropolitan GEDANGSARI di

BAPPEDA Kabupaten Madiun

b. Bidang Penelitian : Administrasi Publik

c. Status Penelitian : SI d. Pembimbing : -

e. Anggota : 1 (satu) orang f. Tanggal (Waktu) : 1 (satu) bulan

g. Tempat/Lokasi : Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun

Dengan Ketentuan

 Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi survey;

- Pelaksanaan survey agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/lokasi survey;
- Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Madiun melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 26 Nopember 2014

a.n. BUPATI MADIUN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KABUPATEN MADIUN

Drs. AGUS BUDI WAHYONO, M.Si

Pembina Tingkat I NIP. 19620801 198203 1 006

<u>Tembusan</u> disampaikan kepada:

Yth. 1. Bp. Bupati Madiun (Sebagai laporan)

2. Arsip (yang bersangkutan)



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Jalan Alun - Alun Utara No. 4 🖀 (0351) 451295 MADIUN (63121)

Madiun, 26 Nopember 2014

072 / 1044 / 402.205 / 2014 Kepada Nomor

Yth. Sdr. Camat Kebonsari Sifat Biasa Kabupaten Madiun 1 (satu) berkas Lampiran

Di -Perihal Rekomendasi Ijin Riset/Survey

GEGER

Menunjuk surat dari Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 21 Nopember 2014 Nomor : 15147/UN.10.3/PG/2014 perihal Permohonan Ijin Riset/Survey, bersama ini terlampir disampaikan dengan hormat Rekomendasi Ijin Riset/Survey dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun atas nama SISKA AYU FITRIA dengan tema " Strategi Pemerintah Kabupaten Madiun Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kluster (Studi pada Kawasan Agropolitan GEDANGSARI di BAPPEDA Kabupaten Madiun)".

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KABUPATEN MADIUN

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Bp. Bupati Madiun (Sebagai laporan)

2. Arsip (yang bersangkutan)

Drs. AGUS BUDI WAHYONO, M.Si

Pembina Tingkat I NIP. 19620801 198203 1 006





PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jalan Alun – Alun Utara No. 4 🕿 (0351) 451295 MADIUN (63121)

<u>REKOMENDASI KEGIATAN RISET/SURVEY</u>

Nomor: 072 / 1044 / 402.205 / 2014

Dasar

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 - 5. Peraturan Bupati Madiun tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.

Menimbang

- bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
- bahwa sesuai surat dari Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 21 Nopember 2014 Nomor : 15147/UN.10.3/PG/2014 Permohonan Ijin Riset/Survey, atas nama : SISKA AYU FITRIA telah mengajukan rekomendasi survey;
- Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta hasil ferivikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian/Survey.

Bupati Madiun, memberikan rekomendasi kepada:

Nama SISKA AYU FITRIA

Alamat

Pekerjaan/Jabatan Mahasiswa

Instansi/Civitas/Organisasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang



Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kluster (Studi pada Kawasan Agropolitan GEDANGSARI di

BAPPEDA Kabupaten Madiun

b. Bidang Penelitian : Administrasi Publik

c. Status Penelitian : SI d. Pembimbing : -

e. Anggota : 1 (satu) orang f. Tanggal (Waktu) : 1 (satu) bulan

g. Tempat/Lokasi : Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Dengan Ketentuan

 Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi survey;

- Pelaksanaan survey agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/lokasi survey;
- Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Madiun melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 26 Nopember 2014

a.n. BUPATI MADIUN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KABUPATEN MADIUN

Drs. AGUS BUDI WAHYONO, M.Si

Pembina Tingkat I NIP. 19620801 198203 1 006

2. Arsip (yang bersangkutan)

Yth. 1. Bp. Bupati Madiun (Sebagai laporan)

Tembusan disampaikan kepada:



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Jalan Alun - Alun Utara No. 4 2 (0351) 451295 M A D I U N (63121)

Madiun, 26 Nopember 2014

Nomor : 072 / 1044 / 402.205 / 2014 Kepada

Sifat : Biasa Yth. Sdr. Camat Geger

Lampiran : 1 (satu) berkas Kabupaten Madiun

Perihal : Rekomendasi Ijin Riset/Survey Di -

GEGER

Menunjuk surat dari Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 21 Nopember 2014 Nomor: 15147/UN.10.3/PG/2014 perihal Permohonan Ijin Riset/Survey, bersama ini terlampir disampaikan dengan hormat Rekomendasi Ijin Riset/Survey dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun atas nama SISKA AYU FITRIA dengan tema "Strategi Pemerintah Kabupaten Madiun Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kluster (Studi pada Kawasan Agropolitan GEDANGSARI di BAPPEDA Kabupaten Madiun)".

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KABUPATEN MADIUN

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Bp. Bupati Madiun (Sebagai laporan)

2. Arsip (yang bersangkutan)

Drs. AGUS BUDI WAHYONO, M.Si

Pembina Tingkat I NIP. 19620801 198203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Jalan Alun - Alun Utara No. 4 🖀 (0351) 451295 MADIUN (63121)

REKOMENDASI KEGIATAN RISET/SURVEY

Nomor: 072 / 1000 / 402.205 / 2014

Dasar

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah:
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- 5. Peraturan Bupati Madiun tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.

Menimbang

- bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian:
- bahwa sesuai surat dari Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Nopember 2014 Nomor: 15147/UN.10.3/PG/2014 Permohonan Ijin Riset/Survey, atas nama: SISKA AYU FITRIA telah mengajukan rekomendasi survey;
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta hasil ferivikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian/Survey.

Bupati Madiun, memberikan rekomendasi kepada:

a. Nama SISKA AYU FITRIA

Alamat

Pekerjaan/Jabatan Mahasiswa

Instansi/Civitas/Organisasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang



Untuk mengadakan Riset/Survey dengan:

Dalam Madiun Kabupaten Pemerintah Strategi a. Judul

> Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kluster (Studi pada Kawasan Agropolitan GEDANGSARI di

BAPPEDA Kabupaten Madiun

Administrasi Publik Bidang Penelitian

Status Penelitian Pembimbing

1 (satu) orang Anggota 1 (satu) bulan Tanggal (Waktu)

Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Tempat/Lokasi

Dengan Ketentuan

 Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi survey;

- 2. Pelaksanaan survey agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/lokasi survey;
- 3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Madiun melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Madiun, 26 Nopember 2014

a.n. BUPATI MADIUN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KABUPATEN MADIUN

Drs. AGUS BUDI WAHYONO, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19620801 198203 1 006

Tembusan disampaikan kepada: Yth. 1. Bp. Bupati Madiun (Sebagai laporan)

2. Arsip (yang bersangkutan)



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Jalan Alun - Alun Utara No. 4 🖀 (0351) 451295 MADIUN (63121)

Madiun, 26 Nopember 2014

072 / /044 / 402.205 / 2014 Nomor Kepada

Sifat Biasa Yth. Sdr. Camat Dolopo

Lampiran 1 (satu) berkas Kabupaten Madiun

Perihal Rekomendasi Ijin Riset/Survey Di -

GEGER

Menunjuk surat dari Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 21 Nopember 2014 Nomor : 15147/UN.10.3/PG/2014 perihal Permohonan Ijin Riset/Survey, bersama ini terlampir disampaikan dengan hormat Rekomendasi Ijin Riset/Survey dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun atas nama SISKA AYU FITRIA dengan tema " Strategi Pemerintah Kabupaten Madiun Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kluster (Studi pada Kawasan Agropolitan GEDANGSARI di BAPPEDA Kabupaten Madiun)".

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KABUPATEN MADIUN

Drs. AGUS BUDI WAHYONO, M.Si Tembusan disampaikan kepada: Pembina Tingkat I NIP. 19620801 198203 1 006

2. Arsip (yang bersangkutan)

Yth. 1. Bp. Bupati Madiun (Sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Jalan Alun - Alun Utara No. 4 😭 (0351) 451295 MADIUN (63121)

REKOMENDASI KEGIATAN RISET/SURVEY

Nomor: 072 / 1044 / 402.205 / 2014

Dasar

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- 5. Peraturan Bupati Madiun tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
- bahwa sesuai surat dari Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 21 Nomor: 15147/UN.10.3/PG/2014 Nopember 2014 perihal Permohonan Ijin Riset/Survey, atas nama: SISKA AYU FITRIA telah mengajukan rekomendasi survey;
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta hasil ferivikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian/Survey.

Bupati Madiun, memberikan rekomendasi kepada:

a. Nama SISKA AYU FITRIA

Alamat

Pekerjaan/Jabatan Mahasiswa

d. Instansi/Civitas/Organisasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang



Untuk mengadakan Riset/Survey dengan:

Judul Strategi Pemerintah Madiun Dalam Kabupaten

> Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kluster (Studi pada Kawasan Agropolitan GEDANGSARI di

BAPPEDA Kabupaten Madiun

b. Bidang Penelitian Administrasi Publik

Status Penelitian Pembimbing

Anggota 1 (satu) orang

Tanggal (Waktu) 1 (satu) bulan

Tempat/Lokasi Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Dengan Ketentuan

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi survey;

- 2. Pelaksanaan survey agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/lokasi survey;
- 3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Madiun melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 26 Nopember 2014

a.n. BUPATI MADIUN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KABUPATEN MADIUN

AGUS BUDI WAHYONO, M.Si

Pembina Tingkat I NIP. 19620801 198203 1 006

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Bp. Bupati Madiun (Sebagai laporan)

2. Arsip (yang bersangkutan)



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Aloon–aloon Utara Nomor 4 Telp./Fax(0351) 451145

MADIUN

Email: bappeda@madiunkab.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 072/693/402.203/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. N a m a : Ir. SUGENG WASITO

b. Jabatan : SEKRETARIS BAPPEDA KABUPATEN MADIUN

Dengan ini menerangkan bahwa:

a. N a m a : SISKA AYU FITRIA

b. alamat : Jl. Pilang Madya No. 31 Madiun

c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa

d. Instansi/Civitas/Organisasi : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Malang

e. Kebangsaan : Indonesia

Telah selesai melaksanakan penelitian/survey/research Strategi Pemerintah Kabupaten Madiun Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kluster selama 2 (dua) bulan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 6 Oktober 2014

a.n. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MADIUN

Sekretaris,

Ir.SUGENG WASITO

19590224 198703 1 005